

LAPORAN HASIL PENELITIAN KELOMPOK



TRANSFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN KADER APARATUR ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

OLEH :

**Dra. Nur Handayani, M.SI
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.BA
Dr. Layla Kurniawati, M.Pd.
Ir. Achmad Nur Sutikno, M.Si.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN KAJIAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

TAHUN 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan kurikulum pendidikan kader aparatur di IPDN; transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 di IPDN; faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 di IPDN. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi, wawancara, kuesioner dan dianalisis melalui reduksi data, tabulasi data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kurikulum pendidikan kader aparatur program Diploma IV IPDN ditinjau dari teori Miller Sellar menunjukkan bahwa kurikulum program D4 IPDN berorientasi tranmisi karena lebih menekankan pada isi atau materi ajar dimana mahasiswa langsung dihadapkan pada sejumlah materi pembelajaran yang harus diselesaikan selama 8 semester, tujuan pembelajaran mayoritas baru mencapai ranah kognitif dan masih berada pada tataran C2 , model mengajar (strategi mengajar) rata-rata masih model konvensional. Pada tataran implementasi tingkat kesesuaian materi pembelajaran dengan SAP/GBPP atau RPP/RPS terkesan acak. Dari segi kepuasan stakeholder pada tataran konsep dan penerapan teknologi informasi serta pemahaman tentang pemerintahan daerah perlu ditingkatkan; (2) Transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 di IPDN menunjukkan adanya perubahan dalam penekanan standar lulusan dimana semula ± 150 SKS dalam 8 semester menjadi ± 170 SKS dalam 8 semester dengan perubahan penekanan yang semula lebih ke aspek kognitif menjadi ke aspek psikomotorik (praktik) dan perubahan nomenklatur prodi serta penambahan 1 fakultas dan 3 prodi baru. Namun tenaga pendidik dan sarana prasarana masih menggunakan yang lama dengan membagi ketiga fakultas; (3)Faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 di IPDN adalah (a) faktor internal yaitu lembaga IPDN dan komitmen para pengambil kebijakan dan (b) faktor Eksternal meliputi : masyarakat, Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Revolusi Industri 4.0 (Tuntutan Perkembangan IPTEK), Kebutuhan Pangsa Pasar, Akreditasi Program Studi di IPDN.

Untuk itu perlu adanya komitmen semua pemangku kepentingan di IPDN dalam mewujudkan tranformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 dengan menyelenggarakan kurikulum berorientasi transformasi dan lebih mendewasakan praja serta merekrut dosen sesuai dengan standar kebutuhan.

Kata Kunci : Transformasi dan Kurikulum RI 4.0

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Transformasi Kurikulum Pendidikan Kader Aparatur Era Revolusi Industri 4.0 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri
2. Bidang Penelitian : Penelitian Kelompok
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Dra. Nur Handayani, M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 196707211998032001
 - d. Disiplin Ilmu : Administrasi
 - e. Pangkat Golongan : III /d
 - f. Jabatan : Lektor
 - g. Fakultas/Program Studi : Manajemen Pemerintahan
 - h. Alamat : Jatinangor
 - i. Telp/email : 081220371671/handayani.ipdn@gmail.com
4. Jumlah Anggota Peneliti : Tiga orang
 - a. Nama Anggota I : Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.BA
 - b. Nama Anggota II : Dr. Layla Kurniawati, M.Pd.
 - c. Nama Anggota III : Ir. Achmad Nur Sutikno, M.Si.
5. Lokasi Penelitian : IPDN
6. Jumlah Biaya : Rp.-
7. Publikasi : Dipublikasikan (Ya/Tidak)

Jatinangor, Oktober 2019

Mengesahkan
Kepala Lembaga Penelitian dan Kajian

Ketua Kelompok

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S
NIP. 195401191977071001

Dra. Nur Handayani, M.Si.
NIP. 196707211998032001

LEMBAR PERSETUJUAN

**Telah dikoreksi/disupervisi
Jatinangor, Oktober 2019
Supervisi/Reviewer**

**Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH., MH., SU
NIP. 19540605197206 1 001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Alloh Subhanahuwataala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “Transformasi Kurikulum Pendidikan Kader Aparatur Era Revolusi Industri 4.0 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri”.

Laporan penelitian ini dapat tersusun berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,, sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H, S.Sos, M.Si. selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S, selaku Kepala Lembaga Pusat Kajian dan Penelitian Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Pror. Dr.Ermaya Suradinata, SH, MH,.MS selaku reviewer

Untuk itu, penulis hanya bisa berharap semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan penelitian ini jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan serta kelemahan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran dari semua pihak demi kesempurnaannya.

Jatinangor, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PENELITIAN	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN DAFTAR ISI	vi
HALAMAN DAFTAR TABEL	viii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian .	8
1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan dan Sasaran Penelitian	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Sasaran Penelitian	10
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian	10
1.5.1 Kegunaan Teoritis	10
1.5.2 Kegunaan Praktis.	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teoritik Terkait.....	11
2.1.1 Transformasi Pendidikan 4.0	11
2.1.1.1 Transformasi.....	11
2.1.1.2 Transformasi Pendidikan.....	13
2.1.1.3 Transformasi Pendidikan 4.0	17
2.1.2 Kurikulum.....	19
2.1.2.1 Konsep Kurikulum.....	19
2.1.2.2 Implementasi Kurikulum.....	23
2.1.2.3 Pengembangan Kurikulum	28
2.1.2.4 Model Kurikulum	31
2.1.2.5 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	36
2.1.3 Revolusi Industri 4.0.....	38
2.1.4 Aparatur Sipil Negara	43
2.2 Tinjauan Normatif Terkait	43
2.3 Tinjauan Penelitian dan Kajian Terkait Penelitian Sebelumnya.	49
2.4 Kerangka Pemikiran	51

BAB III	METODE PENELITIAN	54
3.1	Desain Penelitian	54
3.2	Operasionalisasi Konsep Penelitian.....	55
3.3	Sumber Data Penelitian	56
3.4	Teknik Pengumpulan Data	57
3.5	Instrumen Penelitian yang Digunakan.....	59
3.6	Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan.....	60
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian	62
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	70
4.1	Gambaran Umum IPDN	70
4.2	Hasil Penelitian	70
4.2.1	Gambaran Kurikulum Pendidikan Kader Aparatur di IPDN	70
4.3	Pembahasan	80
4.3.1	Gambaran Kurikulum IPDN ditinjau dari Teori Miller dan Seller.....	80
4.3.1.1	Klarifikasi Orientasi Kurikulum	80
4.3.1.2	Pengembangan Tujuan.....	93
4.3.1.3	Identifikasi Model/Strategi Mengajar	95
4.3.1.4	Implementasi Kurikulum	97
4.3.2	Transformasi Kurikulum Pendidikan Kader Aparatur Era Revolusi Industri 4.0 di IPDN.....	105
4.3.2.1	Alur Pembelajaran	107
4.3.2.2	Penilaian	111
4.3.2.3	Guru/Dosen.....	113
4.3.2.4	Standar Lulusan	118
4.3.2.5	Orientasi Tujuan Kelembagaan.....	161
4.3.3	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurikulum Pendidikan Kader Aparatur dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di IPDN.....	162
4.3.3.1	Faktor Internal	162
4.3.3.2	Faktor Eksternal	165
BAB V	PENUTUP	174
5.1	Kesimpulan.....	174
5.2	Rekomendasi.....	175
5.2.1	Rekomendasi Terkait Subtansi	175
5.2.2	Rekomendasi Penelitian Lanjutan.....	176
5.2.3	Rekomendasi Terkait Pengabdian Masyarakat Bagi Civitas Akademika IPDN	176
	DAFTAR PUSTAKA	178
	LAMPIRAN	188

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Dosen IPDN Per Desember 2018.....	6
Tabel 2.1 Tantangan Industri 4.0 (Heckeu et al, 2016).....	40
Tabel 3.1 Operasionalisasi Konsep Transformasi Kurikulum Pendidikan Kader Aparatur Era RI 4.0 Program D4 IPDN.....	55
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	62
Tabel 4.1 Perkembangan Sekolah Kepamomgprajaan di Indonesia	63
Tabel 4.2 Akreditasi Program Studi di IPDN.....	69
Tabel 4.3 Daftar Mata Kuliah dan Jumlah SKS pada Fakultas Politik Pemerintahan dan Manajemen Pemerintahan Program D4 IPDN	72
Tabel 4.4 Persentase Mata Kuliah dan Jumlah SKS.....	79
Tabel 4.5 Data Jenis Sertifikasi Dosen IPDN Tahun 2019.....	86
Tabel 4.6 Data Dosen IPDN Tahun 2019.....	87
Tabel 4.7 Pengembangan Tujuan Kurikulum IPDN.....	94
Tabel 4.8 Model/Strategi Mengajar di IPDN.....	96
Tabel 4.9 Tingkat Kesesuan Materi Ajar Dengan Materi dalam SAP dan GBPP (RPS/RPP).....	98
Tabel 4.10 Kesesuaian Soal Ujian dengan RPS/GBPP/SAP.....	100
Tabel 4.11 Tingkat Kepuasan Stakeholders Terhadap Lulusan.....	103
Tabel 4.12 Kategori Skala Pengukuran Tingkat Kepuasan Stakeholder Terhadap Etos Kerja Alumni	105
Tabel 4.13 Jenis Sertifikasi Dosen IPDN Tahun 2019.....	115

Tabel 4.14	Data Dosen IPDN Tahun 2019.....	117
Tabel 4.15	Transformasi Kurikulum IPDN.....	120
Tabel 4.16	Persentase Kelompok Matakuliah.....	156
Tabel 4.17	Hasil Monitoring Sertifikasi Dosen Tahun 2019.....	164
Tabel 4.18	Transformasi Kurikulum Melalui Pengembangan Fakultas dan Prodi di IPDN Program D4 Tahun 2019....	165
Tabel 4.19	Temuan Hasil Penelitian	170

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pengguna Teknologi Digital di Seluruh Dunia.....	1
Gambar 1.2 Pengguna Teknologi Digital di Indonesia.....	2
Gambar 1.3 Rata-rata Waktu Pengguna Sosial Media.....	2
Gambar 1.4 Rata-Rata Sosial Media yang Ada di Indonesia.....	3
Gambar 2.1 Proses Tahapan Penyusunan Kurikulum.....	47
Gambar 2.2 Transformasi Pendidikan 4.0.....	52
Gambar 2.3 Kerangka Pikir Transformasi Pendidikan Kader Aparatur Era RI 40 diIPDN.....	53
Gambar 4.1 Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran IPDN.....	68
Gambar 4.2 Persentase Keberhasilan Alumni	104

BAB I

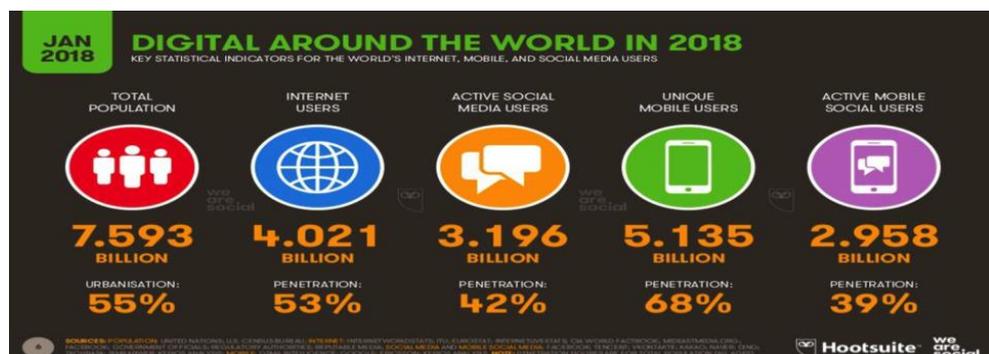
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Munculnya revolusi industri 4.0 menjadikan perubahan semakin cepat di berbagai aspek kehidupan. Perubahan yang mendorong semua pihak untuk mengikuti perubahan agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya atautkah diam tidak berubah dan berdampak terlindas oleh perubahan jaman yang ada. Revolusi industri 4.0 suatu hal yang mengubah suatu keniscayaan terhadap ruang dan waktu bukan lagi menjadi sebuah permasalahan. Dunia serasa berada di dalam genggaman tangan dan kondisi tersebut membawa perubahan kehidupan pada semua pihak sehingga mereka akan melakukan satu transisi kehidupan melalui teknologi yang ada.

Transisi kehidupan di era revolusi teknologi secara fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain. Revolusi industri 4.0 mendorong terjadinya perubahan teknologi secara disruptif yang secara tidak langsung juga akan berdampak kepada perubahan sosial masyarakat. Hal tersebut tampak pada gambar di bawah ini yang menggambarkan perubahan secara disruptif pada kehidupan masyarakat dunia dalam pemanfaatan teknologi mobile dalam kehidupan mereka.

Gambar 1.1
Pengguna Teknologi Digital di Seluruh Dunia



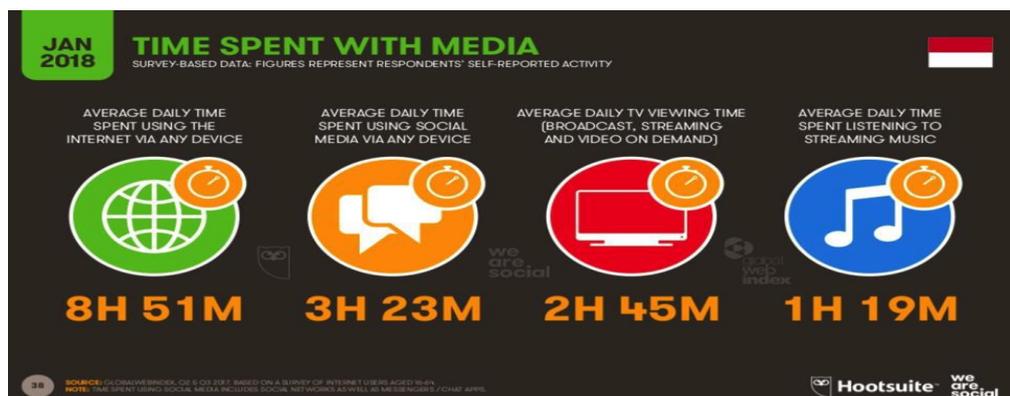
Demikian pula dengan pengguna di wilayah Indonesia juga cukup tinggi dan hal tersebut dapat dilihat dari tabel gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Pengguna Teknologi Digital di Indonesia



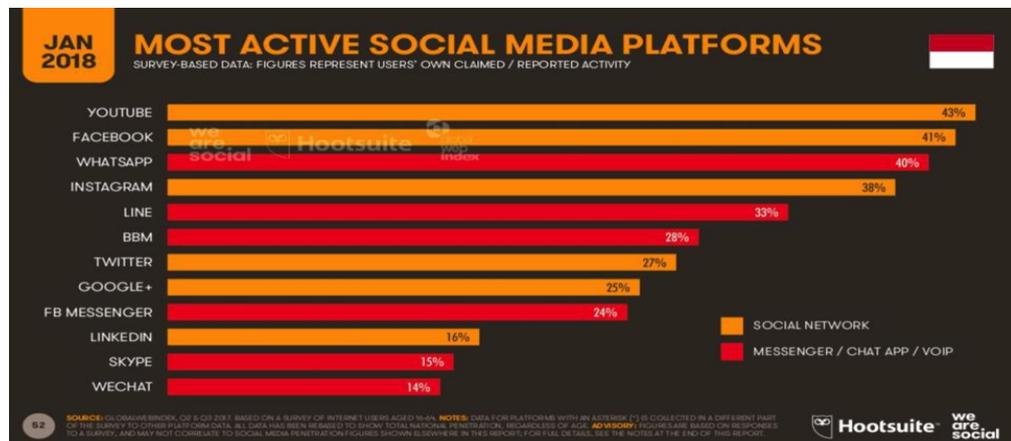
Sementara alokasi waktu yang digunakan oleh para pengguna media juga cukup banyak dan hal tersebut tampak pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3
Rata-Rata Waktu Pengguna Media



Berbagai ragam sosial media digunakan dan rata – rata pengguna sosial media yang ada di Indonesia dapat dilihat dari sebaran tabel berikut ini:

Gambar 1.4
Rata-rata Ragam Sosial Media yang Ada di Indonesia



Melihat berbagai gambar dan tabel di atas, tampak bahwa manusia saat ini sudah tidak terkendala dengan jarak, ruang dan waktu. Kehidupan berada pada gengaman dan kecepatan menjadi satu tolok ukur keberhasilan. Baik kecepatan dalam penyampaian informasi maupun kecepatan dalam pengantaran dan pendistribusian barang dan manusia. Terkait dengan hal tersebut, era revolusi industri 4.0 menjadi satu era digitalisasi dimana akan berdampak pada berbagai kehidupan dan perubahan sosial. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh **Klaus Schwab**, *Executive Chairman World Economic Forum*, yang memberikan hipotesa bahwa saat ini miliaran orang telah terhubung dengan perangkat *mobile*, penemuan kecepatan pemrosesan *byte demi byte* data internet, yang telah meningkatkan kapasitas pengetahuan manusia melebihi sistem konvensional.

Revolusi industri, 4.0 tidak dapat dihindari dan harus dihadapi, karena dampak dari revolusi industri 4.0 akan mengubah era/jaman menjadi satu jaman baru dan cara hidup yang baru. Era yang ditandai dengan berbagai karakteristik seperti: a). *Cyber Physical System* b). *The Internet of things* (Ashton,1999) c). *Cloud computing*; d).*Cognitive computing* (Nugroho, 2018). Sementara Schwab menyebutkan ciri ciri era 4.0 berupa: 1). *Autonomous robots*; 2).*simulation*; 3).

System integration; 4). Internet of things; 5). Cybersecurity; 6). Cloud computing; 7). Additive manufacturing; 8). Augment reality dan 9). Big data (schwab, 2016).

Revolusi Industri 4.0 akan menimbulkan dampak yang tidak dapat dihindari salah satu dampak tersebut terkait dengan pasar tenaga kerja. Menurut *World Economic Forum (WEF) 2016*, memperkirakan antara 2015 – 2020, jutaan pekerjaan akan berkurang dan digantikan mesin, *robot*, *artificial intelligence* dan perangkat komputer lainnya. Sehingga, administrasi perkantoran menutup lapangan kerja 4,8 juta manusia. Manufaktur dan produksi mengurangi tenaga kerja manusia sebesar 1,6 juta. Konstruksi dan ekstraksi membuang setengah juta manusia. Desain, seni, hiburan dan media memangkas 150 ribu orang, serta instalasi dan pemeliharaan menyusut hingga 40 ribu.

Dampak Revolusi industri 4.0 seperti tersebut di atas, juga memberikan peluang besar bagi organisasi pemerintahan untuk mengefektifkan peran dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Perkembangan IT yang cepat memberi peluang dalam percepatan penerapan *e-governance* khususnya digitalisasi data dan informasi. Organisasi pemerintahan mau tidak mau harus menjalankan *e-budgeting*, *e-project planning*, *system delivery*, penatausahaan, *e-controlling*, *e-reporting* hingga *e-monev* serta aplikasi *custom* lainnya

Berdasarkan dampak dan peluang yang ada, revolusi industri 4.0 juga mendorong terjadinya dinamika pemerintahan dan akan mengubah pola penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut senada dengan Suwaryo (2019) yang mengatakan bahwa revolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan ini bisa dalam berbagai bentuk, dalam hal ini bisa berupa: a). Perubahan lembaga/institusi dan perilaku; b). Perubahan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, seperti :pelayanan, pola pembangunan, pola pemberdayaan dan regulasi; c). Sementara dalam dunia pendidikan, revolusi industri akan memaksa lembaga pendidikan untuk merubah kurikulumnya. Pada konteks ini Suwaryo mengemukakan bahwa revolusi industri juga akan mendorong perubahan lembaga pendidikan tinggi pemerintahan untuk juga menyesuaikan perubahan pendidikannya melalui perubahan kurikulum ilmu pemerintahan dengan menyesuaikan tuntutan dan fakta empiris.

Berbagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang dipedomani, dengan harapan praja akan memiliki kemampuan lebih. Daya nalar yang tinggi, dasar kesetiaan/loyalitas yang kuat serta ditunjang dengan kesehatan yang prima baik jasmani maupun rohani melalui pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh IPDN dalam bentuk pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

Upaya menghadapi era revolusi industri 4.0 sudah seharusnya dijadikan sebagai bahan dalam konsep pengembangan kurikulum IPDN yang dinamis. Pengembangan kurikulum yang mampu mengakomodir apa yang diperlukan peserta didik setelah mereka terjun di lapangan. Mengingat, revolusi industri 4.0 akan berdampak cukup hebat terhadap layanan di bidang pemerintahan. Hal-hal yang sebelumnya tidak terbayangkan akan menjadi suatu keniscayaan di era revolusi industri 4.0.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan lembaga pendidikan tinggi pencetak calon kader aparatur pemerintahan (pamongprajaan) di bawah Kementerian Dalam Negeri. Statuta IPDN mensyaratkan bahwa IPDN harus mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang mendasar dan menyeluruh atas pengalaman panjang penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Di samping hal tersebut di atas, IPDN memiliki tugas melahirkan falsafah pendidikan pemerintahan yang memberikan gambaran jelas tentang karakter pemimpin yang memiliki sikap, mental, dan perilaku sebagai seorang pamong yang bertakwa, adil dan bijak. Hal tersebut merupakan dasar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang dalam perkembangan selanjutnya pemimpin pemerintahan diposisikan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

Dengan statuta yang ada diharapkan terlahir kader-kader pamong yang mumpuni dan terampil dalam mengelola pemerintahan serta mampu menjawab tantangan dan perubahan jaman. Untuk mewujudkan hal tersebut, IPDN sebagai penyelenggara pendidikan calon pamong harus responsif, dan visioner dan mampu menyesuaikan segala perubahan dan kondisi jaman melalui pengembangan konsep kurikulum pendidikan. Dengan demikian IPDN memiliki peran dan fungsi menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh peserta didik ke

depannya nanti. Termasuk dalam hal ini upaya untuk dapat menghadapi era revolusi 4.0 yang sudah berlangsung.

Fakta di lapangan juga menunjukkan belum maksimalnya langkah langkah pengembangan tenaga pendidik melalui berbagai kegiatan penyegaran dalam bentuk pendidikan pelatihan, bimbingan teknis, studi banding, dan kegiatan seminar baik nasional maupun Internasional dengan dukungan penuh dari lembaga. Termasuk juga upaya pengembangan dosen melalui budaya meneliti dan menulis karya ilmiah melalui jurnal yang terstandar.

Permasalahan ini berdampak pada keterlambatan para tenaga pendidik untuk mengurus kenaikan jabatan maupun pangkat yang secara tidak langsung berdampak pada kaderisasi dan penumpukan dosen pada jabatan fungsional tertentu serta keterlambatan dalam pengkaderan Guru Besar di lingkungan IPDN. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel data dosen pada situasi saat ini.

Tabel 1.1

Data Dosen IPDN Per Desember 2018

No	Jumlah Dosen Dalam Jabatan			
	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli
1.	13	52	156	55

Sumber : Kepegawaian IPDN 2018

Di samping permasalahan tersebut di atas, dalam implementasi kurikulum yang ada terdapat beberapa kendala permasalahan terkait dengan pengadministrasian baik data Mahasiswa, tenaga pendidik, serta permasalahan permasalahan perijinan terkait keberadaan program studi yang dimiliki IPDN melalui kementerian Riset Dikti. Terkait dengan hal tersebut sudah seharusnya IPDN merespon era 4.0 secara langsung dalam implementasi kurikulum pendidikan pemerintahan di IPDN. Fakta di lapangan terkait dengan infrastruktur berupa jaringan sebagai salah satu prasyarat kegiatan di IPDN

belum berjalan secara maksimal. Masih dioperasikannya pekerjaan-pekerjaan di lingkungan IPDN secara manual (e.g. sistem penilaian, data mahasiswa dan dosen), server yang tersedia di lingkungan IPDN agak lambat tingkat kecepatannya, ruang kelas belum di dukung kekuatan wi fi yang memadai yang dapat menunjang sistem pembelajaran serta masih perlu ditingkatkannya kompetensi SDM terkait layanan akademik.

Keberadaan sarana dan prasarana ini merupakan aspek yang harus dipenuhi. Mengingat era revolusi industri 4.0 juga mensyaratkan sistem fisik yang menyatukan dunia fisik, digital dan biologis secara online kemudian tersambungannya seluruh artefak online dan offline ke jaringan lokal dan global secara kontinyu melalui internet. Termasuk pemanfaatan komputasi dalam suatu jaringan internet untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Dalam hal ini internet sebagai pusat server untuk mengolah data dan aplikasi pengguna serta sistem dengan fitur learning dan adaptasi kontinyu seperti otak manusia sebagai sistem yang teritegrasi sebagai satu kesatuan.

Permasalahan tersebut di atas, terbukti berdampak pada penerapan era revolusi Industri 4.0 dengan sistem berbasis internet yang dikembangkan oleh Kemenristek Dikti terkait pangkalan data. Kebijakan ini membuat posisi IPDN cukup terancam terkait keberadaannya. Hal tersebut mau tidak mau harus di hadapi dan tidak bisa dihindari. Apabila kebijakan PDPT Kemenristek Dikti tidak diterapkan dan diikuti, maka dapat dikatakan IPDN merupakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang ilegal. Hal tersebut dikarenakan IPDN tidak mampu untuk melakukan pengadministrasian data terkait akademi di PDPT Dikti.

Sementara era revolusi industri 4.0 mensyaratkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi dengan kemampuan kreatifitas, inovasi serta memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu membangun jiwa kolaborasi dalam menjalankan tugas. Era 4.0 sudah mulai berlangsung, kesiapan IPDN dalam menghadapi era 4.0 dirasa greget dan semangatnya masih kurang dan cenderung tidak dianggap sebagai sebuah tantangan.

Sementara pergerakan dan perubahan jaman semakin cepat dan era 5.0 sudah mulai menghadang di depan kita. Hal tersebut akan menimbulkan banyak kesenjangan-kesenjangan yang membuat IPDN jauh tertinggal apabila IPDN tidak menyikapinya dengan bijak. Terkait dengan hal tersebut, kelompok kami tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TRANSFORMASI PENDIDIKAN KADER APARATUR ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya ketiga sistem kurikulum (pengajaran, pelatihan dan pengasuhan) yang berlaku di IPDN secara maksimal;
2. Belum maksimalnya peran dan fungsi TPS/TPK sebagai basis pengembangan rumpun keilmuan dan juga pengembangan kapasitas tenaga pendidik sebagai pengampu mata kuliah;
3. Pengembangan tenaga pendidik sebagai ujung tombak implementasi kurikulum belum dilakukan secara maksimal;
4. Sarana dan prasarana penunjang implementasi kurikulum masih terbatas, dan belum memenuhi kebutuhan mahasiswa dan tenaga pendidik;
5. Masih terdapatnya SDM (tenaga pendidik maupun tenaga administrasi kependidikan) belum menguasai teknologi secara maksimal;
6. Globalisasi dan perkembangan jaman yang cepat melalui era Revolusi Industri 4.0 tidak dapat dihindari dan harus di hadapi menuntut IPDN untuk dapat sesegera mungkin mengikuti dengan kebijakan pendidikan tinggi yang ada;

Berdasarkan identifikasi masalah maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kurikulum pendidikan kader aparatur program Diploma IV di IPDN ?
2. Bagaimana transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 di IPDN ?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 di IPDN ?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah maka ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Sumber Daya Manusia
3. Sistem kurikulum.
4. Sarana prasarana.

Mengingat terbatasnya waktu dan luasnya permasalahan yang ada maka penelitian ini dibatasi pada transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur Era RI 4.0 program D4 di IPDN.

1.4 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan gambaran kurikulum pendidikan kader aparatur di IPDN.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 di IPDN.
3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 di IPDN.

1.4.2 Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi riil transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era Revolusi Industri 4.0 di IPDN. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi kepada IPDN dalam pengembangan kurikulum pendidikan kader aparatur di IPDN ke depannya.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap teori transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur program D4 era revolusi industri 4.0. di IPDN.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat :

1. Memberikan masukan kepada lembaga IPDN dalam pengembangan kurikulum pendidikan kader aparatur yang adaptif terhadap tantangan dan perubahan zaman khususnya di era revolusi industri 4.0.
2. Dasar pengambilan kebijakan bagi pengambil kebijakan di lingkungan IPDN untuk menjalani era RI 4.0.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritik Terkait

2.1.1 Transformasi Pendidikan 4.0

2.1.1.1 Transformasi

Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.

Menurut Kariuki dan tim (2017: xi) proses transformasi itu sendiri dimaknai sebagai **Transformation process**: Principles concerned with the transformation of inputs into outputs and outcomes. The framework governing transformation comprises a range of institutions such as formal rules, standard operating procedures, legal covenants as well as norms, customs and unwritten codes of conduct. Prinsip-prinsip atau kaidah yang terkait dengan transformasi input menjadi *output* (hasil). Kerangka kerja yang mengatur proses transformasi terdiri dari berbagai komponen seperti aturan formal, SOP (*Standar Operating Procedure*), aturan hukum, norma, serta ketentuan-ketentuan tidak tertulis lainnya

Transformasi akan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan pada era industry 4.0, karena transformasi akan menjadi jembatan untuk mengatasi berbagai perubahan yang sangat disruptive di era revolusi industry 4.0. Pelayanan umum menjadi salah satu hal yang hendaknya sangat dipikirkan dan secepatnya segera menyesuaikan dengan kondisi dan perubahan yang ada. Hal tersebut tidak dapat dihindari atau ditunda karena keadaan dan kondisi akan memaksa pelayanan publik untuk bersegera melakukan proses transformasi.

Terkait hal tersebut di atas, tiap organisasi yang akan melakukan proses transformasi seharusnya memiliki kerangka kerja yang akan menjadi batu pijakan serta penunjuk arah dalam proses transformasi. Senada dengan apa yang di

kemukakan oleh Kariuki dan tim (2017), bahwa *Public Service Transformation Framework - A conceptual framework developed to set the direction for a public service transformation agenda*. Dengan kata lain kerangka kerja transformasi pelayanan publik hendaknya dirancang untuk mendukung agenda yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi guna mempercepat proses transformasinya. Hal tersebut akan mempercepat proses transformasi suatu organisasi sehingga menjadikan lebih kompetitif dan mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien di era globalisasi saat ini.

Berdasarkan kerangka kerja yang ada, menurut Laseau pada Sembiring (2006) mengkategorikan transformasi berdasarkan karakteristiknya sebagai berikut:

1. Transformasi bersifat Tipologikal (geometri) bentuk geometri yang berubah dengan komponen pembentuk dan fungsi ruang yang sama.
2. Transformasi bersifat gramatikal hiasan (ornamental) dilakukan dengan menggeser, memutar, mencerminkan, menjungkirbalikkan, melipat dll.
3. Transformasi bersifat refersal (kebalikan) pembalikan citra pada figur objek yang akan ditransformasi dimana citra objek dirubah menjadi citra sebaliknya.
4. Transformasi bersifat distortion (merancukan) kebebasan perancang dalam beraktifitas.

Sementara Habraken yang dikutip oleh Pakilaran, (2006) menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi sebagai berikut: 1). Kebutuhan identitas diri (*identification*) yang pada dasarnya orang ingin dikenal dan ingin memperkenalkan diri terhadap lingkungan; 2). Perubahan gaya hidup (*Life Style*) yaitu satu perubahan struktur dalam masyarakat melalui pengaruh kontak dengan budaya lain sehingga memunculkan penemuan-penemuan baru mengenai manusia dan lingkungannya; 3). Pengaruh teknologi baru (mengikuti mode) yang menimbulkan perubahan. Dimana bagian yang seharusnya masih dapat digunakan secara teknis dipaksa diganti untuk dapat mengikuti perubahan dan kondisi jaman yang ada.

Dinamika perkembangan organisasi agar tetap *survive* di era revolusi industri 4.0, merupakan keniscayaan bagi pemerintah untuk terus bertransformasi diri ke bentuk yang ideal dalam menghadapi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada, sebagai alternatif mewujudkan organisasi berorientasi pelayanan publik. Harapan dari transformasi lembaga publik:

1. Pelayanan Publik meningkat & lebih berkualitas;
2. Belanja Publik lebih efisien dan efektif;
3. Ukuran lembaga sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas “right size”
4. Lembaga Publik memiliki fungsi-fungsi yang tepat “right function”;
5. Lembaga publik menjalankan tugas pokok dan fungsi secara tepat “right behaviour”

Pengembangan transformasi inovasi, manajemen inovasi, pengelolaan risiko, integrasi organisasi terus diarahkan untuk membangun kolaborasi dan sinergitas dibutuhkan kepemimpinan yang visioner. Memastikan setiap inovasi yang dikembangkan dapat memberikan nilai tambah kualitas pelayanan, menyelaraskan visi dan lingkungan internal yang diimbangi dengan kemampuan merespons perubahan lingkungan eksternal yang bergerak cepat.

Peran strategis transformasi organisasi dalam peningkatan daya saing bangsa, tidak hanya sekedar pendekatan institusional (kelembagaan), *downsizing* dan prosedural semata, namun lebih fundamental pada pola kerja, budaya organisasi dan nilai-nilai strategis yang dikembangkan. Membangun sistem dan mekanisme yang *accessible* sehingga memungkinkan adanya “*checks and balances*”. Hal ini menunjukkan urgensi transformasi organisasi pemerintah untuk menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi akibat perkembangan era Revolusi Industri 4.0.

2.1.1.2 Transformasi Pendidikan

Perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk dapat mengantisipasi semakin pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi dalam era revolusi industri 4.0.

Organisasi yang efektif dan efisien dalam menghadapi keadaan lingkungan organisasi yang selalu berubah, tantangan permasalahan yang semakin kompleks dan *Political Will* untuk membenahi organisasi melakukan transformasi organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Peter Drucker dengan “ *The Age Of Discontinuity* “ yaitu masa yang memaksa kita bergerak setelah menggerakkan perubahan dasar dan memaksa kita untuk terikat dalam hal yang disebut “ *Upside-down thinking*“.

Secara historis, kemakmuran suatu negara dibangun dengan mengeksploitasi sumber daya alam atau *natural resources* yang dimilikinya. Namun kemajuan teknologi dan peningkatan *global development* telah memotong kondisi tersebut. Lancourt, J., & Savage, C. 1995 dalam proses transformasi organisasi terdapat atau muncul empat tema umum yang mengkarakteristikkan proses dan bentuk transformasi itu sendiri yaitu :

1. Meredefinisikan fungsi, tugas serta peran yang harus diemban oleh pemerintah selaku pemberi pelayanan kepada masyarakat.
2. Fokus kepada masyarakat, sebagai tujuan pelayanan.
3. Bekerja sebagai sebuah tim yang solid dan bersama-sama mendukung struktur non- hierarkhis.
4. Kepemimpinan dan sharing nilai.

Proses transformasi pendidikan adalah sebuah siklus, proses yang terus berjalan dan teknologi dapat mempercepat proses ini serta memastikan bahwa perubahan yang dibuat relevan dan efektif dalam meningkatkan mutu hasil capaian siswa . Satria Pinandita, 2018. menjelaskan bahwa rancangan kurikulum dan metode pendidikan harus dapat menyesuaikan dengan iklim bisnis yang terus berkembang, jasa pendidikan dan bisnis industri juga sangat cepat perkembangannya, dan semakin kompetitif yang harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Selain itu pendidikan harus mampu memberikan kearifan bangsa agar pendidikan kita melahirkan generasi baru yang mampu meredefinisikan watak bangsa secara terus menerus. Para siswa harus dipersiapkan untuk menghadapi tiga tugas kehidupan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk dapat hidup (*to make a living*);
2. Untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna (*to lead a meaningful life*);
3. Untuk turut memuliakan kehidupan (*to ennoble life*)

Selanjutnya Intan Ahmad 2018 menjelaskan ada lima elemen penting yang harus menjadi perhatian dan akan dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0 yaitu :

1. Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data *Information Technology* (IT), *Operational Technology* (OT), *Internet of Things* (IoT), dan *Big Data Analytic*, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data *literacy, technological literacy and human literacy*.
2. Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsive terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Selain itu, mulai diupayakannya program *Cyber University*, seperti sistem perkuliahan *distance learning*, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. *Cyber University* ini nantinya diharapkan menjadisolusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas.
3. Persiapan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti serta perekayasa yang responsive, adaptif dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selain itu, peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi.
4. Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung Revolusi Industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, LPNK, Industri, dan Masyarakat.
5. Terobosan inovasi dan penguatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi

Trilling & Fadel, 2009 menyebutkan muatan pembelajaran diharapkan mampu memenuhi keterampilan :

1. pembelajaran dan keterampilan inovasi meliputi penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang beraneka ragam, pembelajaran dan inovasi, berpikir kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan kreatifitas dan inovasi,
2. keterampilan literasi digital meliputi literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT,
3. karir dan kecakapan hidup meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, produktifitas dan akuntabilitas, dan kepemimpinan dan tanggung jawab.

Pilihan strategis pemanfaatan teknologi informasi memiliki potensi dalam proses transformasi pendidikan untuk membangun mental *self-driving*, *self-power*, kreativitas dan inovasi melalui teamwork dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi bukan kompetisi dan kesepahaman dalam pola pikir dan cara bertindak.

Aoun, 2017, prediksi keterampilan literasi yang dibutuhkan di masa depan atau di era industri 4.0 yaitu 1) literasi digital, 2) literasi teknologi, dan 3) literasi manusia. Literasi digital diarahkan pada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital (Big Data), literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi (*Coding, Artificial Intelligence, & Engineering Principles*) , dan literasi manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain (*higher order mental skills*, berpikir kritis & sistemik) .

Adaptasi gerakan literasi baru dapat diintegrasikan dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran serta diharapkan menciptakan lulusan yang kompetitif . Selanjutnya menurut Trilling & Fadel, 2009, Cara kerja pengetahuan, kemampuan berkolaborasi dalam tim dengan lokasi yang berbeda dan dengan alat yang berbeda. Penguatan alat berpikir melalui kemampuan menggunakan teknologi, alat digital, dan layanan serta gaya hidup digital

merupakan kemampuan untuk menggunakan dan menyesuaikan dengan era digital.

Intan Ahmad, 2018 menjelaskan pada era revolusi industri 4.0, tidak hanya cukup literasi sebagai modal dasar untuk berkiprah di masyarakat. Perguruan Tinggi perlu mencari metoda untuk mengembangkan kapasitas kognitif mahasiswa melalui keterampilan lainnya, seperti : Kepemimpinan (*leadership*), bekerja dalam tim (*team work*) kelincahan dan kematangan budaya (*Cultural Agility*) dimana mahasiswa dengan berbagai latar belakang mampu bekerja dalam lingkungan yang berbeda (dalam/luar negeri). *Entrepreneurship* (termasuk *social entrepreneurship*) harus merupakan kapasitas dasar yang dimiliki oleh semua mahasiswa.

Selanjutnya Northeastern, 2014 melalui *General Education*, Ekstra-kurikuler, Studi tematik berbagai disiplin proses belajar mengajar dihubungkan dengan dunia nyata seperti magang/kerja, praktek/co-op program (*al. higher order skills, leadership, team work*) merupakan *project based-learning*.

2.1.1.3 Transformasi Pendidikan 4.0

Indonesia di era Revolusi Industri 4.0 berupaya membangun sistem pendidikannya, baik dari kurikulum, sumber daya manusia, maupun manajemen pendidikannya, sebagai kerangka peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi dengan melakukan reorientasi kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan era 4.0 adalah program untuk mendukung terwujudnya pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki setidaknya 4 keterampilan yaitu kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif, mengacu pada standar kompetensi global dalam mempersiapkan generasi muda memasuki realitas kerja global dan kehidupan abad 21. <http://lldikti5.ristekdikti.go.id> 2019.

Tujuan pendidikan tinggi adalah untuk mentransformasi masyarakat menjadi sumber daya manusia yang inovatif dan adaptif. Proses transformasi dimaksud melalui “reorientasi kurikulum”. Taylor dan Richard (Wagiran, 2013) menyatakan bahwa kurikulum adalah isi pendidikan, pengalaman pendidikan, daftar mata pelajaran (mata kuliah) yang harus dipelajari, bidang studi, dan aktivitas belajar yang direncanakan. Sumber (<https://seminar.unand.ac.id/index.php/snppt/snppt2016/paper/viewFile/4/2>). Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum merupakan faktor utama (*main factor*) yang menentukan keberhasilan sistem pendidikan dan pembelajaran dalam teknologi informasi, ‘internet of things’, ‘big data’ dan komputerisasi, serta ‘entrepreneurship’ dan ‘internship’ harus menjadi kurikulum wajib.

Menyikapi dinamika perubahan mutu sistem pendidikan di Indonesia untuk dapat sejajar dengan sistem pendidikan di negara maju dihadapkan pada sejumlah tantangan dan peluang harus dapat dihadapi oleh siswa dan guru agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi. Yana (2013). Prinsip pembelajaran yang sesuai dan harus dipenuhi dalam proses pendidikan mengacu Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) memuat 16 prinsip pembelajaran. Sedangkan Permendikbud No. 65 tahun 2013 mengemukakan 14 prinsip pembelajaran, terkait dengan implementasi Kurikulum 2013. Sementara itu, Jennifer Nichols (2013) menyederhanakannya ke dalam 4 prinsip pokok yang dijelaskan dan dikembangkan seperti berikut ini:

1. *Instruction should be student-centered*

Pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa.

2. *Education should be collaborative*

Siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya.

3. *Learning should have context*

Materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata (real word).

4. Schools should be integrated with society

Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya.

AOUN, MIT, 2017. Dibutuhkan literasi baru berupa: 1) Literasi Data yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (Big Data) di dunia digital. 2) Literasi Teknologi yaitu memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principles*). 3) Literasi Manusia yaitu *Humanities*, komunikasi dan Desain. Sejalan dengan itu Menristek dikti (2018) dalam Rakernas dengan tema “Ristek Dikti di Era Revolusi Industri 4.0” “Kebijakan strategis perlu dirumuskan dalam berbagai aspek mulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan cyber university, risbang hingga inovasi. Selanjutnya ditambahkan oleh Ditjen Belmawa (2018) Kurikulum Program Studi harus mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kurikulum juga perlu dievaluasi agar relevansi dan kualitas akademik dapat dijaga dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. **Hendrawan Soetanto , 2019** “Perlu ada reorientasi kurikulum di perguruan tinggi. Agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum perlu orientasi baru, sebab adanya era RI 4.0, tidak hanya cukup literasi lama (membaca, menulis dan matematika) sebagai modal dasar untuk berkiprah di masyarakat.

\

2.1.2 Kurikulum

2.1.2.1 Konsep Kurikulum

Kurikulum memiliki banyak makna, dari yang paling sederhana sampai konsep yang kompleks dan luas. Dari mulai kumpulan mata pelajaran sampai dengan semua aktifitas yang dilakukan oleh siswa dengan panduan guru dan sekolah yang dilakukan baik di dalam maupun di luar sekolah. Hal tersebut seperti apa yang dikemukakan oleh Oliva (1992, 5-6) dimana kurikulum dimaknai dari mulai:

Curriculum is that which is taught in school, curriculum is a set of subject, curriculum is content, curriculum is a program of studies, curriculum is a set of materials, curriculum is a sequence of courses, curriculum is a set of performance objectives, curriculum is a course of study, curriculum is everything that goes on within the school, including extra-class activities, guidance, and interpersonal relationship, curriculum is that which is taught both inside and outside of school directed by the school, curriculum is everything that is planned by school personnel, curriculum is a series of experiences undergone by learners in school, curriculum is that which an individual learners experiences as a result of schooling”.

Menurut Oliva kurikulum dimaknai sebagai segala hal yang diajarkan di sekolah. Kurikulum merupakan sekumpulan mata pelajaran. Kurikulum merupakan program pembelajaran, kurikulum merupakan sekumpulan materi, kurikulum adalah langkah-langkah pembelajaran, kurikulum merupakan kumpulan *performance objective*, kurikulum merupakan kursus pembelajaran, kurikulum merupakan segala sesuatu yang berlangsung di dalam sekolah termasuk kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas, panduan dan juga hubungan antar pribadi. Kurikulum merupakan segala sesuatu yang diajarkan di dalam dan di luar kelas di bawah bimbingan sekolah, kurikulum merupakan sesuatu yang direncanakan oleh pihak sekolah, kurikulum merupakan sekumpulan pengalaman yang diberikan kepada siswa di sekolah dan kurikulum adalah suatu pengalaman pada tiap individu pembelajar di sekolah sebagai dampak dari kegiatan sekolah itu sendiri.

Menurut Ornstein dan Hunskin, (1995:9) kurikulum di definisikan sebagai, *a plan for action or a written document that includes strategies for achieving desired goals or ends*. Sementara J Galen Saylor mendefinisikan kurikulum sebagai, “ *a plan for providing sets of learning opportunities for persons to be educated*”. David Pratt, mendefinisikan kurikulum sebagai, “ *Organized set of formal education and / or training intentions*. Jon Wiles dan Joseph Bondi menafsirkan kurikulum sebagai, “*a plan for learning (whereby) objectives determine what learning is important*”.

Dari berbagai pemaknaan di atas, kurikulum memiliki pemaknaan dari cakupan sempit sampai cakupan yang luas. Berbagai pemaknaan di atas menjadi payung pijakan dalam memaknai berbagai maksud dari kurikulum itu sendiri. Berbagai interpretasi di atas, kurikulum dapat dimaknai dari definisi yang sifatnya sangat sederhana yaitu sebagai mata pelajaran, isi, program belajar, sekumpulan materi, langkah-langkah pembelajaran, kegiatan belajar. Sampai pada definisi yang sifatnya lebih lengkap, yaitu segala sesuatu yang berlangsung di sekolah termasuk di dalamnya aktifitas ekstrakurikuler, pemberian panduan dan hubungan antar pihak yang terkait di dalamnya. Di sisi lain, kurikulum dimaknai sebagai proses belajar yang diperoleh anak baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan sekolah dan masih terdapat keterkaitan dengan sekolah. Kemudian kurikulum juga dimaknai sebagai sebuah perencanaan yang direncanakan oleh personel-personel di sekolah, kurikulum sebagai sekumpulan pengalaman yang didapat murid-murid di bawah bimbingan sekolah hingga pengalaman yang didapat siswa sebagai dampak dari kegiatan sekolah.

Di samping berbagai definisi dan interpretasi tentang kurikulum itu sendiri, sudah sebuah keharusan apabila guru sebagai salah satu pelaku dan pengembang kurikulum harus juga mengetahui apa saja yang menjadi komponen dasar dalam kurikulum. Dimana pada intinya kurikulum memiliki empat komponen dasar pembangunnya, seperti yang dikemukakan oleh Sukmadinata, (2008:102) yaitu tujuan, isi/materi, proses/sistem penyampaian dan media, evaluasi. Dalam kurikulum, terdapat komponen-komponen pembangunnya, seperti yang

dikemukakan oleh, Nasution, Saodih, Hamalik, Sanjaya), yang dapat kami simpulkan seperti berikut ini:

Tujuan merupakan sasaran / target yang akan di capai dalam semua kegiatan belajar mengajar. Dimana Saodih (2008, 103) menyatakan bahwa tujuan dirumuskan berdasarkan atas dua hal, yaitu (1). Perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. (2). Pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah Negara. Dan alasan yang lain berkenaan dengan dirumuskannya tujuan dalam kurikulum juga dikemukakan oleh Sanjaya (2008, 101) yaitu: a). Tujuan berkaitan dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. b). Melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. c). Tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai control dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Dengan tujuan, semua pengembang dan pemakai kurikulum akan tahu arah, serta upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut menjadi sebuah kenyataan dan bukan sebagai mimpi belaka.

Isi (materi) merupakan muatan kurikulum yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum (Sanjaya, 2008:144). Isi dapat berupa bahan ajar, yang dapat dimaknai sebagai seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar juga dapat dimaknai sebagai informasi, alat & teks yang diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan & penelaahan implementasi pembelajaran. Dengan kata lain bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan KBM di kelas. Bahan bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. (*National Center for Vocational Education Research*).

Menurut Sanjaya (2008, 114-116) sumber-sumber materi dapat diperoleh dari :

- (a). Masyarakat beserta budayanya, dimana menurut Sanjaya sekolah merupakan wadah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat hidup di masyarakat. Dengan demikian apa yang dibutuhkan masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan isi kurikulum. Dengan memperhatikan aspek ini, setidaknya kita telah mempersiapkan peserta didik tentang akar budayanya, terutama yang sifatnya lokal, sehingga bisa jadi, materi antara daerah satu dengan yang lain akan berbeda, sesuai dengan konteks pada masing-masing daerah. Dan diharapkan dengan kelokalannya akan memperkaya ragam pengetahuan untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada peserta didik. Ini semua diikuti dengan pemberian materi yang sifatnya nasional bahkan sampai pada tataran yang lebih tinggi lagi disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan perkembangan jaman.
- b). Siswa sebagai sumber Materi Kurikulum, siswa dapat dijadikan sebagai salah satu isi /bahan/ materi dalam kurikulum karena tugas dan fungsi pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi siswa. Dimana dalam penyusunan isi kurikulum perlu memperhatikan aspek-aspek yang terdapat pada peserta didik, seperti: disesuaikan dengan perkembangan dan usia peserta didik, mencakup ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang dapat digunakan siswa sekarang atau masa datang, sesuai dengan minat dan bakat siswa.
- c). Ilmu pengetahuan sebagai sumber kurikulum, karena pada hakekatnya harapan orang tua ketika mengirim anak-anak mereka ke sekolah ada sebuah pengharapan bahwa anak akan memperoleh pengetahuan. Dimana tidak semua pengetahuan merupakan ilmu. Pengetahuan dikatakan sebagai ilmu ketika dia memiliki obyek dan metoda tertentu. Sementara ilmu pengetahuan juga bertambah seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Bahan atau materi kurikulum dapat bersumber dari ilmu pengetahuan, dan isi kurikulum diambil dari setiap disiplin ilmu, sehingga merupakan suatu kewajiban,

manakala ilmu pengetahuan beserta perkembangannya harus menjadi sumber perumusan tujuan kurikulum

2.1.2.2 Implementasi Kurikulum (Pembelajaran)

Berbagai pendapat terkait implementasi Kurikulum dikutip dan disarikan dari beberapa ahli seperti (Beauchamp, 1975: 164; Miller, 1985:250; Cornstein, dkk. 1993:297; Sukmadinata, 2008:177; Sanjaya, 2008:250), dimana implementasi kurikulum merupakan aspek terpenting dari pengembangan kurikulum dan aktualisasi kurikulum sebagai pedoman. Sehingga dalam implementasi kurikulum dimaknai sebagai proses mengajar yang dilakukan guru dan proses belajar yang dilakukan siswa di dalam ataupun di luar kelas. Dengan kata lain implementasi kurikulum dapat dikatakan sebagai pembelajaran itu sendiri.

Di dalam kegiatan implementasi kurikulum tersebut membutuhkan adanya pembentukan dan penggantian kembali, dimana pembentukan terjadi ketika model pengembangan kurikulum yang disarankan coba diaplikasikan secara nyata di lapangan menjadi satu bentuk baru, sementara *replacement* terjadi ketika model pengembangan kurikulum yang baru tersebut mulai menggantikan kurikulum sebelumnya atau sekedar tambahan perbaikan terhadap kurikulum sebelumnya. Hal tersebut berdampak pada semua komponen dan membutuhkan beberapa aspek untuk dapat melaksanakannya seperti dibutuhkannya satu sikap penyesuaian terhadap implementasi kurikulum yang baru tersebut, baik dari kebiasaan pelaku yang terlibat langsung di dalam programnya, cara penguasaannya, penekanan program, ruang lingkup pembelajaran dan penjadwalan. Harapannya pelaku dalam mengimplementasikan kurikulum tadi dapat menyesuaikan dengan program baru dan mereka tidak resisten terhadap konsep baru tersebut.

Konsep implementasi yang dikemukakan oleh Fullan pada Miller (1985:246) “*the process of putting into practice an idea, program, or set of activities new to the people attempting or expected to change. This results in a change in practice on the part of teachers and students, which affects outcomes*”.

Dengan artian implementasi merupakan proses yang menjadikan ide, program, dan beragam aktivitas baru dalam aplikasi nyata dengan berbagai pihak yang terlibat, dengan harapan akan terjadi satu perubahan terhadap produk atau outcome-nya. Dengan kata lain, konsep Fullan terhadap implementasi adalah *"realitas subyektif"*.

Sementara Leithwood pada Miller (1985:246) memaknai implementasi sebagai suatu *"proses"* untuk meminimalisir kesenjangan antara praktek nyata di lapangan dengan praktek yang disarankan dari sebuah inovasi (*implementation involves reducing the differences between existing practice and practices suggested by the innovation*). Dengan kata lain implementasi merupakan proses perubahan perilaku, dalam tindakan yang disarankan dari suatu inovasi yang terjadi dalam berbagai tingkatan guna mengatasi hambatan yang timbul dalam satu perkembangan.

Dari berbagai definisi terlahirlah pendekatan dalam mendefinisikan implementasi ini, yaitu: (1). Memaknai implementasi sebagai sebuah *event (kejadian)*. Dimana event ini terjadi sebagai satu aktifitas pengembangan profesional ketika suatu program baru diberikan kepada guru; (2). Implementasi dikatakan sebagai *proses interaksi* antara pengembang kurikulum dengan guru. Dimana mereka saling berhubungan erat satu sama lain. Disaat pengembang menemukan satu konsep baru, mereka akan membutuhkan guru sebagai orang yang menindak lanjuti dan mengaplikasikan penemuan baru tersebut dalam konsep nyata dengan berbagai revisian hingga mendapatkan satu konsep yang benar-benar tepat di lapangan nyata nantinya.

Dari penjelasan di atas perpaduan konsep implementasi Fullan dan Leithwood dapat melihat implementasi bukan dari satu aspek saja. Konsep mereka cenderung menawarkan satu proses agar guru dapat mengadaptasi program tersebut dalam subyek realita yang nyata. Dengan kata lain pengenalan terhadap perubahan dalam dunia pendidikan yang dihadapi oleh guru merupakan hal yang alamiah dari satu aktifitas manusia. Dengan asumsi guru diharapkan untuk

mengajar program baru tersebut di kelas sementara di sisi lain mereka masih tetap bekerja dalam satu kompleksitas sistem sosial.

Hal di atas sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Leithwood dan Montgomery pada Miller (1985:264) yang berasumsi bahwa implementasi merupakan sebuah proses adaptasi yang menguntungkan baik dilakukan oleh pengembang kurikulum maupun guru kelas untuk menyesuaikan terhadap sesuatu program atau ide baru dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa selama proses implementasi guru memiliki otonomi untuk menerapkan atau tidak menerapkan program baru tersebut. Bahkan ketika guru mau mengimplementasikan program baru tersebut juga akan memiliki cara dan dampak yang berbeda dalam penerapan, sehingga secara tidak langsung apabila guru tersebut mampu mengikuti dan siap untuk menerapkan program baru tersebut dalam pembelajaran nyata, maka dapatlah dikatakan bahwa guru tersebut melakukan satu adaptasi terhadap hal-hal yang baru dalam pembelajaran. Apabila mereka menemui permasalahan, permasalahan ini nanti akan menjadi masukan bagi pengembang untuk bersama-sama memecahkannya, sehingga solusi yang mereka dapat akan menjadi jalan untuk memecahkan permasalahan yang ditemui guru dalam realita nyata. Dan hal tersebut akan terjadi secara berulang, dan di sinilah tahapan yang disebut adopsi inovasi dalam implementasi kurikulum terjadi. Di sini guru dan pengembang sama-sama saling membutuhkan dan saling berbagi inovasi (pembaharuan). Interaksi terjadi antara guru dengan inovasi yang ditawarkan pengembang, dan guru berinteraksi dengan program baru (inovasi) yang ditawarkan oleh pengembang dan pengembang mengawasi jalannya program baru yang ditawarkan tersebut.

Inovasi dalam implementasi akan terjadi, ketika di dalamnya terdapat suatu perubahan, dan perubahan yang diharapkan dalam inovasi yang terjadi seperti yang dikemukakan oleh Hamalik (2007); Onnstein (1993); Rodgers (1962, 125-128) pada Miller (1985, 234) sebagai berikut: (a). Relative advantage-keuntungan relatif, dimana tingkatan perubahan akan di dapat dan menjadi sebuah perbaikan manakala dapat diterapkan pada waktu berlaku; (b). Compatibility-Kesesuaian

yaitu adanya suatu kongruen antara nilai yang ditekankan dalam perubahan dengan nilai yang disajikan diantara orang-orang yang harus mengimplementasikan perubahan tersebut; (c). Complexity-kompleksitas, yaitu dukungan perubahan dapat dimengerti dan diaplikasikan; (d). Divisibility-dapat dibagi dimana beberapa program yang dapat diimplementasikan dapat dibagi dalam unit yang lebih kecil; (e). Communicability- Mampu dikomunikasikan yaitu dukungan dimana dampak dari perubahan bisa dibagi dengan yang lain. Dengan karakteristik perubahan yang diharapkan di atas dapat terjadi maka adopsi terhadap inovasi dalam implementasi kurikulum dapat diwujudkan.

Berbicara tentang implementasi kurikulum, memuat berbagai prinsip dan dasar-dasar implementasi, yang dapat kami sarikan dari (Ornstein, 1993:298) sebagai: (1). **Perubahan** dimana pada proses dan program implementasi kurikulum ini harus dapat membuat satu perubahan baik pada sikap maupun pada aspek yang lain. Dengan harapan dari perubahan tersebut akan lahir satu inovasi, sehingga secara pasti guru harus paham dan mengerti tentang tujuan, esensi, dan manfaat ketika inovasi tersebut terjadi pada proses implemetasi kurikulum ini. (2). **Perencanaan** yang matang, dimana keberhasilan implementasi didukung dengan adanya perencanaan yang matang, yang mana proses perencanaan menekankan pada kebutuhan dan sumber-sumber yang menekankan pelaksanaan pada tindakan sesuai dengan yang diharapkan; (3). ***Kesiapan dalam perubahan (Incrementalism) baik dari segi waktu dan program yang perlu diujicobakan dan disosialisasikan terlebih dulu pada sekelompok guru.*** Dimana hakekatnya tiap orang ingin berubah, tetapi mereka juga takut dengan perubahan yang ada, khususnya bila perubahan tersebut terjadi secara mendadak, dikarenakan mereka belum siap atau mereka merasa tidak berdampak banyak buat mereka, sehingga menimbulkan kecenderungan pada mereka untuk resisten dengan tetap menggunakan pola lama serta membiarkannya begitu saja. Bahkan ada kecenderungan mereka lebih menyukai status quo dan perubahan secara perlahan saja. (4).***Implementasi dilakukan secara bertahap***, dimana implementasi, disosialisasikan dan diujicobakan terlebih dahulu pada sebagian pihak dan tidak

dilakukan secara langsung dalam satu kali tindakan; (5). **Adanya komunikasi yang dijadikan sebagai sarana untuk mensosialisasikan program baru tersebut.** Ketika terdapat satu program baru yang didesain, komunikasi hendaknya menjadi pintu utama guna membuka pemahaman wawasan dan konsep yang ditawarkan pada program baru tersebut pada semua pihak. sehingga ketika program baru tersebut diluncurkan tidak akan menimbulkan satu keagetan dan keterkejutan terhadap program yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuka forum diskusi dengan pihak-pihak yang nantinya terlibat, dan ini dianggap salah satu faktor pemegang kunci keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi kurikulum tersebut. (6). Adanya dukungan yang dapat menunjang keberhasilan program implementasi kurikulum. Termasuk didalamnya dukungan keuangan, dukungan pemerintah, serta dukungan dari sejawat, sehingga dari kesemuanya dapat dikatakan sebagai sarana untuk membuat implementasi kurikulum dapat berhasil dengan sukses dan efektif. Kesemuanya akan melahirkan dan tercipta di saat terdapat satu inovasi yang membutuhkan waktu, hubungan antar pribadi, pelatihan dan dukungan-dukungan lainnya?

Sementara Hamalik (2008:239-240) menambahkan prinsip-prinsip implementasi kurikulum adalah: a). Pemerolehan kesempatan yang sama yaitu tersedianya sarana dan prasarana untuk semua peserta didik secara berkeadilan satu kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, contoh wujud nyatanya dalam bentuk pendidikan yang ditawarkan seperti pendidikan khusus, inklusi, akselerasi; b). Berpusat pada peserta didik yaitu upaya memandirikan peserta didik agar mereka mampu memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan pengetahuan, dalam bentuk model-model pembelajaran; c). Pendekatan dan kemitraan yaitu rancangan pembelajaran yang terencana dalam jenjang tingkatan yang jelas serta melibatkan berbagai aspek yang terorganisir dari berbagai pihak yang terlibat guna mewujudkan keberhasilan pengalaman belajar; d). Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan yaitu standar kompetensi ditetapkan pusat sementara pelaksanaan diserahkan pada daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

2.1.2.3 Pengembangan Kurikulum

Kurikulum pada suatu lembaga pendidikan harus memiliki struktur yang jelas, proporsional, bermakna serta memiliki keseimbangan dan kejelasan pada komponen-komponen pembangun kurikulum. Pengembangan kurikulum harus dapat memuat pengetahuan yang bernilai, yaitu pengetahuan yang bahannya serasi dengan peserta didik, diperoleh melalui proses penyeleksian dari pengetahuan yang luas dan berkembang dari waktu ke waktu Idi, (2006: 92). Demikian juga halnya dengan pengembangan kurikulum diharapkan juga mampu "bernilai".

Perkembangan dan tuntutan masyarakat senantiasa berubah dan mengalami kemajuan pesat, sehingga berdampak terhadap pengembangan kurikulum. Pengembang kurikulum berperan sebagai *decision maker* (pengambil keputusan) untuk memilih apa yang seharusnya diajarkan dan kepada siapa diajarkan. Nasution (1989: 34) menambahkan bahwa terdapat dua masalah pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu: a). Pengetahuan apa yang paling berharga untuk diberikan bagi anak didik dalam suatu bidang studi; (b). Bagaimana mengorganisasikan bahan itu agar anak didik dapat menguasainya dengan sebaik-baiknya.

Berbagai proporsi pada pengembangan kurikulum tersebut, dan yang paling berwenang memecahkan masalah tersebut adalah para spesialis dalam disiplin ilmu yang bersangkutan. Prasyarat untuk para spesialis tersebut adalah harus selalu mengikuti perkembangan ilmunya, dan memahami asas filosofis, sosiologis, dan psikologis dalam mengambil keputusan.

Sementara itu para pengembang kurikulum mempunyai tugas membantu para spesialis agar memahami sepenuhnya akan tugas mereka dalam menentukan pengetahuan paling berharga tersebut. Pendekatan yang paling tepat adalah dengan membentuk tim yang diketuai oleh ahli pengembang kurikulum yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bidang studinya. Demikian pula dengan pengorganisasian bahan yang juga merupakan aspek penting. Nasution (1989) juga mengemukakan beberapa cara dalam mengorganisasikan bahan bagi

keperluan pengajaran. Salah satu caranya adalah dengan mengorganisasikan bahan berdasarkan topik, tema, kronologi, konsep, isu, logika, dan proses disiplin.

Bahan pelajaran yang dipilih dengan serasi tersebut mempunyai tujuan dan sasaran kurikulum yang pada dasarnya disusun dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari ranah domain tingkat rendah kepada yang lebih tinggi, kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dengan memperhatikan hal tersebut akan didapat kejelasan dan proporsi pengembangan kurikulum.

Salah satu model pengembangan kurikulum adalah "*grass root*" model. Menurut Taba (Ornstein dan Hunskin, 1993: 268) mengemukakan bahwa "*grass roots rational. Curriculum Development has high degree of objectivity, logic*". Pengembangan kurikulum *grass root* (akar rumput) memiliki tingkat rasionalitas dan objektivitas yang tinggi. Kurikulum yang didesain serta diimplementasikan oleh para pengajar dibandingkan para pemegang kekuasaan yang lebih tinggi. Konsep tersebut muncul dan lahir dikarenakan para pengajar sebagai pelaksana langsung di lapangan lebih mengerti dan memahami kondisi nyata di lapangan, daripada para pengambil kebijakan.

Ornstein dan Hunskin (1993: 279) juga mengemukakan bahwa *the curriculum should be designed by the teacher rather than handed down by higher authority*. Hal tersebut dikarenakan *Curriculum is viewed as Compendium of parts*. Pendekatan induktif, pada pengembangan kurikulum dapat dilakukan dari hal spesifik ke hal yang lebih besar dan dilakukan oleh para tenaga pengajar. Mereka menjadi ujung tombak pada kegiatan pengembangan kurikulum itu sendiri. Melalui pengajar akan dapat digunakan sebagai dasar pijakan untuk membangun hal-hal besar pada pengembangan kurikulum. Pendekatan akar rumput dalam pengembangan kurikulum lebih menyentuh ke akar dasar permasalahan dan lebih terasa dampaknya daripada pendekatan *top-down*.

Menurut Taba (Ornstein dan Hunskin, 1993: 268 - 269) terdapat tujuh langkah utama pengembangan kurikulum model *grass-roots* (akar rumput). Para

tenaga pengajar akan mempunyai peran (masukan) yang utama. Langkah tersebut berupa: 1). *Diagnosis of the needs*; 2). *Formulation of Objectives*; 3). *Selection of Content*; 4). *Organization of content*; 5). *Selection of Learning Experience*; 6). *Organization of Learning Activities*; 7). *Evaluation and means of Evaluation*.

Tenaga pengajar sebagai desainer kurikulum memulai proses pengembangan kurikulum dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, yang merupakan obyek dari perencanaan kurikulum tersebut. Dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan serta penetapan tujuan yang akan dicapai. Upaya yang dilakukan oleh tenaga pengajar bukan hanya menseleksi isi tetapi juga harus mengorganisasikannya menurut sekuen, dengan mempertimbangkan kematangan peserta didik termasuk didalamnya kemampuan akademik dan minatnya. Sehingga peserta didik dapat mendalami isi.

Pada fase ini metode pengajaran yang dilakukan oleh tenaga pengajar harus mencakup aspek peserta didik dan isi. Bukan sekedar isi yang dirangkai dan diorganisasikan, tetapi juga kegiatan belajar. Seringkali rangkaian kegiatan belajar ditentukan oleh isi. Tenaga pengajar hendaknya paham siapa peserta didiknya. Sebagai perencana kurikulum harus menetapkan tujuan yang akan dicapai serta prosedur evaluasi yang sesuai untuk peserta didiknya (Ornstein dan Hunkisns, 1993:279).

Menurut Hamalik (2000: 17) model *grass root* (akar rumput) atau arus bawah berbeda dengan rekayasa model administratif dalam beberapa hal yang berarti. Pada konsep *grass root* (akar rumput) pengembangan kurikulum diawali oleh para tenaga pengajar, pembina sekolah, dengan mengabaikan metoda pembuatan keputusan kelompok secara demokratis. Dimulai pembenahan dari bagian kurikulum yang bermasalah dan diarahkan untuk memperbaiki kurikulum tersebut secara spesifik.

Hamalik menambahkan, orientasi rekayasa model *grass roots* (akar rumput) bertanggung jawab menghidupkan kembali dua aksioma mengenai kemapanan sebuah kurikulum, yaitu: (a). Sebuah kurikulum hanya dapat diterapkan secara

berhasil apabila tenaga pengajarnya dilibatkan secara intim dengan proses pembuatan (konstruksi) dan pengembangannya. (b). Bukan hanya para professional, tetapi peserta didik, orang tua, anggota masyarakat lain harus dimasukkan dalam proses pengembangan kurikulum. Esensi yang diharapkan lahir dalam konsep ini adalah definisi yang tepat mengenai peran administrator, tenaga pengajar, ahli kurikulum dan non professional dalam menentukan perannya di dalam rekayasa kurikulum.

Peran kunci model pengembangan *grass-root* (akar rumput) menurut Hamalik berada di tangan para tenaga pengajar. Rekayasa kurikulum yang efektif tersebut digambarkan pada empat (4) prinsip dasar, yaitu: 1). Kurikulum akan lebih baik apabila kemampuan profesional tenaga pengajarnya baik; 2). Kompetensi tenaga pengajar akan meningkat apabila mereka dilibatkan secara langsung pada pemecahan permasalahan kurikulum; 3). Keterlibatan tenaga pengajar secara langsung melalui diskusi guna menetapkan tujuan yang akan dicapai serta memecahkan permasalahan yang dihadapi; 4). Kegiatan kolaborasi untuk membangun sikap saling memahami satu dengan yang lainnya.

Prinsip yang bersifat operasional, karena tugas tenaga pengajar didorong untuk bekerja secara kooperatif dalam merencanakan kurikulum baru. Dorongan terjadi bila administrator menyediakan kepemimpinan, kebebasan waktu, material, dan rangsangan lain yang bersifat kondusif terhadap perencanaan kurikulum (Hamalik, 2000 : 17). Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembang kurikulum, termasuk tenaga pengajar bekerja atas dasar permasalahan yang dihadapi secara demokratis untuk mencapai konsensus, sehingga para tenaga pengajar terlibat secara langsung dalam perencanaan dan proses pembuatan keputusan. Pengetahuan, dan kesepakatan mereka merupakan suatu kebutuhan bagi prosedur implementasi khusus yang dinyatakan oleh model administratif. Terlihat sekali keterkaitan antara tenaga pengajar dengan berbagai langkah dalam pengembangan, seperti: perencanaan, pembuatan keputusan, pengetahuan, dan komitmen yang dijadikan sebagai pijakan awal untuk memenuhi prosedur penerapan kebijakan baru tersebut

2.1.2.4 Model Kurikulum

Kurniawan menjelaskan ada empat model konsep kurikulum diantaranya adalah

1. Model kurikulum konsep akademik,

Model ini bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang akan dikembangkan oleh para ahli di masa lampau kepada generasi muda masa kini. Oleh karena itu matapelajaran dalam kurikulum ini adalah apa-apa yang ada dalam buku tua besar termasuk di dalamnya kitab-kitab suci. Peserta didik diharapkan dapat menguasai isi dari buku-buku atau kitab-kitab itu.

2. Model kurikulum pribadi,

Model kurikulum inidi desain untuk mengembangkan peserta didik secara optimal. Materi ajar tidak terpaku pada suatu bidang tertentu tetapi disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Peserta didik diberi keleluasaan untuk mempelajari segala sesuatunya, sedangkan guru memberikan layanan yang baik atas kebutuhan peserta didik.

3. Model kurikulum kontruksi sosial,

Model kurikulum ini menekankan pentingnya pengembangan individu secara pribadi dan sebagai anggota masyarakat. isi pendidikan diupayakan seoptimal mungkin dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga siswa bisa mengenal keadaan masyarakat dan berkontribusi terhadap masyarakat. untuk itu siswa mendapat penekanan pada upaya pemecahan masalah kehidupan masyarakat namun tidak mengabaikan yang ada dalam bidang studi (subjek akademik) hanya saja materi yang ada dalam bidang studi itu diberikan atau dipelajari siswa bukan untuk menguasai konten dari lapangan studi tersebut semata-mata, akan tetapi untuk perbaikan atau pemecahan sosial yang ada.

4. Model kurikulum teknologis.

Model kurikulum ini dikembangkan berdasarkan kerangka berpikir teknologis yang berbasis pada ilmu pengetahuan ilmiah. Sifatnya hampir sama dengan kurikulum subjek akademik yaitu untuk mentransfer. akan tetapi yang ditransfer adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikuasai siswa untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, bukannya nilai-nilai yang dianggap baik pada masa lampau. Meskipun mungkin ada nilai masa lampau yang dipelajari, akan tetapi dalam tujuan untuk memperkuat kemampuan yang ingin dihasilkan. Tujuan dari kurikulum ini adalah membentuk kemampuan teknis atau kemampuan kerja (vocasional/kompetensi) tertentu. Pembelajaran berorientasi tujuan dengan indikator-indikator ketercapaian yang dirumuskan dengan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran disampaikan setahap demi setahap secara sistematis. Hasil pendidikan dikontrol secara ketat melalui evaluasi hasil yang teramati (observable) dan terukur (measurable).

Dalam Materi-4 yang berjudul Model dan Organisasi Kurikulum Deni Kurniawan menjelaskan model Tyler, model Zais, model Seller dan Miller. Selengkapnya akan diuraikan di bawah ini.

a. Model Ralp Tyler

Model ini mengacu pada 4 pertanyaan dasar yang harus dijawab yang merupakan pilar bangunan kurikulum yaitu :

- 1) Berknaan dengan tujuan yang ingin dicapai, "*What educational purposes should the school seek to attain?*"
- 2) Jenis pengalaman belajar apa yang harus disediakan untuk mencapai tujuan, "*What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes?*"
- 3) Berknaan dengan organisasi kegiatan atau pengalaman belajar yang dinilai paling efektif untuk mencapai tujuan, "*How can these educational experiences be effectively organized?*"
- 4) Berknaan dengan upaya mekanisme apa yang digunakan untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai atau belum (evaluasi),

“How can we determine whether these purposes are being attained?”

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa model pengembangan Tyler ada 4 tahap yaitu : 1) Menentukan tujuan pendidikan, 2) Menentukan pengalaman belajar yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, 3) Menentukan organisasi pengalaman belajar dan 4). Menentukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui apakah tujuan telah dicapai.

b. Model Zais

Model ini menekankan kepada dari mana inisiatif bermula, siapa personil yang terlibat, bagaimana kedudukan personil serta keputusan apa yang diambil oleh personil tersebut. Zais menjelaskan tiga model pengembangan kurikulum yaitu : model administratif, model akar rumput (*grass root*) dan model demonstrasi.

1) Model Administratif (*top down model*)

Inisiatif pengembangan kurikulum model ini berasal dari pejabat (*administrator*) pendidikan termasuk dalam penunjukan orang-orang yang terlibat di dalamnya beserta tugas pengembangan ditentukan oleh administrator melalui sistem garis komando (*line staff model*). Adapun prosedur kerja model ini adalah:

- a) membentuk tim/panitia pengarah (*steering committee*)
- b) membentuk tim/panitia kerja (*worker committee*) yang beranggotakan para ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi dan gurur-guru yang berpengalaman dan bereputasi baik, untuk menjabarkan kebijakan umum yang dirumuskan panitia pengarah.
- c) hasil kerja dari panitia diserahkan kepada panitia di atasnya/pengarah

- d) penyebarluasan dan penerapan kurikulum melalui kebijakan yang berwenang

2) Model Akar Rumput (*grass root*)

Pengembangan model kurikulum ini berasal dari guru baik pada level ruang kelas maupun pada level sekolah.

3) Model Demostrasi

Pengembangan kurikulum ini berasal dari bawah sebagai upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Pengembangan kurikulum model ini memiliki beberapa kebaikan diantaranya adalah :

- a) Kurikulum ini akan lebih nyata dan praktis karena dihasilkan melalui proses yang telah diuji dan diteliti secara ilmiah.
- b) Perubahan kurikulum dalam skala kecil atau pada aspek yang lebih khusus kemungkinan ditolak oleh pihak administrator kecil. Berbeda dengan perubahan kurikulum yang luas dan kompleks.
- c) Hakekat model demonstrasi berskala kecil akan terhindar dari kesenjangan dokumen dan pelaksanaan di lapangan
- d) Model ini akan menggerakkan inisiatif, kreativitas guru-guru serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam mengembangkan program yang baru.

c. Model Beucahamp

Ada lima langkah pengembangan kurikulum model ini yaitu :

1. Menetapkan arena atau wilayah dimana kurikulum itu diperuntukkan.
2. Menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum, serta tugas-tugas dan peran yang akan dilakukan . dianjurkan melibatkan masyarakat profesional dan yang dianggap akan memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum.
3. Menetapkan prosedur yang akan ditempuh
4. Implementasi kurikulum
5. Evaluasi kurikulum., yang meliputi
 - a) Evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru di sekolah
 - b) Evaluasi terhadap desain kurikulum,
 - c) Evaluasi keberhasilan anak didik
 - d) Evaluasi sistem rekayasa kurikulum

d. Model Taba (*inverted model*)

Model Taba merupakan modifikasi dari model Tyler terutama penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Menurutnya guru harus aktif penuh dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkahnya adalah :

1. Membuat unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru
2. Menguji unit eksperimen
3. Mengadakan revisi dan konsolidasi
4. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum
5. Implementasi dan desiminasi

e. Model Miller-Seller

Model pengembangan kurikulum ini merupakan kombinasi dari model pengembangan kurikulum transmisi (Gagne) dan model transaksi (Taba's & Robinson) yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

1. Klarifikasi orientasi kurikulum
Orientasi ini merefleksikan pandangan filosofis, psikologis dan sosiologis terhadap kurikulum yang dikembangkan.klarifikasi orientasi kurikulum berdasarkan pada transmisi, transaksi dan transformasi.
2. Pengembangan tujuan
Langkah selanjutnya adalah mengembangkan tujuan umum dan tujuan khusus berdasarkan orientasi yang bersangkutan hingga pada tujuan instruksional.
3. Identifikasi model mengajar/strategi mengajar
Identifikasi model mengajar harus sesuai dengan tujuan dan orientasi kurikulum. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu :
 - a) Disesuaikan berdasarkan seluruh tujuan umum maupun tujuan khusus
 - b) Strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan siswa
 - c) Guru yang menerapkan kurikulum ini harus sudah memahami secara utuh, sudah dilatih dan mendukung model
 - d) Tersedia sumber-sumber yang esensial dalam pengembangan mode

4. Implementasi

Langkah ini merupakan penerapan kurikulum berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Pelaksanaannya didasarkan pada komponen-

komponen program studi, identifikasi sumber, penerapan pengembangan profesional, penetapan waktu, komunikasi dan sistem monitoring.

2.1.2.5 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Rochaety Ety dkk (2009), Kurikulum yang dikembangkan dalam praktik pendidikan selama ini lebih banyak diorientasikan kepada pencapaian akademik, padahal secara luas tujuan pendidikan meliputi pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan yang justru dewasa ini masih terabaikan yang pada gilirannya akan menjadi penghambat tercapainya pembentukan kepribadian manusia seutuhnya. Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2018, Menghadapi era revolusi industri 4.0, perguruan tinggi segera merespon dengan mengubah kurikulum perkuliahan. Terdapat enam rekomendasi untuk perbaikan perguruan tinggi ke depan:

1. mendorong PT untuk melakukan inovasi dan riset yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menyokong sektor ekonomi serta daya saing bangsa di tengah arus percauran global.
2. mendorong Kemristekdikti melakukan debirokratisasi kelembagaan dan deregulasi perizinan bagi pembentukan prodi-prodi baru serta terobosan baru untuk menjawab persoalan era disrupsi dan revolusi Industri 4.0.
3. meminta kepada pemerintah menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendorong pihak industri agar bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi bernilai ekonomi serta berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
4. PT juga dituntut untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai strategi dan langkah yang harus dilakukan oleh semua institusi.
5. meminta kepada DPR, DPD, dan pemerintah bersama MPR mengadakan joint session untuk menyusun haluan negara dalam perencanaan pembangunan nasional.
6. menetapkan kelompok kerja (pokja) sesuai dengan dinamika perkembangan di era revolusi Industri 4.0, di antaranya pokja pembangunan ekonomi nasional, pokja penguatan demokrasi Pancasila, pokja pendidikan tinggi berdaya saing, pokja kepemimpinan nasional cerdas dan berkarakter, dan pokja ketahanan pangan.

Selanjutnya pada Rakernas Kemenristekdikti 2018, Lima elemen penting yang harus menjadi perhatian dan akan dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0, yaitu:

1. Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data Information Technology (IT), Operational Technology (OT), Internet of Things (IoT), dan Big Data Analytic, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data literacy, technological literacy and human literacy.
2. Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Selain itu, mulai diupayakannya program Cyber University, seperti sistem perkuliahan distance learning, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. Cyber University ini nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas.
3. Persiapan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti serta perekayasa yang responsive, adaptif dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selain itu, peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi.
4. Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung Revolusi Industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, LPNK, Industri, dan Masyarakat.

Melalui teknologi digital mengharuskan bidang pendidikan melakukan redesain Kurikulum KKNI dengan mengintegrasikan dengan beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh para lulusan di era revolusi industri 4.0 melalui terobosan dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktifitas industri dan perusahaan berbasis teknologi. Dany Setiawan 2017, Kurikulum KKNI didasarkan pada kualitas manusia atau peserta didik yang didesain dengan kalibrasi kualitas melalui level kemampuan dalam formulasi *outcome* pembelajaran yang berisi mata kuliah berorientasi pada tiga ranah kecerdasan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terdapat dua faktor yang menjadi dasar perumusan dan penyusunan kurikulum KKNI yaitu 1) Faktor internal, adanya kesenjangan mutu, relevansi lulusan, kualifikasi dan ragam pendidikan. 2) Faktor eksternal. Tantangan dan persaingan global yang kompetitif dan ratifikasi Indonesia di berbagai konvensi dunia.

2.1.3. Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 merupakan era dimana kehidupan manusia selalu berhubungan dengan teknologi dan informasi. “Program Making Indonesia 4.0” merupakan program sebagai peta jalan dan langkah strategi Indonesia dalam implementasi memasuki era revolusi industri 4.0 yang esensinya merupakan upaya dan cita-cita pemerintah menciptakan kolaborasi dan sinergitas calon pemimpin digital yang bertanggung jawab terhadap integrasi bangsa, sumber daya manusia dan teknologi digital, terbuka dan transparan, serta memiliki budaya kreatif dan inovatif yang adaptif dan lincah dapat menembus perubahan dan perkembangan untuk pembangunan nasional (Mohamad Nasir . **Siaran Pers Kemenristekdikti <https://ristekdikti.go.id/kabar/Menristekdikti> - 3 Desember 2018**).

Revolusi industri 4.0 memberikan akses terhadap ilmu pengetahuan begitu terbuka dan nyata, tidak terbatas ditandai adanya terobosan teknologi baru di bidang robotika, *Internet of Things*, kendaraan otonom, percetakan berbasis 3-D, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum. Revolusi industri keempat dikenal dengan ciri CPPS (*cyber physical production system*). Sistem baru ini merupakan sinergi antara dunia nyata dan dunia maya.

Dalam pidato presiden Jokowi pada Sarasehan Nasional DPD RI jumat, 17 Desember 2017 di Gedung Nusantara IV MPR/DPRR/DPD-RI mengatakan bahwa revolusi industri berbasis sistem fisik-siber telah datang begitu cepat dan serentak di hampir setiap negara di dunia yang disebut sebagai revolusi industri ke-4 tiga dimensi yakni digital, fisik, dan biologi. Saat ini dunia sudah sedang memasuki gelombang revolusi industri tahap ke-5 bahkan keenam. Tahap awal dimulai Tahun 1990-2020, fase ke-5 revolusi industri melahirkan jaringan digital, IT dan bioteknologi. Kini dunia memasuki gelombang ke-6 yakni bio-mimikri, energi renewable, nano-teknologi hijau, bio-ekonomi, desain dan arsitektur ramah-lingkungan, dan teknologi sustainability. Maka kini tiba saatnya Rakyat dan Pemerintah RI mempersiapkan SDM berbasis keahlian, sains, teknologi, inovasi dan karya-cipta yang ramah-lingkungan, bernilai sosial dan bermanfaat

ekonomi untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kini dan masa datang. (komarudin wastabun <http://www.staging-point.com/read/2017/12/29/110755/>)

Menurut Tjandrawinata 2016, teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia. Selanjutnya Lee et al (2013) dalam (Yahya:2) menjelaskan, revolusi industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh empat faktor: 1) peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas; 2) munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis; 3) terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan 4) perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 3D printing. Lifter dan Tschienner (2013) prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri.

Hermann et al (2016) menambahkan, ada empat desain prinsip industri 4.0. **Pertama**, interkoneksi (sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things (IoT) atau Internet of People (IoP). Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. **Kedua**, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. **Ketiga**, bantuan teknis yang meliputi; (a) kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat; (b) kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman; (c) meliputi bantuan visual dan fisik. **Keempat**, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan

sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin.

Sung, (2017) mengidentifikasi tantangan industri 4.0 sebagai berikut; 1) masalah keamanan teknologi informasi; 2) keandalan dan stabilitas mesin produksi; 3) kurangnya keterampilan yang memadai; 4) keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan; dan 5) hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Secara Lebih spesifik, Hecklau et al (2016) menjelaskan tantangan industri 4.0 sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Tantangan Industri 4.0 (Hecklau et al, 2016)

Tantangan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi yang terus berlanjut: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan antar budaya b. Kemampuan berbahasa c. Fleksibilitas waktu d. Keterampilan jaringan e. Pemahaman proses 2. Meningkatnya kebutuhan akan inovasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemikiran wirausaha b. Kreativitas c. Pemecahan masalah d. Bekerja di bawah tekanan e. Pengetahuan mutakhir f. Keterampilan teknis g. Keterampilan penelitian h. Pemahaman proses 3. Permintaan untuk orientasi layanan yang lebih tinggi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemecahan konflik b. Kemampuan komunikasi c. Kemampuan berkompromi d. Keterampilan berjejaring 4. Tumbuh kebutuhan untuk kerja sama dan kolaboratif: <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu berkompromi dan kooperatif b. Kemampuan bekerja dalam tim c. Kemampuan komunikasi
-------------------	--

	d. Keterampilan berjejaring
Tantangan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan demografi dan nilai sosial: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan mentransfer pengetahuan b. Penerimaan rotasi tugas kerja dan perubahan pekerjaan yang terkait (toleransi ambiguitas) c. Fleksibilitas waktu dan tempat d. Keterampilan memimpin 2. Peningkatan kerja virtual: <ol style="list-style-type: none"> a. Fleksibilitas waktu dan tempat b. Keterampilan teknologi c. Keterampilan media d. Pemahaman keamanan TI 3. Pertumbuhan kompleksitas proses: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan teknis b. Pemahaman proses c. Motivasi belajar d. Toleransi ambiguitas e. Pengambilan keputusan f. Penyelesaian masalah g. Keterampilan analisis
Tantangan Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi dan penggunaan data eksponensial: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan teknis b. Kemampuan analisis c. Efisiensi dalam bekerja dengan data d. Keterampilan koding e. Kemampuan memahami keamanan TI f. Kepatuhan 2. Menumbuhkan kerja kolaboratif: <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu bekerja dalam tim b. Kemampuan komunikasi virtual c. Keterampilan media d. Pemahaman keamanan TI e. Kemampuan untuk bersikap kooperatif
Tantangan Lingkungan	<p>Perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pola pikir berkelanjutan b. Motivasi menjaga lingkungan c. Kreativitas untuk mengembangkan solusi keberlanjutan baru

Tantangan Politik dan Aturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan teknis b. Keterampilan koding c. Pemahaman proses 2. Keamanan data dan privasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemahaman keamanan teknologi informasi b. Kepatuhan
------------------------------	---

Cepi Riyana 2018, Tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 berupa perubahan dari cara belajar, pola berpikir serta cara bertindak para peserta didik dalam mengembangkan inovasi kreatif berbagai bidang. Transformasi organisasi yang adaptiflah akan menjamin efektifitas pelaksanaan tugas fungsi terhadap perubahan. Merujuk pendapat **Klaus Schwab**, *Executive Chairman World Economic Forum*, yang memberikan hipotesa saat ini miliaran orang telah terhubung dengan perangkat *mobile*, penemuan kecepatan pemrosesan *byte* demi *byte* data internet, yang telah meningkatkan kapasitas pengetahuan manusia melebihi sistem konvensional.

2.1.4 Aparatur Sipil Negara

Aparatur adalah orang-orang dan lembaga yang mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas umum (Sarwono Handayani, 1982). Lebih lanjut Widjaja (1995) menjelaskan bahwa aparatur adalah keseluruhan pejabat negara atau organ pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya (<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/b>)

Istilah aparatur sering disandingkan dengan negara dan pemerintah yang keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Aparatur negara adalah alat kelengkapan negara yang bekerja untuk kepentingan negara sedang aparatur

pemerintah adalah alat negara yang bertanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan.

2.2 Tinjauan Normatif Terkait

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kemudian disempurnakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Pendidikan Tinggi, mengatur semua ketentuan terkait dengan pendidikan tinggi baik mulai dari jenis pendidikan, peserta didik, kurikulum serta berbagai syarat dan ketentuan lainnya. Undang-Undang ini hakekatnya sebagai salah satu payung peraturan yang akan menjadi jembatan transformasi semua jenis pendidikan tinggi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Undang-Undang ini jelas mengatur bagaimana seharusnya sebuah pendidikan tinggi menghadapi perubahan yang sangat cepat dan mempersiapkan semua institusi pendidikan tinggi agar memiliki kualitas standar minimal yang sama. Undang-Undang ini juga menyarankan dan mensyaratkan semua PTN di Indonesia untuk menyesuaikan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Di dalam KKNI memuat tentang Capaian pembelajaran yang merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Di dalam KKNI juga terdapat upaya penyetaraan yang

merupakan suatu proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Termasuk di dalamnya kualifikasi atau penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI serta pengalaman kerja yang merupakan pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.

Dengan jumlah institusi yang massif seperti ini, penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan di Indonesia harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain (1) kesenjangan mutu atau capaian pembelajaran antar lulusan sekolah menengah atas atau perguruan tinggi, (2) kompleksitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sinkronisasi capaian pembelajaran antara sekolah menengah atas dan perguruan tinggi secara berkelanjutan, (3) ragam jalur pendidikan dan pelatihan yang ada di Indonesia dengan karakteristik serta capaian pembelajaran yang beragam pula, (4) belum terbangunnya saling pengakuan atau kesetaraan kualifikasi antar institusi penyelenggara pendidikan atau pelatihan, (5) keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penjaminan mutu internal maupun eksternal untuk melakukan kajian mutu (quality assessment) secara periodik, dan (6) kesenjangan komunikasi, informasi atau umpan balik dari pihak pengguna lulusan dengan institusi penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1 Permenristektikti tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) menegaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Hal tersebut terlihat pada Rencana Pembelajaran Siswa (RPS) yang dapat ditempuh maksimal 7 (tujuh) tahun akademik untuk D4/Sarjana Terapan, spesialis dengan jumlah SKS 144. Rumusan capaian pembelajaran wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI yang memuat sikap, keterampilan umum.

Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi

dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (UUPT No. 12/2012 Pasal 35 ayat 1). Merujuk pada Pasal 5 Ayat 2 bagaian Tiga tentang Standar Isi Pembelajaran, kurikulum pendidikan vokasi harus mampu menciptakan suasana belajar bagi mahasiswa untuk menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Mata kuliah pada pendidikan vokasi meliputi mata kuliah: (Permenristekdikti 44 pasal 17). 1) Teori , 2) Praktikum, 3) Workshop, 4). Kerja praktek lapangan (*On the Job Training*) dan). Proyek akhir

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) meliputi standar kompetensi lulusan standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; standar penilaian pembelajaran; standar dosen dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana pembelajaran; standar pengelolaan pembelajaran; dan standar pembiayaan pembelajaran.

Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk vokasi program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah (UUPT No. 12/2012 Pasal 35 ayat 1): Agama; Pancasila; Kewarganegaraan; dan Bahasa Indonesia. Disamping itu setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Rumusan keterampilan umum untuk program diploma empat/sarjana terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut :

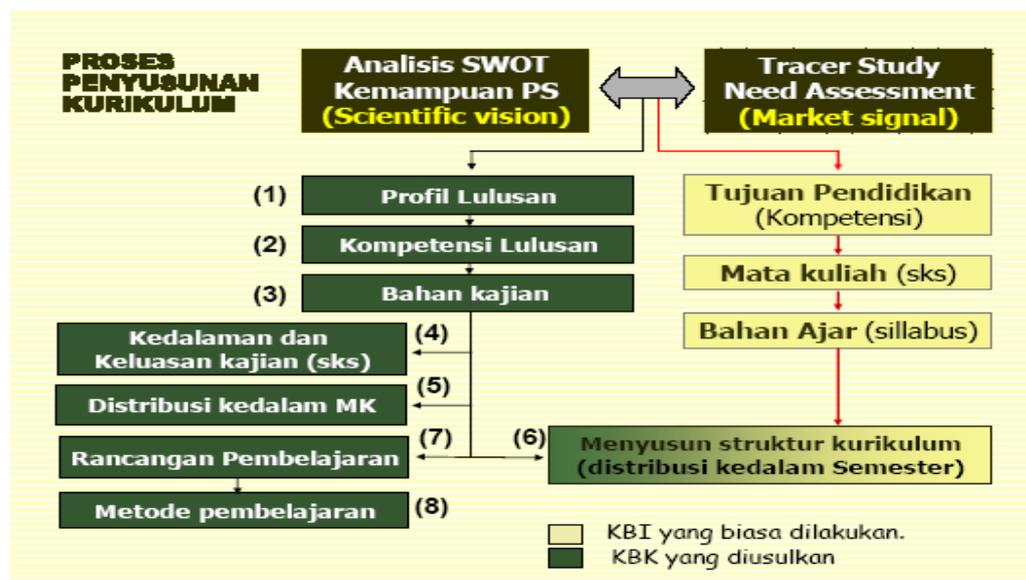
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
- c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Perpres No. 8 tahun 2012, bahwa kurikulum KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi mahasiswa yang dapat untuk

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Selanjutnya kurikulum KKNI memuat enam parameter utama yaitu, ilmu pengetahuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pengetahuan praktis, keterampilan (*skill*), afeksi, dan kompetensi. Keenam parameter tersebut tidak sama persentase yang diajarkan. Hal ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang menjadi penciri khasnya. Berikut gambaran umum, tahapan penyusunan kurikulum sebagaimana ditetapkan oleh DitJend DIKTI dapat dilihat seperti Gambar di bawah ini.

Gambar 2.1

Proses Tahapan Penyusunan Kurikulum



Langkah awal dalam **Tahapan Penyusunan Kurikulum** yang harus dilakukan adalah dengan melakukan analisis SWOT dan Tracer Study serta Labor Market Signals. Dalam penyusunan kurikulum yang sering dilakukan setelah didapat hasil dari analisis hal-hal tersebut adalah menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang kemudian segera dijabarkan dalam mata kuliah yang kemudian dilengkapi dengan bahan ajarnya (silabus) untuk setiap mata kuliah. Sejumlah mata kuliah ini disusun kedalam semester-semester. Penyusunan

mata kuliah ke dalam semester biasanya didasarkan pada struktur atau logika urutan sebuah IPTEKS dipelajari, berdasarkan urutan tingkat kerumitan dan kesulitan ilmu yang dipelajari. Kurikulum semacam ini yang sering disebut kurikulum berbasis isi (*content based curriculum*). Dalam hal ini jarang dipertimbangkan apakah lulusannya nanti relevan dengan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) atau tidak. Alternatif penyusunan kurikulum yang berbasis pada kompetensi yang diusulkan, dimulai dengan langkah-langkah berikut :

1. Penyusunan profil lulusan, yaitu peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan nantinya di masyarakat;
2. penetapan kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan yang telah diancangkan tadi;
3. Penentuan Bahan Kajian yang terkait dengan bidang IPTEKS program studi;
4. Penetapan kedalaman dan keluasan kajian (sks) yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan;
5. Merangkai berbagai bahan kajian tersebut kedalam mata kuliah;
6. Menyusun struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester;
7. Mengembangkan Rancangan Pembelajaran; dan secara simultan
8. memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensinya.

Kurikulum pendidikan di IPDN disiapkan untuk mencetak kader Aparatur Sipil Negara . Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pasal 2 menjelaskan bahwa pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Pasal 10 menjelaskan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa.

2.3 Tinjauan Penelitian dan Kajian Terkait Penelitian Sebelumnya

IPDN merupakan salah satu lembaga pendidikan pencetak kader aparatur yang profesional di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namun BKN menemukan sejumlah 4,37 juta ASN (34,5% dari total ASN) memiliki kompetensi yang rendah (BKN,2016). Terkait dengan hal tersebut di atas, peran mendidik dan mencetak calon kader aparatur Negara (pamongpraja muda) di era revolusi industri 4.0 bukan satu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, IPDN harus mampu berkontribusi melahirkan calon-calon kader aparatur sipil Negara yang handal dan berkarakter.

Hasil temuan dari tim konsultasi reformasi IPDN dan World Bank (2005), menunjukkan beberapa permasalahan di IPDN, diantaranya: 1). Permasalahan berkaitan dengan kualitas lulusan IPDN yang belum maksimal; 2). Implementasi kurikulum Jarlatsuh yang belum terintegrasi; dan 3). Permasalahan berkaitan dengan SDM tenaga kependidikan.

Hal tersebut di atas didukung dengan data temuan riset Kurniawati (2013) yang menunjukkan bahwa beberapa permasalahan terhadap implementasi kurikulum (pembelajaran) di IPDN. Beberapa temuan tersebut di antaranya: a). Implementasi kurikulum jarlatsuh belum terintegrasi secara maksimal (sebagai contoh implementasi kurikulum pengajaran bahasa Inggris) ; b). Materi, metode, dan pendekatan pembelajaran pada ketiga ranah kurikulum tersebut belum efektif (sebagai contoh pada pengajaran bahasa Inggris. Implementasi di lapangan menunjukkan materi yang diberikan di pengajaran, pelatihan, maupun di pengasuhan tidak saling berkaitan. Terindikasi pembelajaran bahasa Inggris pada ketiga ranah kurikulum tersebut seolah berdiri sendiri dan bukan merupakan satu bagian integral, saling terkait, dan menguatkan.

Kondisi tersebut di atas didasarkan atas kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa: a). Mata kuliah yang ada diampu oleh tenaga pengajar yang

berbeda (Dosen, pelatih dan pengasuh) dan mereka tidak boleh melakukan lintas sistem kurikulum (Jarlatruh); b). Perbedaan latar belakang pendidikan maupun keilmuan masing-masing tenaga Pendidik dengan mata kuliah yang diajarkan; c). Belum maksimalnya peran dan fungsi TPS/TPK dalam mengembangkan keilmuan di masing masing rumpun ilmu. Sebagai contoh penyusunan RPS masih dilakukan orang perorang dalam satu TPK, sementara hendaknya satu grup dalam TPK tersebut paham dalam menyusun RPS. Mengingat menyusun RPS menjadi ruh tiap pengajar akan apa yang nantinya akan diajarkan dan memahami tujuan dari pembelajaran yang akan diberikan; d). Kurang adanya koordinasi diantara TPS pengajaran maupun pelatihan untuk memadukan, menunjang, dan melengkapi satu sama lain materi yang akan diberikan pada kedua ranah kurikulum. Masing-masing memaknai dan menerapkan pembelajaran secara beragam dan berdampak pada sulitnya mencapai tujuan sebagaimana tercantum pada kurikulum. Data dukung pada poin D tampak pada beberpa rumusan GBPP/SAP maupun RPS dewasa ini aspek yang seharusnya menonjol di masing-masing kurikulum kurang dimunculkan. Sehingga terkesan antara kurikulum pengajaran dan pelatihan fokusnya sama saja. Berdasarkan kartu kendali sebagai panduan akan kehadiran dosen mengajar berikut materinya menunjukkan ketidak sinkronan antara materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik dengan RPS yang telah di susun. Hal tersebut semakin bertambah parah ketika dari data kartu kendali yang ada materi antara pendidik satu dengan pendidik lain dalam satu TPS berbeda. Demikian pula dengan soal UTS dan UAS dalam satu TPS/TPK juga beragam. Sehingga kurang ada standar baku akan materi yang diberikan. Demikian pula dengan evaluasi pembelajaran yang ada, belum diaplikasinya standar baku penilaian yang telah dicoba ditawarkan oleh lembaga.

2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berjalanya revolusi industri 4.0 dan menghadapi revolusi industri 5.0 diperlukan sumber daya manusia yang kritis, kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif yang ditunjang oleh net working. IPDN selaku lembaga yang menyiapkan kader aparatur pemerintah di masa depan mau tidak mau harus

merespon dan berinovasi ke arah perubahan tersebut. Saat ini revolusi industri 4.0 telah berjalan dan revolusi industri 5.0 sudah muncul maka sudah selayaknya IPDN melakukan transformasi pendidikan kader aparatur. Transformasi akan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan pada era industry 4.0, karena transformasi akan menjadi jembatan untuk mengatasi berbagai perubahan yang sangat disruptive di era revolusi industry 4.0. Melalui transformasi pendidikan kader aparatur diharapkan pemerintah segera mampu menyikapi dan menjembatani ketertinggalan RI 4.0 dan mengejar RI 5.0. sehingga menjadikan SDM lebih kompetitif dan mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien di era globalisasi saat ini.

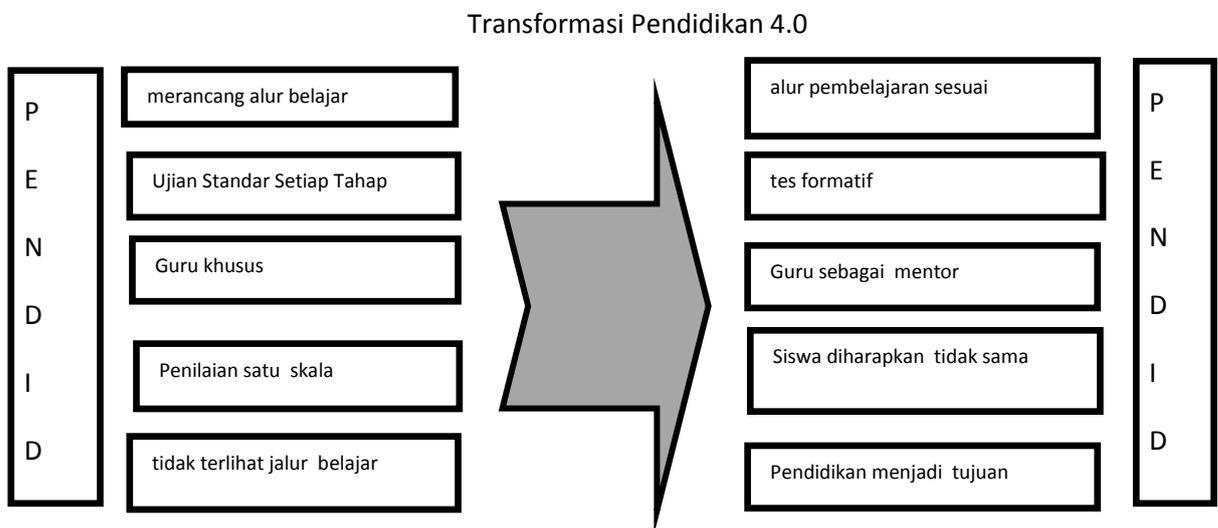
Transformasi adalah perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan IPDN dalam menghadapi RI 4.0 dan menyongsong RI 5.0. melalui transformasi kurikulum sebagaimana tujuan pendidikan tinggi adalah untuk mentransformasi masyarakat menjadi sumber daya manusia yang inovatif dan adaptif. Proses transformasi dimaksud melalui “reorientasi kurikulum”. Intan Ahmad 2018 menjelaskan bahwa ada lima elemen penting yang harus menjadi perhatian dan akan dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0 salah satunya adalah

Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data *Information Technology* (IT), *Operational Technology* (OT), *Internet of Things* (IoT), dan *Big Data Analytic*, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data *literacy, technological literacy and human literacy*.

IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi, lulusannya dituntut dapat bekerja dengan kompeten namun harus juga dapat berperan sebagai “agen pejuang kedaulatan” yang memiliki kemampuan *entrepreneurial*. Pada jenjang pendidikan tinggi vokasi lulusannya juga harus menjadi “*trend setter*” dalam menjawab berbagai aspek tantangan bangsa yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pengembangan pendidikan tinggi vokasi di masa

mendatang dapat dilakukan secara akurat dan sistematis apabila secara tepat dapat memotret kondisi penyelenggaraan pendidikan vokasi saat ini. Sebagaimana tujuan pendidikan tinggi bahwa untuk mentransformasi masyarakat menjadi sumber daya manusia yang inovatif dan adaptif diperlukan proses transformasi melalui “reorientasi kurikulum”. Transformasi Pendidikan 4.0 menurut Kemenristekdikti dapat dilihat pada gambar di bawah ini ([http:// lldikti5.ristekdikti. go.id](http://lldikti5.ristekdikti.go.id) 2019).

Gambar 2.2



Tahapan Pendidikan 4.0

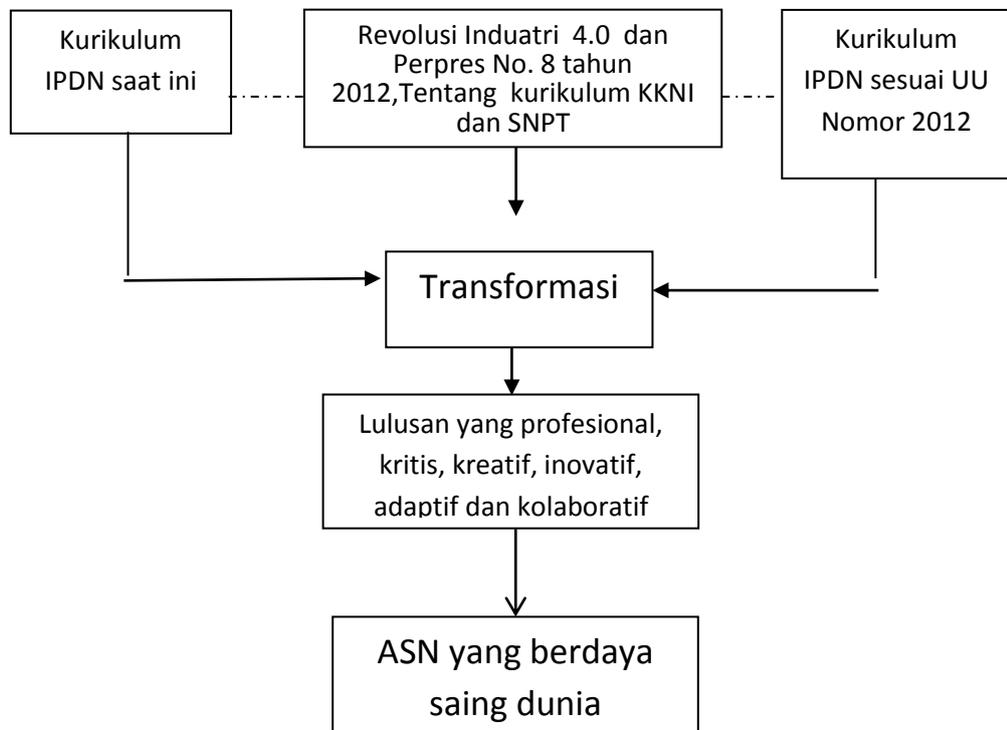
- a) Merancang tahapan belajar sesuai dengan kemampuan dan minat/kebutuhan setiap siswa ;
- b) Menggunakan penilaian formatif yaitu guru membantu siswa;
- c) Mengidentifikasi kemampuan dan bakat siswa sendiri;
- d) Menempatkan Guru sebagai mentor, dilatih mengembangkan kurikulum dan memberikan pilihan kepada siswa untuk menentukan cara belajarnya sendiri;
- e) Menjamin siswa untuk tidak menjadi sama dan tidak diharapkan menjadi sama;
- f) Pendidikan merupakan tujuan bukan transfer pengetahuan;
- g) Pengembangan profesi berkelanjutan menjadi penting karena guru memiliki posisi sentral dalam pendidikan.

Untuk mentransformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 program D4 di IPDN terlebih dahulu penulis akan menganalisis kurikulum saat

ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Miller Sellar (selengkapnya dapat dilihat pada tabel operasionalisasi konsep) di bawah ini. Baru kemudian menentukan kurikulum yang sesuai dengan RI 4.0 dengan mengacu pada Perpres No. 8 tahun 2012 Tentang Kurikulum KKNI yang menyatakan bahwa “Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi mahasiswa yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.” Kurikulum KKNI memuat enam parameter utama yaitu, ilmu pengetahuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pengetahuan praktis, keterampilan (*skill*), afeksi, dan kompetensi.

Gambar 2.3

Kerangka Pikir Transformasi Pendidikan Kader Aparatur



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri setidaknya menjadi warna baru di era Revolusi industri 4.0. Lahirnya struktur yang baru tersebut setidaknya dapat menjadi angin segar suatu organisasi untuk lebih menghasilkan produk dan karya- karya yang kaya makna dan fungsi. Dengan Revolusi Industri 4.0 ini akan mendorong terjadinya perubahan dalam roda jalannya kelembagaan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, sehingga tugas utama IPDN untuk mendidik dan mencetak kader Aparatur Sipil Negara akan melahirkan putra putri terbaik bangsa yang responsif, inovatif, dan kreatif dan siap untuk ditempatkan di garda-garda terdepan wilayah Indonesia dengan segala ketrampilan dan kemampuan yang dimilikinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini mencoba untuk mencari karakteristik dari proses transformasi kurikulum pendidikan di IPDN khususnya bagi praja program D4 di lingkungan IPDN era revolusi industri 4.0. Dengan metode ini peneliti juga mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data secara sistematis untuk memperoleh gambaran masalah yang dihadapi dan dianalisis dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Dengan kata lain, pemilihan metode kualitatif ini dilakukan karena metode ini cocok untuk memahami proses dari tiap kejadian terjadi dan peneliti ikut ambil bagian di dalamnya, sebagaimana Maxwell (1996:17) yang menyatakan *it is appropriate in understanding the process by which events and action take place*. Pada kegiatan penelitian in, peneliti tidak memulainya dengan menguji teori tetapi **teori akan terjadi sepanjang pengumpulan dan analisis data**. Peneliti tidak berangkat dari teori apriori

dikarenakan teori tersebut tidak akan mampu menjelaskan berbagai temuan (realitas dan nilai) yang akan ditemui di lapangan nantinya (Cresswell, 1994:94-95) (Guba &Lincon Alwasilah, 2002:108).

3.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Miller Seller. Model teori ini merupakan kombinasi dari model pengembangan kurikulum transmisi (Gagne) dan model transaksi (Taba's & Robinson). Selengkapnya penulis operasionalisasikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Operasionalisasi Konsep Transformasi Kurikulum Pendidikan Kader Aparatur Era RI 4.0 Program D4 IPDN

Konsep 1	Dimensi 2	Indikator 3	Item 4
GAMBARAN KURIKULUM PENDIDIKAN KADER APARATUR PROGRAM D4 IPDN (MELLER & SELLER)	1. Klarifikasi orientasi kurikulum	1. filosofis, 2. psikologis 3. sosiologis	1. dasar filosofis 2. kesesuaian dengan psikologis mahasiswa 3. kesesuaian mata kuliah dengan kebutuhan masyarakat/user
	2. Pengembangan tujuan	1. tujuan umum 2. tujuan khusus 3. tujuan instruksional	1. kejelasan 2. sistematis 3. terukur 4. objektive 5. menggambarkan tingkah laku
	3. Identifikasi model mengajar/strategi mengajar	Kesesuaian tujuan dan orientasi kurikulum	1. sesuai tidak dengan tujuan umum dan tujuan khusus 2. kesesuaian struktur dengan kebutuhan siswa 3. pengajar memahami

			model/profesionalisme pengajaran 4. ketersediaan sumber pengembangan mode
	4. Implementasi	Proses perubahan perilaku	1. aktivitas pengembangan profesional 2. proses interaksi siswa dan guru
TRANSFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN KADER APARATUR ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PROGRAM D4 DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (KEMENRISTEKDIKTI MENGENAI TRANSFORMASI PENDIDIKAN)	1. Alur Pembelajaran	SAP/GBPP atau RPP/RPS	Pandangan terhadap penyusunan SAP/GBPP atau RPP/RPS
	2. Penilaian	Bentuk Penilaian	1. Standar Penilaian 2. Bentuk penilaian 3. Tingkat kesulitan
	3. Guru/Mentor	Kedudukan dosen	1. Kualifikasi dosen 2. Sebaran dosen
	4. Standar Lulusan	Kualifikasi kemampuan	1. Taksonomi bloom 2. Tuntutan Zaman 3. Sarana Prasarana
	5. Orientasi Tujuan Kelembagaan	Visi IPDN	Kesesuaian visi dengan kemajuan IPTEK

3.3 Sumber Data Penelitian

Informan menurut Arikunto adalah “orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti.” (Arikunto, 2007). Informan sangat penting dan dibutuhkan dalam penelitian kualitatif, karena merupakan sumber informasi dalam penelitian sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitiannya. Tujuan ditentukan informan dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan *key informant*. *Key informant* dipilih dengan

mempertimbangkan aspek *setting* (*where the research will be conducted*), pelaku (*who will be interviewed*), kejadian (*what will the informant do*) dan proses.

Dalam menentukan informan yang akan diwawancarai, peneliti mengacu kepada empat kriteria informan yang baik yang dikemukakan Neuman, yaitu: 1). *The informant who is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant*; 2). *The individual is currently involved in the field*; 3). *The person can spend time with the researcher*; 4). *Non analytic individuals make better informants*. Dengan artian, informan harus benar-benar orang yang familiar dan paham dengan budaya dan peran yang dimilikinya serta mampu menjadi saksi atau sumber informasi yang sebenarnya untuk mendapatkan data dan informasi yang valid yang diperlukan dalam penelitian. Informan bias juga orang yang terlibat secara langsung dalam studi / riset yang dilakukannya. Newman juga mendefinisikan informan sebagai orang yang dekat dengan peneliti dan terlibat langsung dengan peneliti selama proses penelitian serta orang-orang yang tidak memiliki kepentingan dan berada di luar penelitian tetapi mereka paham dengan kondisi yang sedang diteliti akan menjadi informan yang lebih baik.

Dalam penelitian ini informannya adalah peneliti sendiri sesuai dengan poin kedua pendapat Newman dan juga pihak-pihak lain yang mengetahui sejarah dan proses transformasi IPDN serta para sivitas akademika IPDN baik praja, dosen, pelatih, pengasuh, alumni dan para pengambil kebijakan di lingkungan IPDN.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini meliputi jenis data kualitatif. Data kualitatif tampak pada kegiatan studi pendahuluan, dan data tersebut diperoleh melalui, studi dokumen, observasi maupun wawancara.

a). Dokumen dan Studi Kepustakaan

Berkenaan dengan dimensi tahapan yang terdapat dalam proses transformasi yang ada, peneliti akan menggunakan informasi data-data dokumen baik dokumen tentang ketentuan dan peraturan terkait dengan keberadaan IPDN maupun dokumen lain terkait dengan sejarah keberadaan IPDN hingga saat ini. Hasil temuan dan kajian terhadap dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar pijakan pemikiran dalam menganalisis proses transformasi pendidikan di IPDN, sehingga data-data dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Dokumen menjadi bukti otentik terhadap berbagai hal yang terjadi. Di samping dokumen-dokumen tersebut, studi atau telaahan pustaka juga dilakukan dan berkaitan dengan riset kajian terkait transformasi khususnya transformasi dalam kajian ilmu sosial. Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian baik penelitian berkaitan dengan transformasi di bidang ilmu eksakta maupun ilmu sosial akan memperkaya wawasan peneliti dalam melakukan analisisnya nanti.

b). Observasi

Observasi kelas digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian melalui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan hasilnya direkam, *"a research tool, what to observe, the relationship between observer and observed, and recording observation,* (Merriam, 1991). Observasi menjadi bagian penting untuk mendapatkan data pada penelitian ini, Kegiatan pembelajaran di dalam kelas akan menjadi wujud nyata pemberian layanan pendidikan. Peneliti akan mengamati kegiatan pembelajaran yang ada baik pada kurikulum pengajaran maupun pada kurikulum pelatihan. Observasi digunakan pada kegiatan studi awal penelitian untuk melihat beberapa fakta yang diterima praja terkait kurikulum pendidikan di IPDN. Pada kegiatan observasi peneliti juga akan melihat dan mengamati fasilitas sarana-prasarana penunjang yang tersedia dalam kegiatan pembelajaran maupun sarana prasarana penunjang di wisma. Observasi digunakan dalam hal yang

berkatian dengan: 1). Kondisi objektif mengenai latar dan subyek penelitian; 2). Deskripsi mengenai kegiatan kurikulum yang diterima praja baik di dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas di lingkungan IPDN.

c). Kuessioner (Angket).

Dalam penelitian ini, kuesioner (angket) digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pendapat praja mengenai kurikulum pendidikan yang mereka terima baik di dalam maupun di luar kelas pada ketiga ranah kurikulum.

d). Interview (Wawancara)

Jawaban yang kurang dapat diperoleh melalui angket maupun observasi, dicari dengan menggunakan instrumen wawancara. Pengembangan instrumen wawancara dilakukan dengan membuat berbagai pertanyaan terstruktur untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara yang digunakan dikembangkan dengan mengkombinasikan instrumen wawancara yang bersifat informal dan terstruktur dipadukan menjadi satu kesatuan. Pada kegiatan wawancara, kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara menyeluruh. Apabila dalam kegiatan dirasa perlu dipertanyakan maka pertanyaan dapat berkembang bergantung pada situasi dan kondisi mengenai informasi yang dicari.

Pada *preliminary study* (studi pendahuluan), wawancara digunakan untuk mengkroscek dan meyakinkan persepsi yang diperoleh melalui observasi terhadap kurikulum IPDN. Wawancara juga digunakan untuk mencari informasi sejarah dan perkembangan IPDN dari masa ke masa pada para saksi sejarah berdirinya APDN Nasional yang berpusat di Jatinganor serta peserta didik purna praja alumni yang bekerja di IPDN. Wawancara dilakukan kepada founding faders, pejabat dan pelaksana kurikulum (dosen) , pejabat bagian akademik.

3.4 Instrumen Penelitian yang Digunakan

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun alat bantu yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

1. Panduan wawancara yang mengacu pada teori Miller dan Seller untuk menggambarkan kurikulum dan transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 mengacu pada kemenristek dikti. (terlampir).
2. Alat rekam untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data saat melakukan wawancara.
3. Kuesioner/angket dalam bentuk pertanyaan tertutup, dengan memberi opsi responden untuk memilih jawaban yang sudah tertulis dalam kuesioner (terlampir).

3.3. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, pada penelitian ini terdapat tiga jenis data yang dianalisis, yaitu: (1). Data kualitatif berupa hasil analisis dokumen dan telaah kepustakaan; (2). Data hasil observasi; (3). Data dari hasil wawancara. Proses penelitian pada tahap studi pendahuluan dan tahap pengembangan program menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah di lapangan, dan berlangsung sampai ditemukan pengembangan model. Dengan prosedur sebagai berikut:

Data yang diperoleh dari studi pendahuluan meliputi: (1). Hasil telaahan dokumen dan studi pustaka; (2). Hasil observasi mengenai latar penelitian terkait kurikulum yang diterima praja yang dilaksanakan di IPDN saat ini; (3). Hasil wawancara dengan tenaga kependidikan di IPDN dan praja serta alumni yang bekerja di IPDN, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1). Studi pendahuluan dilakukan dengan orientasi atau deskripsi melalui *"grand tour question"*. Peneliti memasuki obyek penelitian secara langsung, peneliti melakukan pengamatan dan mempelajari hasil hasil

riset terkait dengan IPDN serta studi pustaka terhadap konsep riset yang berkaitan dengan transformasi guna mendapatkan gambaran obyek yang diteliti dan mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan untuk mengumpulkan informasi data sebanyak-banyaknya.

- 2). Setelah melakukan studi pendahuluan, peneliti melengkapi data-data informasi dengan kuesioner dan interview. Kuesioner diberikan kepada praja berkaitan dengan kondisi kurikulum pendidikan yang mereka terima selama di IPDN untuk mendapatkan respon dan tanggapan mereka penerima materi yang berhubungan dengan kurikulum IPDN. Kuesioner juga diberikan kepada para tenaga pendidik baik dosen, pelatih, pengasuh dan para pengambil kebijakan di IPDN. Kuesioner terkait dengan pemberian layanan pendidikan kepada praja di lingkungan IPDN.
- 3). Tahapan Analisis, dari hasil pengumpulan data dengan studi dokumen, observasi, interview dan melalui angket (kuesioner). Dilanjutkan dengan analisis terhadap data yang ada yang ditemukan di lapangan, dan data-data yang muncul di lapangan. Data-data hasil temuan akan menjadi bahan bagi peneliti untuk dapat dikelompokkan dan dikategorisasikan untuk dapat dimaknai. Dan makna-makna yang ada akan menjadi hipotesis yang akan peneliti cek secara terus menerus dengan data-data yang lain pada kegiatan penelitian, sehingga akan melahirkan grounded theory pada penelitian ini.
- 4). Dalam melakukan analisis data, tidak lupa peneliti juga akan melakukan reduksi data, yaitu proses atau tahapan yang peneliti lakukan dengan cara mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Dilakukan dengan cara menyortir, memilih data yang menarik, penting, berguna, dan baru, serta menyingkirkan data yang dirasa tidak dipakai untuk memfokuskan pada masalah tertentu dalam penelitian. Kemudian mengelompokkannya berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pada fokus penelitian. Reduksi dilakukan dalam proses penyederhanaan yang dilakukan melalui penyuntingan, pemfokusan, dan abstraksi data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna.

- 5). Penarikan kesimpulan, yaitu proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah diorganisir ke dalam bentuk pernyataan singkat yang mengandung pengertian lebih luas. Kesimpulan yang diambil kemudian didiskusikan bersama. Penarikan kesimpulan diarahkan untuk mengungkap prinsip-prinsip dasar yang dijadikan dasar dalam finalisasi terkait proses transformasi pendidikan yang ada di lingkungan IPDN, sekaligus menarik kesimpulan dari berbagai temuan yang ada sekaligus saran yang didasarkan dari temuan dan kesimpulan yang ada.

3.4.Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian dengan judul, “Transformasi Pendidikan Kader Aparatur Era Revolusi Industri 40 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri “, akan dilakukan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan akan di fokuskan pada Kurikulum program D4 IPDN. Penelitian akan dilakukan kepada tiga ranah kurikulum IPDN (Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan).

Jadwal Kegiatan Penelitian akan dilakukan pada bulan Mei sampai dengan September 2019 sebagaimana . selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN PENELITIAN	WAKTU PENELITIAN (TAHUN 2008)													
		Mei			Juni			Juli			Agustus			September	
1.	Pra Penelitian														
2.	Penyusunan UP														
3.	Persetujuan UP														
4.	Penelitian														
5.	Penyusunan Hasil														

	Penelitian																												
6.	Laporan Hasil Penelitian																												

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum IPDN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri, menyebutkan bahwa "Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah unit organisasi setara Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan dipimpin oleh Rektor, sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah". Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan adalah pendidikan tinggi kedinasan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai spesifikasi/kekhususan di bidang ilmu pemerintahan terapan, yang ditempuh dalam sistem pendidikan melalui pengajaran, pelatihan dan pengasuhan sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Program Pendidikan yang diselenggarakan adalah program pendidikan Vokasi, Akademik dan Profesi Kepamongprajaan. Pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ini terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang, dan telah mengalami penyempurnaan serta perubahan sesuai tuntutan kebutuhan. Adapun perkembangan sekolah kepomongprajaan di Indonesia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Perkembangan Sekolah Kepamongprajaan di Indonesia

Tahun	Program Pendidikan
1	2

1920	<i>Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA)</i>
1	2
1948	Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja, menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA)
1952	Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang
1956	Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional di Malang, berdasarkan SK Mendagri No. Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno, dengan Direktur pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat.
1967	Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) setingkat Sarjana yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur, diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.
1970-an	Terbentuk APDN di 20 Provinsi yaitu Malang, Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.
1992	Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) berdasarkan Kepres No. 42 Tahun 1992, dengan program studi D III yang diresmikan oleh Presiden RI tanggal 18 Agustus 1992.
2004	Penggabungan STPDN ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004
2009 s.d Sekarang	Institut Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi IPDN.

Sumber : LAKIP IPDN 2018

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri bahwa IPDN bertugas membantu Menteri di bidang Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang melaksanakan program pendidikan vokasi, akademik dan profesi di bidang kepomongprajaan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, IPDN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan tinggi kepomongprajaan;
2. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi, akademik dan profesi;
3. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pengembangan kemampuan, keterampilan dan karakter kepomongprajaan;
5. Pengembangan, pengkajian ilmu dan masalah pemerintahan;
6. Pemberian pertimbangan kepada Menteri dari aspek akademis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah;
7. Penatausahaan penyelenggaraan pendidikan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja IPDN, bahwa di IPDN terdapat jabatan struktural, struktural akademik serta jabatan fungsional. Jabatan struktural Eselon II di lingkup IPDN yaitu:

- 1) Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan;
- 2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- 3) Biro Administrasi Keprajaan dan Mahasiswa;
- 4) Biro Administrasi Kerja sama dan Hukum.

Jabatan struktural akademik setara Eselon II meliputi : fakultas, IPDN Kampus Daerah, dan lembaga sebagai berikut:

- 1) Fakultas Politik Pemerintahan;
- 2) Fakultas Manajemen Pemerintahan;
- 3) Fakultas Hukum Tata Pemerintahan;

- 4) Program Pascasarjana;
- 5) Program Profesi Kepamongprajaan;
- 6) IPDN Kampus Sulawesi Utara;
- 7) IPDN Kampus Sulawesi Selatan;
- 8) IPDN Kampus Sumatera Barat
- 9) IPDN Kampus Kalimantan Barat;
- 10) IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat;
- 11) IPDN Kampus Papua;
- 12) IPDN Kampus Jakarta;
- 13) Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan;
- 14) Lembaga Pengabdian Masyarakat;
- 15) Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu Internal.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi kepomongprajaan mengacu pada arah kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri, serta diperkuat dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 376 disebutkan bahwa:

- a. untuk pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kementerian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepamongprajaan.
- b. pendidikan dan pelatihan kepomongprajaan ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus: (1) memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan; (2) memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepomongprajaan; dan (3) berwawasan nusantara, berkode etik, dan berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika.
- c. untuk menghasilkan lulusan dimaksud, metode pendidikan dan latihan kepomongprajaan dilakukan dengan menerapkan kombinasi antara pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (Jarlatsuh).

Sejalan dengan Nawacita Jokowi-JK yang ke-8 yaitu “Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia”, maka pada tanggal 15 Juni 2015 Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo menetapkan IPDN sebagai Kampus Kader Pelopor Revolusi Mental, yang ditindaklanjuti dengan Penyetoran Pin Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) bagi alumni IPDN pada saat Pengukuhan Pamong Praja Muda.

Memperhatikan arah kebijakan dan strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yang berbunyi “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri”, dalam “Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN maka perlu ditindaklanjuti dengan serangkaian arah kebijakan dan strategi IPDN yang akan dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi IPDN ke depan. Melalui Keputusan Rektor Nomor 050-547 Tahun 2015 diketahui Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2015-2019, yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis IPDN sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan lima tahun ke depan. Visi IPDN sangat erat kaitannya dengan landasan filosofi pembentukan IPDN yaitu mencetak kader pemerintahan yang bercirikan memiliki jiwa dan semangat kenegarawanan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berwawasan nusantara, berkode etik, dan berpijak pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta sesuai dengan tata nilai pengembangan lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang tercermin pada Pola Ilmiah Pokok IPDN yaitu: “Pola pengembangan keilmuan berbasis riset, teori, konsep, dan praktek pemerintahan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan ideal yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Visi, Misi, tujuan dan Sasaran IPDN



Sumber : Renstra IPDN 2015–2019

Indikator keberhasilan sebuah perguruan tinggi terlihat dari nilai akreditasinya. Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Akreditasi perguruan tinggi penting karena salah satu persyaratan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan. IPDN sampai tahun 2016 telah menyelenggarakan 2 (dua) fakultas

yaitu Fakultas Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Status Akreditasi kedua fakultas tersebut adalah B dengan peringkat nilai 348. Mulai tahun 2017 di IPDN diselenggarakan fakultas baru yaitu Fakultas Hukum Tata Pemerintahan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Akreditasi Program Studi di IPDN

No	Program Pendidikan	Program Studi	Akreditasi
Fakultas Manajemen Pemerintahan			
	D.IV	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	B
	D.IV	Keuangan Daerah	B
	D.IV	Manajemen Sumber Daya Aparatur	B
	S.1	Manajemen Pemerintahan	B
	S.1	Manajemen Keuangan	B
	S.1	Manajemen Sumber Daya Manusia	B
	S.1	Manajemen Pembangunan	B
Fakultas Politik Pemerintahan			
	D.IV	Politik Pemerintahan	B
	D.IV	Pembangunan dan Pemberdayaan	B
	S.1	Kebijakan Pemerintahan	B

Sumber : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3115/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016

Penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan di IPDN dilaksanakan di Kampus Pusat yaitu Kampus Jatinangor, Kampus Cilandak serta Kampus Daerah yaitu Kampus Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. IPDN Kampus Daerah melaksanakan program studi tertentu, atau melaksanakan sebagian tugas IPDN di bidang

program vokasi. Adapun penyiapan kurikulum, RPS, SAP, GBPP, dosen dan modul pembelajaran dilakukan secara terpusat dari IPDN Kampus Jatinangor. Struktur Organisasi dan Tata Kerja IPDN dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Kurikulum Pendidikan Kader Aparatur di IPDN

Berbicara mengenai kurikulum IPDN saat ini, tidak akan terlepas dari gambaran umum IPDN itu sendiri. IPDN merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara tidak langsung IPDN akan berada di bawah payung ketentuan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pemilahan posisi dalam implementasi hendaknya dapat menjadi pijakan, pada aspek pengelolaan organisasi IPDN akan mengacu pada berbagai ketentuan peraturan di bawah Kementerian Dalam Negeri, sementara pada operasional pelaksanaan pendidikan IPDN harus tetap mengacu pada aturan dan ketentuan Kemenristek Dikti.

Terkait dengan hal tersebut di atas, berbicara tentang kurikulum Pendidikan di IPDN hendaknya IPDN tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang tertuang di dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemenristek Dikti. Khususnya aturan yang berhubungan dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan tingginya seperti yang termaktub di dalam amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum. Pada ketentuan ini menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki „kemampuan“ setara dengan „kemampuan“ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang

kualifikasi KKNI. Setiap perguruan tinggi wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Dengan melihat aturan dan ketentuan yang berlaku tersebut, berdasarkan data dokumen kurikulum yang berlaku di IPDN, khususnya kurikulum yang didasarkan pada Peraturan Rektor IPDN Nomor 423-5-764 tahun 2013 tentang Kurikulum Program Diploma IV dan Sarjana (S1) IPDN, tampak bahwa kurikulum yang digunakan di IPDN cenderung *subject center* hanya sebatas pada kumpulan mata kuliah semata serta deskripsi singkat terkait dengan jumlah fakultas dan program studi. Hal tersebut dapat dilihat dari data dokumen kurikulum Nomor 423-5-764 tahun 2013, yang memuat:

1. Informasi jumlah fakultas yang terdapat di IPDN, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Masing-masing fakultas memiliki kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan baik program D4 maupun S1 yang sering disebut dengan istilah Tri Tunggal Terpusat (Jarlatsuh);
2. Tiap fakultas memiliki program studi dengan beban SKS sebesar ≥ 148 sks yang kesemuanya wajib di tempuh selama delapan (8) semester. Rincian lebih lanjut terkait Fakultas dan Prodi dapat dilihat sebagai berikut:
 - 2.1. Fakultas Politik Pemerintahan terdiri dari :
 - 2.1.a. Program D4 memiliki 2 Program Studi yaitu :
 - a) Program Studi Politik Pemerintahan jumlah SKS 150 selama 8 semester
 - b) Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan jumlah SKS 149 selama 8 semester.
 - 2.1.b. Program S1 Studi Kebijakan Pemerintahan jumlah SKS 154 selama 8 semester.
 - 2.2. Fakultas Manajemen Pemerintahan Terdiri dari :
 - a. Program D4 memiliki 2 Program Studi yaitu :
 - a) Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jumlah SKS 150 selama 8 semester
 - b) Program Studi Keuangan Daerah jumlah SKS 148 selama 8 semester
 - c) Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur jumlah SKS 148 selama 8 semester
 - b. Program S1 terdiri dari :
 - a) Program Studi Manajemen Pemerintahan jumlah SKS 154 selama 8 semester
 - b) Program Studi Manajemen Pembangunan jumlah SKS 154 selama 8 semester

- c) Program Studi Manajemen Sumberdaya Manusia jumlah SKS 155 selama 8 semester
- d) Program Studi Manajemen Keuangan jumlah SKS 157 selama 8 semester

2.3. Program pelatihan baik Fakultas Politik maupun fakultas pemerintahan jumlah SKS yang ditempuh sebanyak 28 SKS selama 8 semester .

3. Pada Peraturan Rektor IPDN Nomor 423.5-764 tahun 2013 memuat daftar mata kuliah tiap program studi selama 8 semester serta sebaran mata pelatihan yang diberikan dalam delapan semester untuk semua program studi di IPDN mata pelatihnannya adalah sama. Di dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan rincian aktifitas terkait dengan kurikulum pengasuhan. Secara lebih rinci dapat dilihat di dalam tabel.4.3.

Tabel 4.3

Daftar Mata Kuliah dan Jumlah SKS pada Fakultas Politik Pemerintahan dan Manajemen Pemerintahan Program D4 IPDN

FAK	POLITIK PEMERINTAHAN				FAKULTAS MANAJEMEN					
	Studi Politik Pemerintahan		Studi Pembangunan dan Pempderdayaan		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		Keuangan Daerah		Manajemen sumber Daya Manusia	
Semester/ ket.	Mata Kuliah/SKS									
I Institusi	1. Pendidikan Pancasila	2	1. Pendidikan Pancasila	2	1. Pendidikan Pancasila	2	1. Pendidikan Pancasila	2	1. Pendidikan Pancasila	2
	2. Pendidikan Agama	2	2. Pendidikan Agama	2	2. Pendidikan Agama	2	2. Pendidikan Agama	2	2. Pendidikan Agama	2
	3. Pendidikan Kewarganegaraan	2	3. Pendidikan Kewarganegaraan	2	3. Pendidikan Kewarganegaraan	2	3. Pendidikan Kewarganegaraan	2	3. Pendidikan Kewarganegaraan	2
	4. Bahasa Indonesia	2	4. Bahasa Indonesia	2	4. Bahasa Indonesia	2	4. Bahasa Indonesia	2	4. Bahasa Indonesia	2
	5. Bahasa Inggris	2	5. Bahasa Inggris	2	5. Bahasa Inggris	2	5. Bahasa Inggris	2	5. Bahasa Inggris	2
	6. Pengantar Filsafat	3	6. Pengantar Filsafat	3	6. Pengantar Filsafat	3	6. Pengantar Filsafat	3	6. Pengantar Filsafat	3
	7. Pengantar Ilmu Politik	3	7. Pengantar Ilmu Politik	3	7. Pengantar Ilmu Politik	3	7. Pengantar Ilmu Politik	3	7. Pengantar Ilmu Politik	3
	8. Pengantar Ilmu Hukum	3	8. Pengantar Ilmu Hukum	3	8. Pengantar Ilmu Hukum	3	8. Pengantar Ilmu Hukum	3	8. Pengantar Ilmu Hukum	3
		19		19		19		19		19
II Institusi	1 Pengantar Sosiologi	2	1 Pengantar Sosiologi	2	1 Pengantar Sosiologi	2	1 Pengantar Sosiologi	2	1 Pengantar Sosiologi	2
	2. Pengantar Antropologi	2	2. Pengantar Antropologi	2	2. Pengantar Antropologi	2	2. Pengantar Antropologi	2	2. Pengantar Antropologi	2
	3. Pengantar Ilmu Pemerintahan	3	3. Pengantar Ilmu Pemerintahan	3	3. Pengantar Ilmu Pemerintahan	3	3. Pengantar Ilmu Pemerintahan	3	3. Pengantar Ilmu Pemerintahan	3
	4. Pengantar Ilmu	2	4. Pengantar Ilmu Ekonomi	2	4. Pengantar Ilmu	2	4. Pengantar Ilmu	2	4. Pengantar Ilmu	2

	Ekonomi				Ekonomi		Ekonomi		Ekonomi	
	5. Pengantar Ilmu Kependudukan	2								
	6. Pengantar Ilmu Administrasi	2								
	7. Dasar-dasar Manajemen	2								
	8. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	2	8. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	2	8. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	2	8. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	2	8. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	2
		17								
III Institusi	1. Etika Pemerintahan	2								
	2. Sistem Politik Indonesia	3								
	3. Sistem Pemerintahan Indonesia	3								
	4. Administrasi Kepegawaian	2								
	5. Hak Asasi Manusia	2								
	6. Kepamongprajaan	2								
	7. Sistem Hukum Indonesia	3								
	8. Pemerintahan Desa/ Kelurahan	2								
	9. Komunikasi Pemerintahan	2								
		21								
IV Institusi	1. Ilmu Administrasi Publik	3								
	2. Hukum Tata Usaha Negara	2								
	3. Statistika Sosial	3								
	4. Kebijakan Publik	3								
	5. Keuangan Negara dan Daerah	3								
	6. Kebijakan Pertanahan	2								
	7. Manajemen Pemerintahan Daerah	3								
	8. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia	3								
		22								
V	1. Teori Organisasi	3								

(Institusi 1-8) & (9 Fakultas)	2. Teori Pembangunan	3	2. Teori Pembangunan	3	2. Teori Pembangunan	3	2. Teori Pembangunan	3	2. Teori Pembangunan	3
	3. Ekologi Pemerintahan	2	3. Ekologi Pemerintahan	2	3. Ekologi Pemerintahan	2	3. Ekologi Pemerintahan	2	3. Ekologi Pemerintahan	2
	4. Analisis Potensi Wilayah	3	4. Analisis Potensi Wilayah	3	4. Analisis Potensi Wilayah	3	4. Analisis Potensi Wilayah	3	4. Analisis Potensi Wilayah	3
	5. Penanggulangan Korupsi	2	5. Penanggulangan Korupsi	2	5. Penanggulangan Korupsi	2	5. Penanggulangan Korupsi	2	5. Penanggulangan Korupsi	2
	6. Metode Penelitian Sosial	3	6. Metode Penelitian Sosial	3	6. Metode Penelitian Sosial	3	6. Metode Penelitian Sosial	3	6. Metode Penelitian Sosial	3
	7. Pelayanan Publik	3	7. Pelayanan Publik	3	7. Pelayanan Publik	3	7. Pelayanan Publik	3	7. Pelayanan Publik	3
	8. Politik, Desentralisasi dan otonomi Daerah	2	8. Politik, Desentralisasi dan otonomi Daerah	2	8. Politik, Desentralisasi dan otonomi Daerah	2	8. Politik, Desentralisasi dan otonomi Daerah	2	8. Politik, Desentralisasi dan otonomi Daerah	2
	9. Perkembangan Pemikiran Politik Indonesia	3	9. Perkembangan Pemikiran Politik Indonesia	3	9. Manajemen Strategik	3	9. Manajemen Strategik	3	9. Manajemen Strategik	3
		24		24		24		24		24
VI (1-5 Fakultas) dan (6 ke atas prodi)	1. Teori Birokrasi	3	1. Teori Birokrasi	3	1. Manajemen Konflik dan Kolaborasi	2	1. Manajemen Konflik dan Kolaborasi	2	1. Manajemen Konflik dan Kolaborasi	2
	2. Pembangunan Politik Indonesia	3	2. Pembangunan Politik Indonesia	3	2. Manajemen asset	2	2. Manajemen asset	2	2. Manajemen asset	2
	3. Kelembagaan Politik Daerah	3	3. Kelembagaan Politik Daerah	3	3. Pengawasan Pemerintahan	2	3. Pengawasan Pemerintahan	2	3. Pengawasan Pemerintahan	2
	4. Pembentukan Perundang-undangan	3	4. Pembentukan Perundang-undangan	3	4. Manajemen Perubahan	3	4. Manajemen Perubahan	3	4. Manajemen Perubahan	3
	5. Politik Pemerintahan di Asia Tenggara	3	5. Politik Pemerintahan di Asia Tenggara	3	5. Manajemen Perbatasan	3	5. Manajemen Perbatasan	3	5. Manajemen Perbatasan	3
	6. Sistem Kepartaian dan Pemilu	3	6. Pembangunan Ekonomi Regional	3	6. Manajemen Sumber daya Kependudukan	3	6. Hukum Keuangan Daerah	3	6. Kebijakan Sumber Daya Aparatur	3
	7. Komunikasi Politik	3	7. Perencanaan Pemerintah Daerah	3	7. Kebijakan Kependudukan di Indonesia	3	7. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	3	7. Manajemen Sumber Daya Aparatur	3
			8. Teori Pemberdayaan Masyarakat	3	8. Sistem Administrasi Kependudukan	3	8. Perencanaan Penganggaran Daerah	3	8. Sistem Informasi Kepegawaian	3
						9. Akuntansi Keuangan Daerah	3	9. Perencanaan Rekrutmen Pegawai	3	
		21		22			22		24	
VII Prodi	1. Analisis Kekuatan Sosial Regional	3	1. Pembangunan Berbasis kearifan Lokal	3	1. Demografi	3	1. Akuntansi Keuangan Daerah	2	1. Penempatan dan Pengembangan Pegawai	3
	2. Analisis Kekuatan Politik regional	3	2. Pengembangan Model Sosial	3	2. Ekologi Kependudukan	3	2. Pemeriksaan Keuangan Daerah	3	2. sistem Imbalan dan Pemberhentian Pegawai	3
	3. Budaya Politik	3	3. Modal dan Teknik	3	3. Pemberdayaan	3	3. Sistem Akuntansi	3	3. Etika Aparatur	3

	Indonesia		Pemberdayaan Masyarakat		Gender		Pemerintahan Daerah		Pemerintah	
	4. Konflik dan Integrasi Sosial	3	4. Kebijakan ... Sosial	3	4. Pencatatan Sipil	3	4. Sistem Informasi keuangan Daerah	3	4. Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur	3
	5. Partisipasi Politik Masyarakat	3	5. Pembangunan Ekonomi Perdesaan	3	5. Migrasi Penduduk	3	5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3	5. Seminar SumberDaya Aparatur	2
	6. Teknik Penyerapan Aspirasi Masyarakat	2	6. Seminar pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	6. Teknik Analisis Kependudukan	2	6. Seminar keuangan Daerah	2		
	7. Seminar Politik Pemerintahan	2			7. Seminar Kependudukan dan Catatan Sipil	2				
		19		17		19		16		14
VIII Institusi	1. Seminar Usulan Magang	1	1. Seminar UsulanMagang	1	1. Seminar UsulanMagang	1	1. Seminar UsulanMagang	1	1. Seminar UsulanMagang	1
	2. Magang Penelitian	2	2. Magang Penelitian	2	2. Magang Penelitian	2	2. Magang Penelitian	2	2. Magang Penelitian	2
	3. Laporan Akhir	4	3. Laporan Akhir	4	3. Laporan Akhir	4	3. Laporan Akhir	4	3. Laporan Akhir	4
		7		7		7		7		7
		150		150		150		148		148

Sumber : Peraturan Rektor IPDN No. 423-5-764 Tahun 2013

4. Dari data dokumen di atas tabel 4.3. tampak jelas terkait dengan sebaran mata kuliah yang akan menjadi ciri khas tiap program studi belum tampak secara nyata. Sehingga antara lulusan S1 dan D-IV tidak memiliki kesetaraan kualifikasi yang jelas dan tampak bahwa semua lulusan IPDN berasal dari satu program studi yang sama.

Di samping *subject centred*, dari hasil pengamatan dan data dokumen kurikulum IPDN ditemukan bahwa kurikulum IPDN sejak tahun 2013 tidak mengalami pengembangan hingga tahun 2018. Seharusnya sesuai dengan ketentuan Undang–Undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, sudah seharusnya kurikulum IPDN yang berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 423-5-764 tahun 2013 tentang Kurikulum Program Diploma IV dan Sarjana (S1) IPDN sudah seharusnya kurikulum tersebut mengacu pada KKNi dan SNPT. Sementara di dalam dokumen tersebut tidak memunculkan konsep KKNi dan SNPT. Di samping hal tersebut di atas, pengembangan dan evaluasi kurikulum hendaknya dilaksanakan. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan:

- a) Pemahaman terkait dengan kurikulum dari para pengambil kebijakan belum didudukkan secara proporsional. Temuan data yang menunjukkan kurikulum IPDN dari tahun 2013 sampai dengan 2018 belum mengalami pengembangan, sementara aturan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi sudah mengatur ketentuan tersebut
- Dari hasil wawancara dengan para pengambil kebijakan, pemahaman mereka terkait dengan kurikulum sendiri masih hanya sebatas kumpulan mata pelajaran sehingga hal tersebut berdampak pada tiap kebijakan terkait dengan kurikulum. Sementara kebijakan kurikulum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sudah sangat jelas mengatur kurikulum di masing-masing perguruan tinggi untuk menyesuaikan perubahan yang ada.
- b) IPDN kurang merespon secara cepat aturan dan ketentuan terkait dengan pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan Nasional maupun Kemenristek Dikti yang sangat cepat perkembangan dan perubahannya. Sementara dalam aturan-aturan tersebut sudah jelas diatur ketentuannya.
- c) Anggaran yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum ada di satu bagian tetapi dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum berdasarkan data dan fakta di lapangan hanya sebatas pada pengembangan GBPP/SAP tiap tahunnya. Mengapa hal ini terjadi, karena pemahaman pengembangan kurikulum hanya sebatas pada kumpulan mata kuliah. Sementara apabila persepsi pengembangan kurikulum hanya sebatas mata kuliah maka aktivitas yang akan dilakukan dalam proses pengembangan kurikulum hanya berkuat pada konsep perbaikan mata kuliah dalam bentuk dokumen. Sementara berbicara pengembangan kurikulum, cakupannya sangat luas dan menjadi suatu keharusan dalam sebuah lembaga pendidikan. Mengingat perubahan kondisi jaman yang sangat dinamis harus diantisipasi dengan pengembangan kurikulum yang didasarkan pada implementasi dan evaluasi kurikulum yang ada.
- d) Dari hasil pengamatan dan data dokumen yang ada (Kurikulum Program Diploma IV dan Sarjana (S1) IPDN), seharusnya bukan hanya memuat

kumpulan mata kuliah dari setiap program studi tetapi juga menuangkan komponen-komponen lainnya seperti yang disyaratkan pada ketentuan Undang-Undang tersebut. Dimana dalam dokumen kurikulum minimal memuat 4 landasan baik landasan filosofis, psikologi, sosiologi dan historis yang akan menjadi acuan langkah gerak mengapa kurikulum tadi disusun dan dibuat. Dengan dimasukkannya landasan tadi, minimal akan diketahui alasan mengapa IPDN memiliki dua fakultas, mengapa IPDN memiliki beberapa program studi yang bernaung di tiap fakultas.

- e) Mis-interpretasi terhadap konsep pengembangan kurikulum sehingga berdampak pada produk dokumen kurikulum. Pengembangan kurikulum dalam artian selama proses penerapan kurikulum yang ada (implementasi kurikulum) di akhir tahun perlu diadakan evaluasi kurikulum terkait keberadaan kurikulum itu sendiri. Apakah kurikulum yang digunakan dapat diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa, bagaimana dosen pada tiga sistem kurikulum tadi menerapkannya, bagaimana upaya pengembangan dosen dalam mengaplikasikan dan memaknai kurikulum yang digunakan juga perlu untuk dievaluasi, bagaimana konten keilmuan yang terdapat di dalamnya apakah masih relevan dengan perkembangan jaman. sehingga pengembangan kurikulum bukan hanya sebatas perbaikan GBPP/SAP yang selama ini diterapkan di IPDN sebagai refleksi dari pengembangan kurikulum yang ada.

Berdasarkan amanah Undang Undang bahwa dua tahun setelah terbitnya Undang- Undang nomor 12 tahun 2012, setiap perguruan tinggi wajib seyogyanya menyesuaikan kurikulum sesuai panduan penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh Ristek Dikti yang di dalamnya juga memuat KKNI. Tetapi dari hasil data di lapangan, kurikulum yang terdapat di IPDN belum melakukan proses penyesuaian seperti yang diberikan panduan Dikti. Dimana dengan tidak mengikuti ketentuan yang telah disarankan oleh Dikti berdampak pada penyiapan pangkalan data yang seharusnya sudah dapat dilakukan sejak tahun 2012.

Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, dari Kemenristek Dikti sudah dijelaskan bahwa perubahan kurikulum di Perguruan Tinggi merupakan

aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Permasalahan yang sering timbul di kalangan akademisi adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang masih sangat beragam baik antar program studi sejenis maupun antar perguruan tinggi.

Baru pada tahun 2019 kurikulum IPDN mengalami perkembangan dan didasarkan pada pengembangan kurikulum seperti yang dicontohkan pada panduan penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi era 4.0 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama KKNI.

Berdasarkan sebaran mata kuliah yang ada seperti tercantum pada tabel 4.3., IPDN sebagai pendidikan vokasi juga belum menunjukkan ciri khas pendidikan vokasinya secara nyata. Dengan ketidakjelasan kualifikasi lulusan pendidikan ini akan membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan khususnya IPDN dapat menjadi turun. Menurut tim dari belmawa (2014), ketidakjelasan kualifikasi akan menyebabkan: a). Disparitas mutu lulusan pada jenjang pendidikan yang sama; b). Ketidaksetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) untuk program studi yang sama.

Kurikulum dapat diartikan rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan. Secara umum kurikulum dapat diartikan sebagai kumpulan mata kuliah. Namun demikian sebenarnya kurikulum mempunyai posisi strategis dan merupakan komponen penting dalam dunia pendidikan meski keberadaannya kadang terabaikan. Dari kurikulum diketahui deskripsi visi, misi dan tujuan pendidikan sebuah bangsa khususnya lembaga

pendidikan di IPDN, karena melalui kurikulum diketahui sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik dalam hal ini mahasiswa (praja).

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut di atas menunjukkan bahwa baik Fakultas Politik Pemerintahan maupun Fakultas Manajemen Pemerintahan apapun program studinya selama 8 (delapan) semester mata kuliah yang diajarkan sama yaitu mata kuliah institusi, dan baru semester 6 (enam) masuk pada mata kuliah Fakultas meski persentasenya kecil dan baru di semester 7 (tujuh) diajarkan mata kuliah yang berhubungan dengan program studi masing-masing. Pada semester 8 semua masuk mata kuliah institusi . Secara rinci persentase mata kuliah dan jumlah SKS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4

Persentase Mata Kuliah dan Jumlah SKS

Fakultas	Prodi	Σ MK	Σ SKS (SMT)	% SKS Institusi	% SKS Fakultas	% SKS Prodi
Politik Pemerintahan	1. Politik Pemerintahan	56	150	107 (71,3 %)	18 (12 %)	25 (16,6 %)
	2. Pembangunan dan Pemberdayaan	56	150	107 (71,3 %)	18 (12 %)	26 (17,3 %)
Manajemen Pemerintahan	1. Adminduk Capil	57	150	107 (71,3 %)	15 (10 %)	26 (17,3 %)
	2. Keuangan Daerah	57	148	107 (72,3 %)	15 (10,1 %)	24 (16 %)
	3. MSDM	56	148	107 (72,3 %)	15 (10,1 %)	26 (17,6 %)

Sumber : Diolah dari Peraturan Rektor IPDN No. 423-5-764 Tahun 2013

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mata kuliah institusi mendominasi materi perkuliahan program D4 IPDN rata-rata sebesar 71 % disusul mata kuliah prodi rata-rata 16 % baru disusul mata kuliah fakultas. Hal tersebut

menunjukkan bahwa hanya sedikit perbedaan keahlian yang dimiliki lulusan dari masing-masing program studi yang berbeda.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Gambaran Kurikulum IPDN Ditinjau Dari Teori Miller dan Seller

Untuk mendeskripsikan kurikulum IPDN penulis menggunakan model Miller & Seller yang mengkombinasikan model Transmisi (Gagne) dan model transaksi (Taba's dan Robinson) dengan tahapan (1) klarifikasi orientasi, (2) pengembangan tujuan, (3) Identifikasi Model Mengajar/Strategi Mengajar, (4) implementasi kurikulum. Selengkapnya diuraikan di bawah ini.

A. Klarifikasi Orientasi Kurikulum

Klarifikasi orientasi kurikulum merefleksikan pandangan filosofis, psikologis dan sosiologis kurikulum yang dikembangkan. Atas dasar orientasi ini kurikulum selanjutnya dikembangkan menjadi pedoman pembelajaran, diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan dievaluasi.

Landasan filosofi pembentukan kurikulum IPDN yaitu mencetak kader pemerintahan yang bercirikan memiliki jiwa dan semangat kenegarawanan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berwawasan nusantara, berkode etik, dan berpijak pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta sesuai dengan tata nilai pengembangan lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang tercermin pada Pola Ilmiah Pokok IPDN yaitu: "Pola pengembangan keilmuan berbasis riset, teori, konsep, dan praktek pemerintahan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan ideal. Hal tersebut menunjukkan bahwa IPDN merupakan perekat dan pemersatu bangsa dalam membangun negara

agar menjadi bangsa yang besar dan mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis yang dengan Prof. Dr.Ermaya Suradinata, SH. MH, MS di ruang kerjanya IPDN Jatinangor pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019

Roh filosofi IPDN pemersatu dan perekat bangsa Indonesia. Materi yang berhubungan dengan itu adalah idiologi PS, kewarganegaraan geopolitik dan geostrategi sebagai alat pemersatu perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan perekat nusantara agar punya wawasan nasional. Kemudian lulusan ditempatkan di daerah supaya menghormati kearifan lokal guna membangun bangsa yang besar yang mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia . Itulah pentingnya IPDN yang semula APDN, STPDN, kemudian dirubah menjadi IPDN karena tuntutan kebutuhan masyarakat bahkan kebutuhan pemerintah maka IPDN perlu diperbesar wadahnya untuk mengelola pendidikan kepomongan tapi tetap punya roh sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Landasan filosofis ini menjadi dasar penentuan landasan psikologis. Dengan menerapkan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum diharapkan pendidikan yang dilaksanakan relevan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian bahan/materi yang diberikan/dipelajari maupun penyampaian dan proses belajar.

Landasan psikologis kurikulum mendasari bagaimana individu itu belajar sehingga terjadi perubahan tingkah laku baik dari segi kognitif afektif dan psikomotorik. Dari visi dan misi lembaga menunjukkan bahwa landasan psikologis kurikulum IPDN terlihat pada aplikasi kurikulum dalam tiga domain yaitu pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang dikenal dengan tri tunggal terpusat. Dari tiga domain tersebut diharapkan lulusan tidak hanya mempunyai pengetahuan tentang kepomongprajaan tetapi juga mempunyai keterampilan dalam mengelola pemerintahan dengan dilandasi oleh sikap dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Landasan sosiologis dan sosial budaya dalam pengembangan kurikulum bahwa kurikulum dipandang sebagai rancangan pendidikan. Artinya bahwa melalui pendidikan diperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai untuk hidup, bekerja serta mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Berbagai

kehidupan masyarakat dan karakteristik budaya dapat dijadikan acuan dalam pendidikan. Kebudayaan merupakan bagian penting dalam pengembangan kurikulum, karena kurikulum pada dasarnya mengakomodir aspek sosial budaya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH. MH, MS di ruang kerjanya IPDN Jatinangor pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 bahwa :

Praja harus punya landasan sebagai pamong yang mengenal identitas sosial dari masyarakat. Maka dari itu, kurikulum harus memiliki penanaman nilai dasar melalui matakuliah pengantar geopolitik dan geostrategi.”

Penanaman nilai-nilai dasar di IPDN dilakukan melalui metode Among Asoh, yaitu metode yang mengacu kepada ajaran Ki Hajar Dewantara yang meliputi :

1. Ing Ngarsa Sung Tulada, yang berarti bahwa menjadi pemimpin hendaknya bisa memberi teladan/ccontoh
2. Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti mampu menumbuhkan kehendak
3. Tut Wuri Handayani yang berarti selalumengikuti danmemberi dorongan/semangat

Orientasi kurikulum menurut Miller Sellar menyangkut 6 (enam) aspek yaitu : tujuan pendidikan, pandangan tentang anak, pandangan tentang proses belajar mengajar, pandangan tentang lingkungan, pandangan tentang peranan guru dan evaluasi belajar. Selengkapny penulis uraikan di bawah ini.

1. Tujuan pendidikan yakni menyangkut kegiatan pendidikan. Dalam artian akan dibawa kemana peserta didik tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Renstra IPDN 2015-2019 bahwa tujuan pendidikan IPDN adalah mencetak kader pemerintahan yang profesional, berkepribadian dan berkarakter untuk mengelola masalah terkait politik pemerintahan, manajemen pemerintahan dan hukum tata pemerintahan pada pemerintahan daerah. Untuk menciptakan kader yang profesional maka IPDN menyelenggarakan pendidikan melalui tiga domain yang dikenal dengan tri tunggal terpusat yaitu pengajaran,

pelatihan dan pengasuhan, dimana pelatihan dan pengajaran berada dibawah fakultas sementara pengasuan dikelalo bagian pengasuhan. Adapun porsi pengajaran dan pelatihan waktunya dari jam 0730 s.d. 17.00 dan di luar jam tersebut porsi pengasuhan.

2. Pandangan tentang anak, apakah anak dipandang sebagai organisme yang aktif atau pasif.

Untuk melihat pandangan lembaga terhadap peserta didik sebagai organisme yang aktif atau pasif dapat dilihat dari :

- a. Proses penyusunan kurikulum

Selama ini dalam menyusun kurikulum, lembaga (IPDN) belum pernah melibatkan peserta didik. Peserta didik sudah dihadapkan pada sejumlah matakuliah dan besaran SKS yang harus dilalui dalam 8 semester. Hal ini senada dengan hasil kuesioner yang penulis sebarakan secara bebas kepada dosen menunjukkan hasil 66,7 % menjawab bahwa dalam penyusunan kurikulum tidak perlu melibatkan peserta didik dan 33,3 menyatakan perlunya melibatkan peserta didik dalam menyusun kurikulum. Memang seyogyanya akan lebih baik manakala peserta didik dilibatkan dalam penyusunan kurikulum minimal ada perwakilan dari mahasiswa semester 6/7 untuk medeskripsikan kemampuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan agar sesuai dengan kondisi psikologis peserta didik.

- b. Dalam kegiatan belajar mengajar dapat dilihat dari RPS/SAP/GBPP yang dijadikan sebgai acuan dosen dalam mentransformasikan ilmunya. Dari segi metode mengajar yang dituangkan dalam RPS/SAP/GBPP yang ada menunjukkan bahwa mayoritas metode yang digunakan adalah ceramah., diskusi dan tanya jawab. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan bahwa dosen lebih banyak menggunakan metode diskusi yaitu sebesar 54,5 %, yang memilih ceramag sebanyak 27,3 % yang memilih tanya jawab 9,1 % dan tidak ada satu pun yang memilih brain storming. Hal ini menunjukkan bahwa dosen kurang mengeksplor kemampuan siswa. Bahkan dalam kontrak belajar banyak dosen yang tidak menyampaikan materi yang akan dicapai selama 1 semester. Hal ini didasarkan dari hasil kuesioner yang

masuk menunjukkan bahwa 95,5 % dosen tidak menyampaikan keseluruhan materi yang akan dicapai selama satu semester pada saat kontrak belajar di awal perkuliahan, dan 0,5 % menjawab ya. Padahal dengan menyampaikan rangkaian materi ajar di awal perkuliahan pada saat kontrak belajar dapat dijadikan patokan bagi peserta didik untuk mempersiapkan materi sebelum perkuliahan (untuk anak yang memang ingin belajar hal tersebut suka dilakukan) sehingga ketika di kelas sudah ada bayangan materi apa yang akan dibahas. Kontrak belajar yang disampaikan di awal perkuliahan biasanya sebatas tata tertib dan sistem penilaian yang digunakan.

3. Pandangan tentang proses belajar mengajar, dalam hal ini apakah proses pembelajaran dianggap sebagai transformasi ilmu pengetahuan atau mengubah perilaku anak. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa selama ini proses belajar mengajar lebih dilihat sebagai transformasi ilmu pengetahuan dari pada merubah perilaku anak. Hal ini terlihat dari metode yang digunakan, materi yang diajarkan maupun dari segi soal-soal yang diujikan. Soal yang diujikan masih mayoritas pada tingkat pengetahuan sesuai apa yang dirumuskan dalam TPK sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.7.
4. Pandangan tentang lingkungan. Dalam hal ini apakah lingkungan belajar dikelola secara formal atau dikelola secara bebas yang memungkinkan peserta didik bebas belajar. Jika dilihat dari lembaganya, maka pengelolaan lingkungan belajar dilakukan secara formal. Hal ini terlihat dari susunan jadwal kegiatan baik kegiatan perkuliahan, pelatihan maupun pengasuhan. Semua disusun secara sistematis dan terintegrasi meski kadang masih ada satu, dua yang masih berbenturan. Benturan tersebut terjadi di awal-awal perkuliahan yang disebabkan oleh adanya pergantian/perubahan jadwal dari dosen yang bersangkutan.
5. Konsepsi tentang peranan guru, dalam hal ini apakah guru/dosen harus berperan sebagai instruktur yang bersifat otoriter atau sebagai fasilitator yang siap memberikan bantuan kepada anak untuk belajar.

Peran guru/dosen sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan lulusan. Adanya perubahan tingkah laku peserta didik salah satunya ditentukan oleh peran guru/dosen. Tujuan pendidikan adalah adanya perubahan tingkah laku. Maka sudah selayaknya apabila guru/dosen tidak hanya berperan mentransfer ilmu atau menyuruh mahasiswa untuk belajar saja namun juga berperan sebagai fasilitator yang mampu merubah tingkah laku siswa. Di IPDN kebanyakan dosen berperan sebagai fasilitator hal ini sesuai dengan hasil jawaban responden yang menjawab bahwa peran guru/dosen sebagai fasilitator sebanyak 81,8 % dan 18,2% menjawab sebagai instruktur

6. Evaluasi belajar, untuk menentukan keberhasilan belajar ditentukan dengan tes atau non-tes.

Tujuan utama belajar adalah berhasil dalam belajar. Keberhasilan belajar sering diidentikkan dengan kemampuan mahasiswa menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru/dosen yang outputnya berupa nilai. Untuk memberikan nilai keberhasilan siswa/peserta didik/mahasiswa dapat dilakukan melalui tes maupun non-tes. Secara formal di IPDN untuk mengukur keberhasilan mahasiswa IPDN ditentukan melalui tes. Hal ini terlihat bahwa nilai siswa ditentukan oleh tes-tes seperti nilai Ujian Tengah Semester, nilai Ujian Akhir Semester. Hal ini pun ditegaskan pula dengan hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa responden yang menjawab alat evaluasi yang paling sering digunakan adalah tes sebanyak 72,7 % dan 27,3 % menggunakan alat evaluasi dalam bentuk non tes.

Menurut Miller ada 3 (Tiga) orientasi dalam kurikulum yaitu orientasi transmisi, orientasi transaksi dan orientasi transformasi.

1. Orientasi transmisi

Orientasi transmisi ini menekankan pada isi atau materi ajar. Isi materi bersumber pada disiplin ilmu yang terstruktur/sistematis. Guru berfungsi sebagai pengarah langsung dan penyampai ilmu, teknologi dan nilai. Maka dari itu guru harus menguasai materi ajar dengan baik dan siswa sebagai penerima

materi . maka proses belajar terjadi secara ekspositori dan evaluasi pembelajaran menggunakan tradisional achievement seperti tes, uraian, multiple objective.

Jika melihat penjelasan tersebut orientasi transmisi memandang bahwa peran guru sangat penting dalam pembelajaran. Karena sebagai pengarah ilmu yang mengarahkan peserta didik mau dibekali kemampuan dan keterampilan serta nilai-nilai apa sesudah menyelesaikan perkuliahan. Untuk itu diperlukan guru/dosen yang profesional dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Namun demikian jika melihat latar belakang tingkat keprofesionalan tenaga pendidik di IPDN masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari jumlah dosen yang ada belum mencukupi standar ketercukupan dalam hal keprofesionalan dosen dengan kesesuaian mata kuliah. Dari 211 jumlah dosen yang ada, yang bersertifikasi 87 orang yang belum bersertifikasi 124 orang. Jenis sertifikasi dosen IPDN periode 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5

Data Jenis Sertifikasi Dosen IPDN Tahun 2019

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ilmu Administrasi	12	} 24
2.	Ilmu Administrasi Negara	5	
3.	Ilmu Administrasi Publik	1	
4.	Ilmu Administrasi (Publik,Negara)	2	
5.	Ilmu Adm. Keuangan Daerah	1	
6.	Ilmu Adm.Keuangan	3	
7.	Ilmu Pemerintahan	16	
8.	Ilmu Kebijakan Publik	1	
9.	Ilmu Ekonomi	3	
10.	Ilmu Ekonomi Pembangunan	1	
11.	Ilmu Hukum	4	
12.	Ilmu Manajemen	11	
13.	Ilmu Politik	1	
14.	Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra	2	
15.	Ilmu Sosiologi	5	
16.	Ilmu Sosial Politik	1	
17.	Ilmu Perpajakan	1	

18.	Ilmu Studi Pembangunan	1	
19.	Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian	1	
20	Ilmu Teknik Pertanian	1	
21	Ilmu studi Masyarakat Islam	1	
22	Ilmu Masyarakat Islam	1	
23	Ilmu Pembangunan	1	
24	Ilmu Komunikasi	1	
25	Ilmu Pendidikan Agama Hindu	1	
26	Ilmu Sastra dan Bahasa	1	
27	Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris	1	
1	2	3	4
28	Ilmu Teknik Lingkungan	1	
29	Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris	1	
30	Ilmu Metode Penelitian Sosial	1	
31	Ilmu Teknik dan Manajemen Industri	1	
32	Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota	1	
33	Ilmu Perencanaan Pengembangan dan Kebijakan	1	
	Jumlah	87	

Sumber : SK Rektor No. 426-61/2019

Data tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat kepakaran/serifikasi didominasi ilmu Administrasi, ilmu Pemerintahan dan ilmu Manajemen, meski dalam ilmu administrasi terbagi dalam beberapa spesifikasi seperti administrasi negara, publik, niaga keuangan. Hal itu menunjukkan bahwa dosen yang telah bersertifikasi menunjukkan keberagaman. Meskipun demikian belum semua mata kuliah ada dosen yang tersertifikasi. Untuk itu ke depan dalam rangka menyiapkan dan memenuhi standar kebutuhan dan standar mutu lulusan akan lebih baik jika penerimaan/pengkaderan dosen lebih diutamakan dari jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan di IPDN sehingga tidak menumpuk pada sertifikasi tertentu. Dari 87 dosen yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi disebar pada sejumlah prodi dan fakultas yang ada di IPDN. Persebaran dosen dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 4.6

Data Dosen IPDN Tahun 2019

No.	Fakultas/Prodi	Jumlah Dosen	Bersertifikasi	Belum	Dasar/Keterangan Sertifikasi
1.	Politik Pemerintahan	108	45	63	
	a. Prodi Kebijakan Publik	15	7	8	SK Rektor No. 426-61/2019 1 ilmu adm, 5 ilmu pemerintahan 1 ilmu kebijakan Publik
	b. Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan masyarakat	49	27	22	SK Rektor No. 424-60/2019 4 Ilmu Administrasi 1 Ilmu Studi Pembangunan 1 ilmu Sosek Pertanian 5 Ilmu Sosiologi 1 Pend. Bhs & Sastra Indonesia 1 Ilmu Ekonomi 1 Ilmu Adm Keuda 1 Studi Masy Islam 6 Ilmu Manajemen 1 Ilmu Ekonomi Pembangunan 1 Teknik Lingkungan 1 Ilmu Sosial Politik 1 Ilmu Tek. Pertanian 1 Ilmu Komunikasi
	c. Prodi Politik Indonesia Terapan	44	11	33	SK Rektor No 424-59 Tahun 2019 5 Ilmu Pemerintahan 2 Ilmu Administrasi 2 Ilmu Hukum 1 Ilmu Politik 1 Pend. Bhs dan Sastra Indonesia
2	Manajemen Pemerintahan	103	42	61	
	a. Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik	32	14	18	SK Rektor No. 424-57 Tahun 2019 4 Ilmu Administrasi 4 Ilmu Adm. Negara 1 Ilmu Manajemen 2 Ilmu Pemerintahan 1 Pend. Agama Hindu 1 Ilmu Sastra & Bahasa 1 Ilmu Pend. Bhs Inggris
	b. Keuangan Publik	35	13	22	SK Rektor No. 424-56 Tahun 2019 5 Ilmu Manajemen 3 Ilmu Adm.

					Keuangan 2 Ilmu Pemerintahan 1 Ilmu Ekonomi 1 Ilmu administrasi 1 Ilmu Perpajakan
	c. Administrasi Pemerintahan Daerah	20	9	11	SK Rektor No. 424-55 Tahun 2019 2 Ilmu Adm. Neg. Pubik 2. Ilmu Hukum 2 Ilmu Pemerintahan 1 Ilmu Adm. Negara 1 Ilmu Ekonomi 1 Ilmu Adm. Publik
	d. Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan	16	6	10	SK Rektor No. 424-58 Tahun 2019 1 Ilmu Metlitsos 1 Ilmu Teknik dan Manajemen Industri 1 Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota 1 Ilmu Perencanaan Pengembangan Kebijakan 1 Ilmu Masyarakat Islam 1 Ilmu Pembangunan
	Total	211	87	124	

Sumber :SK Rektor No. 426-61/201

Orientasi transmisi ini juga menekankan isi/materi ajar. Hal ini menunjukkan bahwa di IPDN kurikulumnya berorientasi Transmisi. Hal ini dibuktikan dengan telah disiapkan beberapa mata kuliah beserta materi-materi yang akan disuguhkan kepada peserta didik/mahasiswa/praja di masing-masing fakultas.

2. Orientasi transaksi

Dalam orientasi ini antara kurikulum dan siswa saling memberi pengaruh. Individu dipandang sebagai seseorang yang rasional dan memiliki kemampuan intelegensi untuk menyelesaikan masalah. Pendidikan dipandang sebagai dialog antara siswa dengan kurikulum dimana siswa membangun pengetahuan melalui proses dialog karena siswa dipandang mempunyai kemampuan untuk berfikir. Inti dari orientasi transaksi ini terletak pada strategi kurikulum yang membantu pemecahan masalah. Aplikasi keterampilan memecahkan masalah di dalam konteks sosial dan di dalam konteks proses demokratik dan

pengembangan keterampilan kognitif di dalam berbagai disiplin akademis. Paradigma filsafat ilmiah merupakan metode ilmiah yang dipakai dalam orientasi transaksi ini. Pusat orientasi transaksi ini adalah ide yang diambil dari psikologi perkembangan dimana siswa harus diberi kesempatan menyelidiki dunia fisik, moral, dan sosial. Lingkungan belajar, harus kaya dengan beragam materi dan ide sehingga memungkinkan penyelidikan terhadap problem yang bervariasi (Miller & Seller: 1985: 62-114

Orientasi transaksi ini menekankan adanya hubungan timbal balik antara kurikulum dan peserta didik/mahasiswa. Hal ini tidak terjadi di IPDN karena siswa sudah disuguhkan berpuluh-puluh mata kuliah yang harus diselesaikan. Dan Peserta didik di sini tidak ada pengaruh sama sekali. Selain tidak diikuti dalam penyusunan kurikulum apapun output yang dihasilkan tidak merubah kurikulum yang ditetapkan. Hal ini terlihat bahwa di IPDN telah dua kali perubahan statuta yaitu tahun 2009 dan tahun 2016 namun tidak ada perubahan mata kuliah. Jika kurikulum diartikan sebagai daftar mata kuliah hal ini terlihat pada tabel 4.3. yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor IPDN No. 423-5-764 Tahun 2013

3, Orientasi transformasi

Dalam orientasi transformasi ini, kurikulum dan siswa saling menyentuh (interpenetrate) secara holistik. Transformasi ditujukan pada pengembangan pribadi dan perubahan sosial, sehingga dikembangkan pola hubungan yang dekat antar individu dan masyarakat. Untuk mendukungnya, secara spesifik, model ini menekankan pada pengajaran berbagai keahlian untuk memajukan transformasi pribadi dan sosial, visi perubahan sosial sebagai perkembangan yang harmonis dengan lingkungan, dan hubungan dimensi spiritual dengan lingkungan (orientasi transpersonal). Teori pendidikan yang digunakan adalah pendidikan progresif dan romantik, dengan model kurikulum humanistik.

Orientasi ini didasarkan pada dua pemikiran, yaitu: (1). Elemen romantik yang menghasilkan argumen bahwa anak pada dasarnya bagus dan pendidik

harus memungkinkan potensi alami anak untuk berkembang dengan sedikit campur tangan. (2) orientasi perubahan sosial yang berargumen bahwa pendidik harus mengambil pandangan kritis yang lebih terhadap peran sekolah dalam masyarakat sehingga sekolah tidak sekedar tertarik secara ekonomi, tetapi juga berperan dalam perubahan sosial politik. Transformasi beranggapan bahwa pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu mengaktualisasikan diri (Miller & Seller:1985: 117-141).

Orientasi transformasi yang dibangun di IPDN ditinjau dari teori Miller & Seller adalah sebagai berikut :

1. Elemen Romantik, yang beranggapan bahwa anak pada dasarnya bagus dan untuk memungkinkan berkembang cukup dengan campur tangan yang sedikit. Jika melihat dari implementasi kurikulum secara keseluruhan di IPDN dan disandingkan dengan teori ini menunjukkan peristiwa yang bertolak belakang, Dimana input (dalam hal ini praja) secara umum baik, karena untuk lolos seleksi menjadi praja melalui tes yang bertingkat-tingkat. Apalagi di era transparansi seperti saat ini dimana dalam penerimaan dilakukan secara on line dan IPDN hanya tahu siapa yang diterima setelah diumumkan dari panitia. Namun setelah diterima menjadi praja siklus kehidupannya telah diatur sedemikian rupa dari bangun pagi sampai bangun pagi lagi. Selama 24 jam terbagi dalam tiga kegiatan yang wajib diikuti dan ditaati sesuai dengan Permendagri No. 63 Tahun 2015 Tentang Tata Kehidupan Praja IPDN. Dalam melaksanakan tugas sebagai praja IPDN selama 24 jam dimonitor dan diawasi oleh petugas yang berada di bawah Kepala Bagian Pengasuhan yang disebut dengan istilah pengasuh yang tugasnya membangunkan praja dari tidur, mengawas aerobik, mengawas makan, mengawas perkuliahan dan pelatihan, mengawas belajar dan mengawas tidur. Termasuk mengecek kelengkapan dan kerapihan wisma yang ditempati juga dalam berpindah tempat dan berpakaian. Dilihat dari sisi umur yang rata-rata 17 s.d 22 masuk dalam kategori remaja menuju dewasa. Dimana masa-masa usia ini sudah

selayaknya diperlakukan secara dewasa sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya agar muncul ide, inovasi dan kreativitas atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dibarengi dengan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas serta sarana yang mendukung. Sarana yang dimaksud adalah sarana yang berkaitan dengan siklus kehidupan praja dengan memanfaatkan teknologi yang terkoneksi di semua lini salah satunya melalui finger prin untuk semua kegiatan wajib praja. Selain menimbulkan tanggung jawab karena adanya waskat secara tidak langsung juga menunjang objektivitas penilaian terhadap praja. Juga berfungsi proteksi baik bagi praja maupun lembaga. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Prof. Dr.H. Ermaya Suradinata,SH, MH,MS yang menyatakan bahwa :

Transformasi kurikulum dasarnya harus kuat. Kalau tidak kuat tidak ada pijakan. Basiknya adalah perekat persatuan melalui bhineka tunggal ika, demokrasi, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan karakter bangsa Indonesia agar terus kontinu dan tidak bubar. Banyak dosen kita ketinggalan oleh karena itu harus banyak beajar tentang perkembangan, curren isu, jangan materi itu-itu saja. Karena ilmu terapan doktor juga terapan. Dosen pelatih harus mempunyai bangunan karakter bangsa. Dalam hubungannya dengan RI 4.0 Infrasturktur IPDN masih lemah yaitu hardwarenya. Orang banyak masuk IPDN karena ada jaminan PNS tapi kualitas.menjadi beban kita bersama. Maka praja kita harus sudah pakai android tetapi jangan sampai praja terkungkung dan akhirnya curi-curi. Tinggal peran pengasuh dan aturan penggunaan yang jelas

2. Orientasi Perubahan Sosial

Argumen orientasi ini bahwa pendidik harus mengambil pandangan kritis yang lebih terhadap peran sekolah dalam masyarakat sehingga sekolah tidak sekedar tertarik secara ekonomi, tetapi juga berperan dalam perubahan sosial politik. Implementasi kurikulum IPDN pada orientasi perubahan sosial terhadap peran sekolah terhadap masyarakat diwujudkan melalui kegiatan praja menjelang akhir tahun pada masing-masing tingkatan dalam bentuk praktek lapangan sebagai berikut :

- a. Untuk praja tingkat I wajib mengikuti Praktek Lapangan I
- b. Untuk praja tingkat II wajib mengikuti Praktek Lapangan II;
- c. Untuk praja tingkat III wajib mengikuti Praktek Lapangan III
- d. Untuk praja tingkat IV wajib mengikuti magang dan Bhakti Karya Praja (BKP) atau Latsitarda Nusantara

Melalui latihan-latihan tersebut harapannya praja secara langsung belajar berbagai perubahan sosial politik yang terjadi di masyarakat secara langsung. Ke depannya ketika terjun ke masyarakat tidak canggung lagi menghadapi hal serupa dalam posisinya sebagai pelayan masyarakat. Disamping itu, melalui praktek lapangan ini dosen bisa memanfaatkannya untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Orientasi perubahan sosial pun sebenarnya bisa terjadi disebabkan adanya pengaruh Revolusi Industri RI 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital. Adanya kemajuan teknologi tersebut belum secara maksimal digunakan IPDN dalam kegiatan pembelajaran hal ini terlihat bahwa belum semua ruang kuliah difasilitasi dengan wifi. Maka dari itu agar proses pembelajaran lebih mudah dalam menyelaraskan dengan perubahan sosial dipandang perlu adanya fasilitasi wifi di lingkungan kelas. Dari responden yang mengisi kuesioner secara bebas terdapat hasil bahwa 81,8 % responden memandang perlunya fasilitasi wifi di sekitar ruang kelas dan 13,6 menjawab belum/tidak perlu fasilitasi wifi di sekitar ruang kelas.

4.3.1.2 Pengembangan Tujuan

Setelah orientasi kurikulum kemudian pengembangan tujuan baik bersifat umum maupun khusus. Tujuan umum mencerminkan gambaran peserta didik dan gambaran masyarakat. Gambaran ini harus jelas dirumuskan. Setiap tujuan umum harus dijabarkan dalam program-program yang ditujukan kepada murid dalam berbagai tingkat perkembangan. Menurut Miller dan Seller, 1985 :226-227) bahwa tujuan mempunyai tiga tingkatan yaitu (1) tujuan tanggung jawab sosial, (2) tujuan yang bersifat pengembangan siswa mengenai lapangan pembangunan

masyarakat dan berpartisipasi dalam pengembangan proyek, (3) tujuan instruksional, siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam proyek-proyek pembangunan masyarakat.

Teori tersebut menunjukkan bahwa dalam kurikulum terdapat tujuan yang dikembangkan, baik tujuan umum (TIU) maupun tujuan khusus (TPK) yang merupakan kegiatan dari tujuan intruksional. Keduanya terdapat dalam GBPP, dimana tujuan intruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum sehingga lebih spesifik dan tingkat ketercapaiannya mudah diukur karena menggunakan kata kerja operasional untuk mengukur perilaku peserta didik. Perilaku peserta didik diarahkan pada tiga ranah yaitu kognitif, Affektif dan psikomotorik. Ranah kognitif terdiri dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. Ranah affektif terdiri dari menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan dan internalisasi nilai. Ranah psikomotorik terdiri dari meniru, memanipulasi, melakukan dengan prosedur, melakukan dengan baik dan tepat, melakukan secara alamiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan yang terdapat dalam RPS/GBPP IPDN mayoritas hanya mencakup ranah kognitif dan masih belum mencakup ranah affektif dan psikootorik. Jika kurikulum yang dikembangkan untuk program vokasi maka ranah psikomotorik harus lebih banyak dari ranah kognitif. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7

Pengembangan Tujuan Kurikulum IPDN

No.	Mata Kuliah	TIU/TPU	TIK/TPK	Keterangan
1	Kebijakan Publik	√	√	1. Semua pertemuan capaian TIK masih pada tingkat pengetahuan (C2) dengan kata kunci menjelaskan 2. Belum ada perbedaan antara TP, TU, PB dan

				Subpokok bahasan
2.	Pengantar Ilmu Kependudukan	≠	√	1. 1. Tidak ada TIU 2. Semua pertemuan capaian TIK masih pada tingkat pengetahuan (C2) dengan kata kunci menjelaskan dan mengidentifikasi
3.	Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah	√	√	Semua pertemuan capaian TIK perumusannya masih bersifat umum dengan kata kunci <u>memahami</u> , tidak ada spesifikasi dan belum menunjukkan tingkah laku.
4.	Pengawasan Pemerintahan	√	√	Hampir semua pertemuan capaian TIK masih pada tingkat pengetahuan (C2) dengan kata kunci menjelaskan
5.	Penempatan dan Pengembangan Pegawai	√	√	masih ada beberapa perumusan TIU dan TIK sama sehingga TIK sifatnya masih umum dan belum menunjukkan tingkah laku yang dicapai
6.	Manajemen Konflik dan Kolaborasi	√	√	Tidak ada perbedaan antara TPU dan TPK dan sifatnya masih umum, belum menunjukkan tingkah laku yang dicapai
7.	Politik dan Pemerintahan di Asia Tenggara	≠	√	1. TIU/TPU belum ada 2. TPK/TIK semua bersifat umum dengan kata kunci memahami
8.	Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal	√	√	Hampir semua pertemuan capaian TIK masih pada tingkat pengetahuan (C2) dengan kata kunci menjelaskan
9.	Pancasila	√	√	Belum ada TPU dan TPK

Sumber : Diolah dari GBPP/SAP/RPS IPDN

4.3.1.3 Identifikasi Model Mengajar/Strategi Mengajar

Pada tahap ini pengajar/dosen harus mengidentifikasi strategi mengajar yang akan digunakan dengan menyesuaikan TPU dan TPK. Pertimbangan dalam memilih strategi diantaranya adalah : (1) keseluruhan model sejalan dengan tujuan, (2) struktur model serasi dengan kebutuhan siswa, ada yang menghendaki banyak pengarahan ada yang kurang pengarahan ada yang menghendaki bebas, (3) guru mendapat penataran (*inservice training*) yang menunjang penerapan model, (4) sumber untuk pelaksanaan model tersedia (Miller & Seller, 1985 : 227-228). Untuk melihat strategi mengajar yang digunakan dosen tergambar pada SAP/GBPP atau RPP/RPS yang ditetapkan. Dari sana tergambar model/strategi mengajar yang digunakan seperti ceramah, tanya-jawab, diskusi, inkuiri, diccovery, roll playing. Dalam penerapannya barangkali tidak dilakukan secara murni namun gabungan dari tiga atau dua strategi tersebut. Selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.8

Model/Strategi Mengajar di IPDN

No.	Mata Kuliah	Model/Strategi Mengajar			
		Sesuai dengan TPU/TPK	Sesuai dengan kebutuhan siswa	Dosen sudah memahami model, sudah dilatih strategi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Kebijakan Publik	V	V	V	Ceramah Diskusi
2.	Pengantar Ilmu Kependudukan	V	V	V	Ceramah Diskusi
3.	Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah	V	V	V	ceramah & diskusi
4.	Pengawasan Pemerintahan	V	V	V	ceramah

5.	Penempatan dan Pengembangan Pegawai	V	V	V	ceramah, tanya jawab
6.	Manajemen Konflik dan Kolaborasi	V	V	V	ceramah diskusi
7.	Politik dan Pemerintahan di Asia Tenggara	V	V	V	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, kuis
8.	Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal	V	V	V	Ceramah, Tanya Jawab
9.	Pancasila	V	V	V	Ceramah, Tanya Jawab

Sumber : Diolah dari GBPP/SAP/RPS IPDN

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masih menggunakan model mengajar cara-cara konvensional terlihat dari kuesioner yang menjawab metode yang paling sering digunakan yaitu ceramah, tanya jawab dan diskusi. Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan diskusi 54,5 ceramah 27,3 brain storming 9,1 dari 22 responden yang mengisi kuesioner yang di share.

4.2.2.3. Implementasi Kurikulum

Implementasi merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga berdampak pada perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan berubah. Ada tiga pendekatan umum tentang implementasi yaitu (1) implementasi didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau kejadian peristiwa yang terjadi sebagai suatu kegiatan pengembangan profesional, ketika dokumen dari suatu program dibagikan kepada guru, (2) pendekatan

implementasi yang ditekankan pada proses interaksi antara pengembangan kurikulum dengan para guru, (3) memandang dan mengakui bahwa implementasi sebagai bagian dari komponen kurikulum (Miller & Seller, 1985 :228)

Bentuk implementasi kurikulum di sini dilihat dari kesesuaian materi yang diajarkan dosen dengan materi yang tertera dalam GBPP/SAP atau RPS/RPP, Penentuan urutan materi dalam SAP GBPP atau RPP/RPS ditentukan dari kemampuan awal/dasar mana materi yang harus dikuasai terlebih dahulu oleh mahasiswa sebelum membahas materi yang mempunyai tingkat pemahaman/kesulitan dan kerumitan yang lebih kompleks. Berdasarkan jawaban responden terhadap kuesioner yang penulis sebarakan yang berhubungan dengan pertanyaan dalam menyampaikan materi pembelajaran dilakukan sesuai dengan urutan yang tertuang dalam BGPP sebesar 72,7 % dan yang memilih jawaban dilakukan secara acak sebesar 27,3%. Namun kenyataan menunjukkan bahwa dalam implementasi penerapan kurikulum dari segi urutan materi dilihat dari kartu kendali yang menunjukkan kehadiran dosen dan siswa serta materi yang disampaikan selengkapny dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9

Tingkat Kesesuaian Materi Ajar Dengan Materi Dalam SAP dan GBPP (RPS/RPP)

Mata Kuliah/Dosen	Kesesuaian materi ajar dengan SAP/GBPP (RPS/RPP)														Kesimpulan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kebijakan Publik															
1. A1	V	-	-	-	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-	1/4
2. A2	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	1/12
3. A3	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Materi kososng
4. A4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	acak
5. A5	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TT s.d kolom X
6. A6	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. A7	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X
8. A8	V	V	X	V	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X
9. A9	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X
10. A10	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X
11. A11	V	V	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengantar Ilmu Kependudukan															
1. B1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V
2. B2	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3. B3	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4. B4	V	V	X	X	X	X	X	V	V	X	X	V	V	V	7/14, 3x tugas
5. B6	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	V	V	4/14

6. B7	V	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X	V	-	-	7/12
7. B8	V	V	V	V	X	X	X	V	X	X	X	-	-	-	5/11
8. B9	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X	X	-	-	5/12
9. B10	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	-	-	11/2
Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah															
1. C1	V	X	X	X	X	V	X	X	X	X	X	X	X	X	2/14
2. C2	V	X	X	X	X	V	X	X	X	X	X	X	X	-	2/14
3. C3	V	X	X	V	X	X	X	X	X	X	X				2/12
Penempatan & Pengembangan Pegawai															
1. E1	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1/14
2. E2	V	V	X	X	X	V	X	X	X	X	X	V	V	-	5/13
3. E3	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	-	V/12
Manajemen Konflik dan Kolaborasi															
1. F1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
2. F2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	acak
3. F3	V	X	X	V	V	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X
4. F4	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X	-	8/13
Pancasila															
1. I1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	Tdk jelas ditulis MK
2. I2	V	V	V	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	3/10
3. I3	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	2/13
4. I4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tdk jelas (tugas, lanjutan Teori)
5. I5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. I6	V	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3/11
7. I7	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X	X	7/14
8. I8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9. I9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Sumber : Diolah dari GBPP/SAP dan Kartu Kendali Perkuliahan 2018/2019

Keterangan:

V =urut dan sesuai dengan materi pada GBPP/SAP atau RPS/RPP

X = tidak sesuai

- = kosong/tidak ada pembelajaran

Pembilang = Jumlah kesesuaian urutan materi yang disampaikan dengan GBPP/SAP atau RPS/RPP

Penyebut = Jumlah mengisi perkuliahan

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa GBPP/SAP atau RPS/RPP seolah tidak dijadikan dasar dalam memberikan perkuliahan khususnya dalam menyajikan urutan materi kepada peserta didik. Kalaupun dijadikan sebagai dasar

pemberian materi tingkat konsistensi dosen terhadap urutan materi di SAP/GPPP atau RPP/RPS minim, terkesan yang penting tidak menyimpang dari materi inti yang seharusnya disajikan dalam pembelajaran.

Bentuk lain implementasi kurikulum terlihat dari alat evaluasi yang dibuat dosen apakah sesuai dengan SAP/GBP/RPS yang ditetapkan, meski alat evaluasi yang dibuat seringkali acak dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Hal tersebut disebabkan terbatasnya waktu ujian yang ditetapkan sehingga tidak semua tujuan operasional yang ditetapkan dalam SAP/GBPP/RPP/RPS tidak memungkinkan ditanyakan semua dalam ujian dengan bentuk soal yang beragam. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian soal dengan RPS/GBPP/SAP sesuai dan bentuk soal mayoritas esai. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10

Kesesuaian Soal Ujian dengan RPS/GBPP/SAP

No	Mata Kuliah	Dosen	Bentuk			Kesesuaian dengan RPS			SAP
			Esai	MC	Gab	Sesuai	Tidak	Kurang	
1	Kebijakan Publik	A1	V			V			2014
		A2	V			V			
		A3	V			V			
2.	Pengantar Ilmu Kependudukan	B1	V					V	2014
		B2			V	V			
		B3	V					V	
		B4			V	V			
		B5	V					V	
		B6	V			V			
		B7	V			V			
		B8	V			V			
		B9	V			V			
		B10	V			V			
		B11	V			V			
		B12	V			V			
3.	Hubungan Keuangan								

	antara Pusat dan Daerah								
4.	Pengawasan Pemerintahan	D1	V			V			2013
		D2	V			V			
		D3	V			V			
5.	Penempatan dan Pengembangan Pegawai	E1	V			V			2015
		E2	V			V			
6.	Manajemen Konflik dan Kolaborasi	F1	V			V			2013
		F2	V			V			
		F3	V			V			
7.	Politik dan Pemerintahan di Asia Tenggara	G1	V			V			2013
		G2	V			V			
		G3	V			V			
		G4	V			V			
		G5	V			V			
		G6	V			V			
8.	Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal	H1	V			V			2013
		H2	V			V			
		H3	V			V			
		H4	V			V			
		H5	V			V			
9.	Pancasila	I1	V			V			2014
		I2	V			V			
		I3	V			V			
		I4	V			V			
		I5	V			V			
		I6	V			V			
		I7	V					V	
		I8	V			V			
		I9	V			V			
		I10	V			V			
		I11	V			V			
		I12	V					V	
		I13	V			V			
		I14	V			V			
		I15	V			V			
		I16	V			V			
		I17	V					V	
		I18	V			V			
Jumlah		52	50		2	46		6	

Sumber : Diolah Dari Soal-Soal Ujian Tahun Ajaran 2018/2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas soal yang diujikan yang dijadikan sebagai alat evaluasi dalam bentuk esai. Hal ini senada dengan hasil kuesioner yang terkumpul yaitu sebesar 95,5 % sementara yang gabungan multiple choice dan esai sebesar 4,5 %. Hal tersebut barangkali disebabkan oleh karakteristik pembuatan soal. Dimana proses pembuatan soal dalam bentuk esai (subjektif tes) lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan pembuatan soal dalam bentuk multiple choice (pilihan ganda) . Pembuatan soal dalam bentuk pilihan ganda lebih memerlukan waktu cukup banyak dan lebih sulit. Namun demikian ada keunggulan dari soal bentuk multiple choice atau pilihan ganda dibanding esai. Diantaranya adalah dilihat dari:

- a) Segi keluasan materi soal dalam bentuk pilihan ganda cakupan materinya lebih luas dibanding esai.
- b) Tingkat kesulitan menjawab siswa lebih mudah namun diperlukan pemahaman yang betul-betul dibandingkan dengan esai
- c) Tingkat kemudahan mengoreksi hasil ujian soal bentuk multiple choice lebih mudah dan lebih cepat dibanding esai. Hal ini sangat cocok untuk dosen yang super sibuk karena dengan bentuk ini kita bisa memberdayakan orang lain untuk mengoreksi hanya dengan memberikan kunci jawab dari pada siswa diuji dan sudah dikerjakan akhirnya tidak terkoreksi. Fakta yang terlihat penulis di ruang dosen menunjukkan bahwa hasil ujian yang disampaikan oleh fakultas untuk dikoreksi oleh dosen yang bersangkutan tidak berubah tempat dan posisi sampai dengan kenaikan tingkat. Hal ini menunjukkan hasil ujian itu tidak dikoreksi.
- d) Subjektivitas penilaian rendah dibanding soal esai, karena jawaban jelas.
- e) Keragaman mengeksplor kemampuan lebih banyak mulai dari C1 sd C6 bisa dibuat dalam bentuk multiple choice

Tepat tidaknya kurikulum yang ditetapkan sebuah lembaga pendidikan akan diketahui melalui tingkat kepuasan pengguna lulusan dari perguruan tinggi tersebut. Berdasarkan monitoring alumni melalui survei tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap Etos Kerja alumni IPDN dan dalam rangka pengembangan

kurikulum guna meningkatkan kualitas dan mutu lulusan secara fluktuatif sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan predikat baik. Meskipun dalam survey menunjukkan baik namun berdasarkan wawancara kami terhadap beberapa pengguna alumni di Kemendagri menyatakan bahwa lulusan IPDN kadang menunjukkan eksklusivitasnya dibanding perguruan tinggi lain namun kurang diimbangi dengan eksklusif dalam kemampuan, karena beberapa lulusan dikategorikan masih lemah dalam tataran konsep dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis sangat tertinggal. Bahkan ada yang mengeluhkan bahwa lulusan IPDN masih ada yang kurang memahami microsoft word dan excel. Namun lulusan yang mau membuka diri dan mau belajar guna mewujudkan etos kerja dan tanggung jawab yang dibebankan tinggi dalam beberapa hal lebih unggul sehingga cepat mendapatkan posisi strategis dalam jabatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11

Tingkat Kepuasan Stakeholders Terhadap Lulusan

Tahun	Aspek Survey		Tingkat Kepuasan	Kategori
	Dimensi	Jabatan		
2015	62,125%	-	62,125%	Baik
2016	62,125%	66,34%	64,23%	Baik
2017	68,50%	66,34%	65,89%	Baik
2018	66,375%	83,21%	74,42%	Baik

Sumber : Lakip IPDN 2018

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun menunjukkan perbaikan kualitas lulusan meski kemajuan perbaikan kualitas lulusan tersebut sedikit. Adapun subindikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan stakeholders adalah :

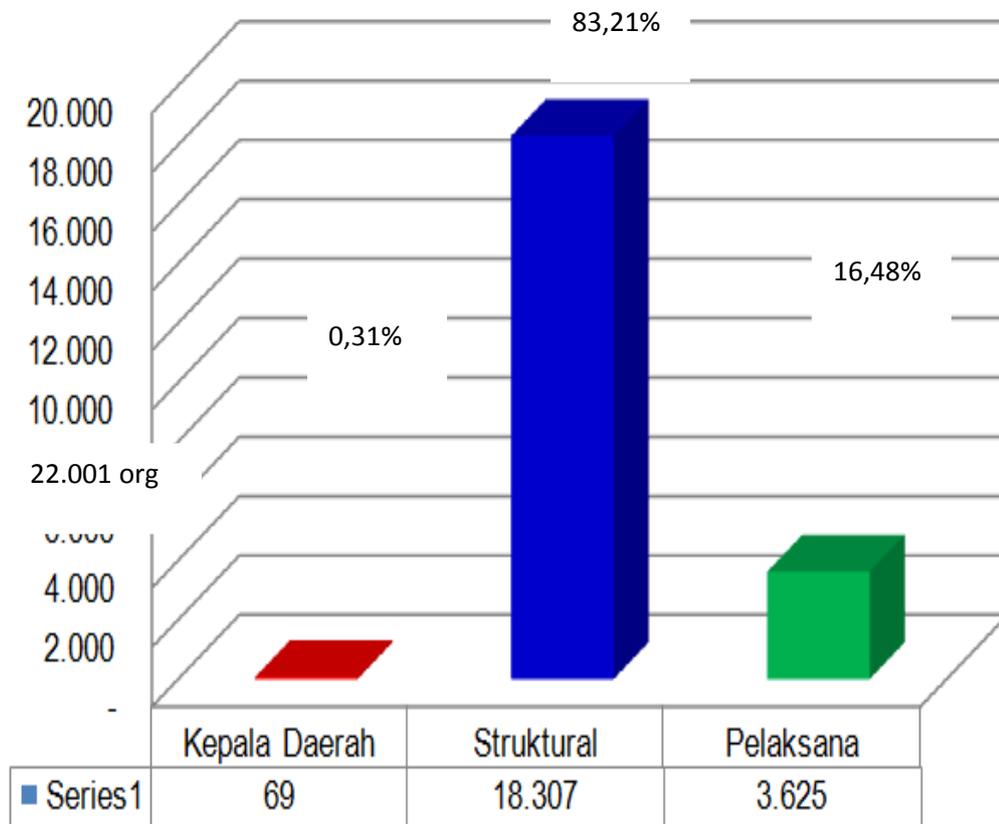
1. Persentase jumlah alumni yang menduduki jabatan kepala daerah dan jabatan struktural di pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil survey dan pengumpulan data alumni, jumlah alumni APDN/STPDN/IPDN yang sudah terpantau per 31 Desember 2018 sejumlah 22.001 orang atau sebesar 83,21% yang tersebar di 34 provinsi NKRI (dari total alumni Angkatan I s.d XXV sejumlah 26.523 orang). Adapun persentase alumni yang menjadi kepala daerah dan pejabat struktural dari data alumni yang sudah tersurvey adalah sebagai berikut:

- Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejumlah 69 orang atau 0,31% menjadi bupati/walikota/wakil;
- Alumni yang mendapat jabatan struktural sejumlah 18.307 orang atau 83,21% meliputi: sejumlah 5 orang menjabat eselon I, sejumlah 2.194 orang (9,97%) menjabat eselon II, sejumlah 6.531 orang (29,69%) menjabat eselon III, dan sejumlah 9.508 orang (43,22%) menjabat eselon IV;
- Alumni yang mendapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Khusus sejumlah 3.625 orang atau 16,48%;
- Alumni Angkatan XXV yang diwisuda tahun 2018 sejumlah 1.456 orang.

Gambar 4.2

Persentase Keberhasilan Alumni APDN/STPDN/IPDN



Sumber : Lakip IPDN 2018

2. Persentase Jumlah Alumni yang Memenuhi Aspek Dimensi Ruang Lingkup Kajian pada Pemerintah Daerah

Pada subindikator ini, tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap etos kerja alumni merupakan perhitungan kumulatif hasil survey di seluruh provinsi yang menjadi lokus penelitian/pengkajian tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 4.12
Kategori Skala Pengukuran Tingkat Kepuasan Stakeholder Terhadap Etos Kerja Alumni

Parameter Bobot Skor Nilai	Predikat Nilai Kajian
1,00 – 1,99	Tidak Baik
2,00 - 2,99	Kurang Baik
3,00 - 3,99	Baik
4,00	Sangat Baik

Bobot Skor	Persentase Tingkat Kepuasan (%)
3,00 – 3,09	60
3,10 – 3,19	62,125
3,20 – 3,29	64,25
3,30 – 3,39	66,375
3,40 – 3,49	68,5
3,50 – 3,59	70,625
3,60 – 3,69	72,75
3,70 – 3,79	74,875

4.3.2 Transformasi Kurikulum Pendidikan Kader Aparatur Era Revolusi Industri 4.0 Program D4 di IPDN

Sebagaimana diketahui bahwa transformasi kurikulum dapat diartikan sebagai perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang dimaksudkan adalah perubahan kurikulum yang terjadi di lembaga pendidikan kader aparatur yang ada di IPDN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di IPDN telah terjadi dua kali perubahan statuta yaitu Statuta IPDN Nomor 36 tahun 2009 dan Statuta IPDN nomor 42 tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dengan adanya perubahan statuta secara tidak langsung menghendaki adanya perubahan kurikulum dikarenakan kurikulum merupakan pengejawantahan dari statuta yang ada.

Dari statuta IPDN 2009 melahirkan kurikulum IPDN yang dituangkan dalam Peraturan Rektor IPDN No. 423-5-764 Tahun 2013. Dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa di IPDN terdapat dua fakultas yaitu Fakultas Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Kedua fakultas tersebut terdapat program D4 dan S1. Sesuai dengan pembatasan masalah maka pembahasannya ini difokuskan pada program D4.

1. Program D4 Fakultas Politik Pemerintahan memiliki 2 Program Studi yaitu :
 - a) Program Studi Politik Pemerintahan jumlah SKS 150 selama 8 semester

- b) Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan jumlah SKS 149 selama 8 semester.
2. Program D4 Fakultas Manajemen Pemerintahan memiliki 3 Program Studi yaitu :
- a) Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jumlah SKS 150 selama 8 semester
 - b) Program Studi Keuangan Daerah jumlah SKS 148 selama 8 semester
 - c) Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur jumlah SKS 148 selama 8 semester

Tuntutan Perpres No. 8 tahun 2012 Tentang Kurikulum KKNI secara tidak langsung IPDN dipaksa untuk melakukan perubahan kurikulum guna menjawab tuntutan perkembangan zaman. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan IPDN dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. guna menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif dan adaptif. Perpres No. 8 tahun 2012 mengamanatkan bahwa setiap Perguruan Tinggi harus mengacu pada standar kurikulum KKNI yang memuat enam parameter utama yaitu ilmu pengetahuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pengetahuan praktis, keterampilan (*skill*), afeksi, dan kompetensi. Enam parameter kurikulum tersebut secara tidak langsung telah tergambarkan/terumuskan dalam SAP dan GBPP atau RPS dan RPP yang dijadikan acuan guru atau dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Dari gambaran SAP dan GBPP atau RPS dan RPP yang dijadikan sebagai dasar untuk mendeskripsikan laporan ini (tabel pengembangan kurikulum di atas) menunjukkan bahwa target pengembangan kurikulum masih berada pada tahap pengetahuan (C2). Hal tersebut terlihat dari kata kunci yang digunakan dalam perumusan TPU/TPK dengan kata menjelaskan dan memahami. Data dukung lainnya adalah berasal dari alat evaluasi yang dipakai untuk mengukur keberhasilan mahasiswa/praja. Tataran soal yang dibuat rata-rata masih pada level pengetahuan. Sementara parameter capaian dan alat ukur yang hendaknya dijadikan sebagai target dan acuan meliputi tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal tersebut mengindikasikan target yang dicapai masih jauh dari

visi lembaga. Untuk itu, diperlukan transformasi kurikulum agar target dan capaian sesuai harapan dari KKNI guna menyongsong Revolusi Industri 4.0.

Untuk menjawab transformasi kurikulum pendidikan pendidikan kader aparatur era Revolusi Industri 4.0 di IPDN ini penulis mengacu pada Kemenristekdikti mengenai Transformasi Pendidikan yang dilihat dari : (1) Alur pembelajaran; (2). Penilaian; (3). Guru/mentor; (4). Standar lulusan dan (5) .orientasi tujuan kelembagaan.

4.3.2.1 Alur Pembelajaran

Alur pembelajaran adalah hal penting yang dibuat seorang guru/dosen sebelum pelaksanaan pembelajaran. Dalam menyusun alur pembelajaran ditentukan oleh 2 hal yaitu kurikulum/silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

a. Kurikulum/silabus

Sebagaimana dibahas di bab sebelumnya menunjukkan sederetan matakuliah yang ditetapkan lembaga melalui Peraturan Rektor. Peraturan Rektor menjadi dasar dalam menyusun surat keputusan penunjukan dosen pengajar, pelatih maupun pengasuh. Kemudian disosialisasikan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar sudah dilaksanakan beberapa kali pertemuan, SK penunjukan dosen baru turun. Dosen selaku pelaksana menjalankan tugas mengajar berdasarkan Keputusan Rektor. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesiapan dosen dalam melaksanakan tugasnya yang seyogyanya sebelum mengajar berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran agar pembelajaran lebih terarah.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Rencana Pembelajaran

Dalam rencana pembelajaran akan terlihat identitas mata pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, menetapkan kegiatan pembelajaran, memilih

sumber belajar dan menentukan penilaian yang semua itu akan lebih baik manakala disusun sesuai dengan kemampuan dan minat/kebutuhan siswa/mahasiswa. Kesemua itu terlihat dalam SAP/GBPP yang sekarang disebut dengan istilah SAP/GBPP atau RPP/RPS.

Setiap dosen/guru harus mampu untuk membuat dan menyusun RPS. Bagi seorang sutradara film, dosen harus mengerti apa yang harus dilakukan di kelas dan mengetahui tujuan dan target pencapaian proses belajar yang diberikannya. Dosen bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga bagaimana mendidik. Dosen juga harus mengetahui bagaimana karakter dan pendekatan pembelajarannya dilakukan. Kenyataan menunjukkan bahwa penyusunan RPP/RPS atau SAP GBPP merupakan salah satu tugas bagian akademik, sehingga dosen ketika awal semester dan telah mendapatkan jadwal/SK mengajar melakukan koordinasi terkait SAP/GBPP atau RPP/RPS di Bagian Akademik. Hal tersebut menunjukkan bahwa menyusun SAP/GBPP atau RPP/RPS bukan menjadi tugas dosen. Meski secara umum berdasarkan kuesioner dosen menyatakan wajib sebanyak 81,8% dan yang menjawab bahwa dosen tidak wajib menyusun SAP/GBPP atau RPP/RPS sebanyak 18,2 %.

SAP/GBPP atau RPP/RPS sebagai dasar petunjuk dan panduan pembelajaran. Sebagai panduan dosen akan mengetahui bagaimana mengelola kelas dengan baik. Dosen harus mampu menjiwai muatan yang terdapat dalam RPS dan menuangkannya dalam bentuk pembelajaran nyata cara dan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Dengan artian dosen harus mampu menjadi manajer, director, motivator, fasilitator. Mengingat mengajar merupakan seni sehingga kemampuan dosen dalam mengelola kelas menjadi satu hal yang sangat penting guna menunjang keberhasilan proses mengajar di kelas, sehingga kemampuan dan kompetensi mereka harus selalu di up-date sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan jaman. Hasil penelitian melalui observasi dan studi dokumen berupa produk RPS/SAP/GBPP menunjukkan bahwa di IPDN tidak semua dosen menyusun

SAP/GBPP atau RPP/RPS dari semua mata kuliah yang menjadi tanggung jawabnya. Namun disusun oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pimpinan kemudian hasilnya dijadikan pedoman oleh dosen/pengajar mata kuliah, sementara berdasarkan pengamatan ada yang menyusun 2-3 matakuliah yang nota bene bukan matakuliah yang diampu bahkan tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Hal tersebut dilakukan karena kondisi yang mendesak dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi. Namun ke depan hendaknya penyusunan SAP/GBPP akan dibenahi sesuai dengan kebutuhan dan visi lembaga. Hal ini sesuai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu pejabat yang mengurus bidang akademik pada bulan Oktober 2019 di depan ruang akademik pukul 16.00, menyatakan bahwa:

“ ...Bahwa penyusunan kurikulum yang saat itu dilakukan salah satunya dilatarbelakangi desakan kebutuhan pemenuhan administrasi dalam rangka pengurusan akreditasi. Ke depan secara perlahan akan diperbaiki”.

Dilihat dari kebaruan SAP/GBPP atau RPS/RPP bahwa SAP/GBPP atau RPS/RPP IPDN menunjukkan tidak semua matakuliah SAP/GBPP atau RPS/RPP nya dibuat setiap tahun terlihat beberapa matakuliah yang diajarkan di tahun 2019 masih menggunakan SAP/GBPP tahun 2013 hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana untuk meng-update SAP/GBPP atau RPS/RPP pertahunnya sebagaimana dikemukakan oleh Staf Bagian Akademik saat wawancara yang dilakukan di depan ruang akademik pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019

“ Bagian akademik setiap tahun melakukan penyusunan SAP/GBPP atau RPP/RPS. Namun tidak dilakukan secara serempak seluruh matakuliah yang diajarkan di IPDN karena keterbatasan dana. Sehingga penyusunan SAP/GBPP atau RPP/RPS dilakukan secara berjenjang sesuai dana yang tersedia. “Dan mengenai orang-orang (dosen) yang ditunjuk untuk menyusun, berdasarkan hasil koordinasi antara akademik dengan fakultas. Fakultas lah yang menunjuk dosen yang harus menyusun karena fakultas

lebih berwenang dan lebih faham latar belakang dari dosen-dosen yang ditunjuk untuk menyusun SAP/GBPP atau RPP/RPS dan Akademik yang menindaklanjutinya.”

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa di tahun 2017 penyusunan SAP/GBPP atau RPP/RPS sebanyak 17 matakuliah. Tahun 2018 berdasarkan Lampiran Peraturan Rektor IPDN Nomor 432.5-553 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 423.5-502 tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan dan Penyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) program DIV semester I dan II IPDN Tahun 2018 sebanyak 121 matakuliah.

Berdasarkan data dokumen yang berupa produk RPS/GBPP/SAP yang berada di lingkungan IPDN serta hasil wawancara dengan pejabat di lingkungan akademik pada hakekatnya hal tersebut dapat dicoba untuk diselesaikan dengan pemanfaatan TPS yang ada di lingkungan IPDN. Seperti dikemukakan penulis di atas, bahwa semua dosen wajib dan harus bisa menguasai penyusunan RPS. Ibarat seorang penjahit mereka harus menguasai bagaimana membuat pola pakain bukan hanya menjahit semata. Di sini pemanfaatan TPS dengan menggunakan pendekatan kolaborasi akan dapat digunakan untuk perbaikan dokumen RPS, program pembelajaran kelas baik itu perencanaan pembelajaran, implemtasi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sehingga kendala terkait penyediaan RPS tidak mesti bergantung pada ketersediaan dana. Bagi pengajar menyusun dan membuat RPS merupakan suatu kewajiban dengan TPS, minimal RPS merupakan sebuah karya dari para dosen yang dipercaya memiliki kompetensi dan pengetahuan terkait dengan mata kuliah yang akan di ajarkan. TPS dapat menjadi kekuatan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan dosen. TPS dapat fungsikan sebagai team teaching, sebelum pemberian materi diberikan kepada mahasiswa. TPS dapat digunakan untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait dengan pengajaran, serta penyiapan media dan pendekatan pengajaran. Sementara dari hasil pengamatan, TPS di lingkungan IPDN belum dimanfaatkan dan

diberdayakan secara maksimal. Padahal sangat memungkinkan sekali pembenahan pengajaran dan pembelajaran di IPDN melalui satu forum ini.

4.3.2.2 Penilaian

Penilaian merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan dalam rangka membuat keputusan pembelajaran berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini penilaian dilakukan secara sistematis dan terencana bahkan jika perlu dilakukan secara terus menerus selama masih dalam rentang waktu penilaian yaitu selama proses pembelajaran. Karena melalui penilaian diperoleh umpan balik baik bagi siswa/mahasiswa dalam hal ini praja maupun guru/dosen/instruktur mengenai (1) pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari, (2) tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar siswa/mahasiswa (praja) dengan standar kompetensi yang ditetapkan; (3) mendiagnosis kelemahan dan keunggulan siswa/mahasiswa (praja) sebagai dasar untuk melakukan pengayaan maupun remedial.

Hasil penelitian menunjukkan penilaian secara terstandar belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut tampak dari proses evaluasi dari penyelenggaraan proses pembelajaran pada tiap semesternya. Terbukti, soal tes pada satu mata kuliah dalam satu TPS tidak seragam dan bervariasi. Belum ada kegiatan terkait dengan evaluasi bobot soal dalam penyelenggaraan tes. Demikian juga dengan standar penilaian. IPDN sudah memberikan format penghitungan penilaian yang dijumlah dari persentase tiap standarnya berupa penjumlahan dari: a) Jumlah kehadiran; b). Tugas terstruktur; c). Nilai UTS dan Nilai UAS secara keseluruhan akan menjadi kumulatif nilai mahasiswa. Meskipun format tersebut belum lama diedarkan namun sudah diaplikasikan oleh beberapa dosen dalam memberikan penilaian.

Akan lebih baik apabila bagian akademik juga melakukan satu kegiatan evaluasi untuk melihat fakta/kenyataan terkait evaluasi melalui proses penilaian saat ini. Minimal standar nilai, dan standar proses penilaian dimasukkan pada

pedoman akademik. Dimungkinkan untuk melakukan sosialisasi program refreshness kepada para dosen untuk membuat bahan evaluasi pembelajaran melalui penyusunan soal-soal tes maupun proses penilaian yang terstandar. Dengan kegiatan tersebut minimal sudah dibangun kesamaan persepsi dan standar penilaian pembelajaran yang dilakukan pada para mahasiswa sehingga validitas tes sebagai alat ukur dapat digunakan dengan sebenarnya. Hasil dari penilaian melalui pengukuran ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran yang dilakukan dalam satu semester.

Evaluasi menjadi aspek penting pada kegiatan pendidikan formal, mengingat dari hasil evaluasi yang ada akan dapat digunakan sebagai sumber informasi terkait: a). Umpan balik kepada siswa (terkait dengan efektifitas pembelajaran, alat untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran oleh siswa, *decision making* untuk program lanjutan mereka); b). Sumber informasi untuk peningkatan kinerja tenaga pengajar; c). Pengembangan Kurikulum; umpan balik pada semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah (Sanjaya,2008 :339).

3. Guru/dosen

Transformasi kurikulum menempatkan dosen dalam pendidikan berperan sebagai pengembang kurikulum serta pelaku dalam merancang pembelajaran di dalam kelas. Dosen menetapkan sasaran dan tujuan pembelajaran serta menetapkan isi dan memilih strategi pembelajaran ((Wayne Seller – John P. Miller, 1985). Sebagai bagian dari pengembang kurikulum dosen menjadi informan dimana mereka dengan kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan akan menjadi sumber informasi guna peningkatan dan pembenahan kurikulum yang ada. Mengingat Dosen sebagai implementor dari kurikulum yang ada mereka akan bisa melihat fakta dan kenyataan dari kegiatan implementasi kurikulum yang ada.

Revolusi Industri 4.0 atau generasi keempat ditandai dengan teknologi yang serba digital, super komputer dan robotik yang memungkinkan manusia

untuk lebih mengoptimalkan kerja otak. Selama ini guru/dosen hanya dimaknai sebatas transfer ilmu. Namun sebenarnya bahwa tugas utama guru/dosen adalah mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, membimbing, menilai dan mengevaluasi. Maka dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 jelaslah bahwa tugas guru/dosen tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan namun juga menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter termasuk dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi secara bijak dan sebagai inspirator peserta didik sehingga tidak sekedar menyalahkan dahsyatnya kemajuan teknologi namun mengarahkan potensi positif yang ditimbulkan dari kemajuan informasi dan teknologi dimaksud sehingga menghasilkan lulusan yang berkarakter. Untuk itu sudah sepantasnya apabila guru/dosen pengampu matakuliah adalah mereka yang memang profesional dalam bidangnya dalam arti sesuai dengan latar belakang keilmuannya/bersertifikasi ataupun telah diberikan pengayaan melalui diklat-diklat yang sesuai dengan mata kuliah yang dibutuhkan (menjadi tanggung jawabnya).

Jika mengacu pada kemenristekdikti bahwa salah satu tahapan transformasi pendidikan era R I 4.0 adalah menempatkan Guru sebagai mentor, dilatih mengembangkan kurikulum dan memberikan pilihan kepada siswa untuk menentukan cara belajarnya sendiri. Dari tahap ini menunjukkan bahwa peran guru tidak hanya transfer ilmu pengetahuan. Hal ini serupa dengan yang terjadi di IPDN terlihat dari rumusan yang terdapat SAP/GBPP atau RPS/RPP yang baru pada tahap C2 (pengetahuan) sementara pendidikan setingkat D4 seharusnya rumusan dalam SAP/GBPP atau RPS/RPP telah menunjukkan taraf analisis. Maka akan lebih baik apabila dosen dibekali pengetahuan yang memadai yang berkaitan dengan perumusan RPS/RPP atau SAP/GBPP sehingga SAP/GBPP atau RPS/RPP yang disusun sudah menunjukkan target sesuai dengan tingkatan capaian pendidikan. Disamping itu dalam menentukan kurikulum melibatkan dosen profesional, pakar profesional, masyarakat pengguna perlu dilibatkan sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pengguna akan mendapatkan kepuasan dengan mempekerjakan lulusan IPDN di unit kerjanya. Meskipun berdasarkan

hasil survey kepuasan lulusan IPDN menunjukkan angka baik namun tidak semua pengguna menyatakan kepuasannya sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan di beberapa satuan kerja Kementerian Dalam Negeri yang intinya bahwa pada tataran konsep dan teknis perlu mendapat perhatian. Artinya bahwa tidak semua lulusan sesuai dengan harapan pengguna. Dalam tataran konsep dan analisis menunjukkan bahwa lulusan IPDN masih kalah dibanding dengan lulusan perguruan tinggi lain. Apalagi jika dihadapkan pada tataran aplikasi. Untuk itu melalui transformasi kurikulum yang melibatkan pakar sesuai mata kuliah dan pengguna ke depan harapannya semua lulusan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Maka dari itu peran dosen sebagai salah satu penentu keberhasilan lulusan tidak dapat diabaikan.

Sebagai gambaran bahwa jumlah dosen di IPDN sebanyak 211 yang telah bersertifikasi sebanyak 87 orang (41,2 %) dan yang belum bersertifikasi sebanyak 124 orang (58,8%). Sementara sebaran sertifikasi dosen belum merata dan masih menumpuk di beberapa jurusan. Harapan ke depan dalam penerimaan dosen sebaiknya didasarkan atas pemetaan kebutuhan dosen sehingga terjadi keseimbangan dan pemenuhan tuntutan kebutuhan lembaga. Jumlah dan sebaran dosen sesuai kualifikasi sertifikasi selengkapnya di bawah ini penulis sajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13

Jenis Sertifikasi Dosen IPDN Tahun 2019

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ilmu Administrasi	12	} 24
2.	Ilmu Administrasi Negara	5	
3.	Ilmu Administrasi Publik	1	
4.	Ilmu Administrasi (Publik,Negara)	2	
5.	Ilmu Adm. Keuangan Daerah	1	
6.	Ilmu Adm.Keuangan	3	

7.	Ilmu Pemerintahan	16	
8.	Ilmu Kebijakan Publik	1	
9.	Ilmu Ekonomi	3	
10.	Ilmu Ekonomi Pembangunan	1	
11.	Ilmu Hukum	4	
12.	Ilmu Manajemen	11	
13.	Ilmu Politik	1	
14.	Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra	2	
15.	Ilmu Sosiologi	5	
16.	Ilmu Sosial Politik	1	
17.	Ilmu Perpajakan	1	
18.	Ilmu Studi Pembangunan	1	
19.	Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian	1	
20	Ilmu Teknik Pertanian	1	
21	Ilmu studi Masyarakat Islam	1	
1	2	3	4
22	Ilmu Masyarakat Islam	1	
23	Ilmu Pembangunan	1	
24	Ilmu Komunikasi	1	
25	Ilmu Pendidikan Agama Hindu	1	
26	Ilmu Sastra dan Bahasa	1	
27	Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris	1	
28	Ilmu Teknik Lingkungan	1	
29	Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris	1	
30	Ilmu Metode Penelitian Sosial	1	
31	Ilmu Teknik dan Manajemen Industri	1	
32	Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota	1	
33	Ilmu Perencanaan Pengembangan dan Kebijakan	1	
	Jumlah	87	

Sumber : SK Rektor No. 426-61/2019

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dosen yang telah bersertifikasi menunjukkan keberagaman namun lebih didominasi ilmu pemerintahan, ilmu administrasi dan ilmu manajemen. Meskipun demikian belum semua mata kuliah ada dosen yang tersertifikasi. Untuk itu ke depan dalam rangka menyiapkan dan memenuhi standar kebutuhan dan standar mutu lulusan akan lebih baik jika penerimaan/pengkaderan dosen lebih diutamakan dari jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan di IPDN sehingga tidak menumpuk pada sertifikasi tertentu. Dari 87 dosen yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi disebar pada sejumlah prodi dan fakultas yang ada di IPDN. Persebaran dosen dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 4.14

Data Dosen IPDN Tahun 2019

No.	Fakultas/Prodi	Jumlah Dosen	Bersertifikasi	Belum	Dasar/Keterangan Sertifikasi
1.	Politik Pemerintahan	108	45	63	
	c. Prodi Kebijakan Publik	15	7	8	SK Rektor No. 426-61/2019 1 ilmu adm, 5 ilmu pemerintahan 1 ilmu kebijakan publik
	d. Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan masyarakat	49	27	22	SK Rektor No. 424-60/2019 4 Ilmu Administrasi 1 Ilmu Studi Pembangunan 1 ilmu Sosek Pertanian 5 Ilmu Sosiologi 1 Pend. Bhs & Sastra Indonesia 1 Ilmu Ekonomi 1 Ilmu Adm Keuda 1 Studi Masy Islam

					6 Ilmu Manajemen 1 Ilmu Ekonomi Pembangunan 1 Teknik Lingkungan 1 Ilmu Sosial Politik 1 Ilmu Tek. Pertanian 1 Ilmu Komunikasi
	c. Prodi Politik Indonesia Terapan	44	11	33	SK Rektor No 424-59 Tahun 2019 5 Ilmu Pemerintahan 2 Ilmu Administrasi 2 Ilmu Hukum 1 Ilmu Politik 1 Pend. Bhs dan Sastra Indonesia
2	Manajemen Pemerintahan	103	42	61	
	a. Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik	32	14	18	SK Rektor No. 424-57 Tahun 2019 4 Ilmu Administrasi 4 Ilmu Adm. Negara 1 Ilmu Manajemen 2 Ilmu Pemerintahan 1 Pend. Agama Hindu 1 Ilmu Sastra & Bahasa 1 Ilmu Pend. Bhs Inggris
	b. Keuangan Publik	35	13	22	SK Rektor No. 424-56 Tahun 2019 5 Ilmu Manajemen 3 Ilmu Adm. Keuangan 2 Ilmu Pemerintahan 1 Ilmu Ekonomi 1 Ilmu administrasi 1 Ilmu Perpajakan
	c. Administrasi Pemerintahan Daerah	20	9	11	SK Rektor No. 424-55 Tahun 2019 2 Ilmu Adm. Neg. Publik 2 Ilmu Hukum 2 Ilmu Pemerintahan 1 Ilmu Adm. Negara 1 Ilmu Ekonomi 1 Ilmu Adm. Publik
	d. Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan	16	6	10	SK Rektor No. 424-58 Tahun 2019 1 Ilmu Metlitsos 1 Ilmu Teknik dan Manajemen Industri 1 Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota 1 Ilmu Perencanaan Pengembangan Kebijakan 1 Ilmu Masyarakat Islam 1 Ilmu Pembangunan
	Total	211	87	124	

Sumber :SK Rektor No. 426-61/2019

4.3.2.4 Standar Lulusan

Hal yang paling menentukan sebuah lembaga pendidikan terletak pada standar lulusan. Standar lulusan terlihat dalam visi, misi dan kurikulum yang ditetapkan. Dari misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk kurikulum pembelajaran. Melalui kurikulum tujuan lembaga dicapai dan dari kurikulum akan diketahui kemampuan lulusan yang dikeluarkan. Ibarat makhluk hidup kurikulum adalah ruh-nya sebuah lembaga pendidikan.

Kurikulum dapat diartikan daftar mata kuliah namun secara lebih luas definisi yang sifatnya lebih lengkap, yaitu segala sesuatu yang berlangsung di sekolah termasuk di dalamnya aktifitas ekstrakurikuler, pemberian panduan dan hubungan antar pihak yang terkait di dalamnya. Di sini penulis melihat kurikulum dari definisi yang sifatnya sangat sederhana yaitu sebagai mata pelajaran, isi, program belajar, sekumpulan materi, langkah-langkah pembelajaran, kegiatan belajar sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dari daftar mata kuliah yang ada dapat diketahui transformasi yang dilakukan jika transformasi diartikan sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan. Perubahan yang dimaksudkan di sini perubahan kurikulum yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor IPDN No. 423-5-764 Tahun 2013 dan Peraturan Rektor Nomor 423.5-342 tahun 2019.

Jika melihat daftar mata kuliah yang ada di IPDN khususnya program D4 yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor IPDN No. 423-5-764 Tahun 2013 menunjukkan bahwa masing-masing program studi mempunyai mata kuliah yang tidak jauh berbeda baik dilihat dari nama mata kuliah maupun bobot mata kuliah yang harus diselesaikan selama 8 semester sebagaimana tergambar dalam tabel 4.3

dan 4.4 di atas. Kemudian muncul standar kemenristek dikti dan tuntutan perkembangan zaman, IPDN melakukan transformasi kurikulum melalui penetapan Peraturan Rektor Nomor 423.5-342 tahun 2019. Transformasi kurikulum IPDN selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.15

Transformasi Kurikulum IPDN

FAK/PRODI	LAMA				BARU				Total SKS
	SEMESTER	MATA KULIAH	JML SKS		PRODI/SMT	MATA KULIAH	SKS		
			K	P			K	P	
POLPEM									
Politik Pemerintahan	I	1. Pendidikan Pancasila	2	-	Politik Indonesia Terapan	1. Pancasila	1	1	2
		2. Pendidikan Agama	2	-	I	2. Agama	1	1	2
		3. Pendidikan Kewarganegaraan	2			3. Kewarganegaraan	1	1	2
		4. Bahasa Indonesia	2	-		4. Bahasa Indonesia	1	1	2
		5. Bahasa Inggris	2	-		5. Bahasa Inggris	0	2	2
		6. Pengantar Filsafat	3	-		6. Pengantar Filsafat	2	0	2
		7. Pengantar Ilmu Politik	3	-		7. Pengantar Ilmu Pemerintahan (Tadinya smt I)	3	0	3
		8. Pengantar Ilmu Hukum	3	-		8. Kepamongprajaan	2	1	3
			19			9.. Praktik Komputer	0	1	1
							58	42	19
	II	1 Pengantar Sosiologi	2	-	II	1. Pengantar Ilmu Hukum (semula SMT I)	2	0	2
		2. Pengantar Antropologi	2	-		2. Pengantar Sosiologi	1	1	2
		3. Pengantar Ilmu Pemerintahan (menjadi SMT II)	2	-		3. Pengantar Antropologi	2	0	2
		4. Pengantar Ilmu Ekonomi	2	-		4. Pengantar Ilmu Politik (tadinya smt I)	2	0	2
		5. Pengantar Ilmu Kependudukan	2	-		5. Pengantar Ilmu Ekonomi	1	1	2
		6. Pengantar Ilmu Administrasi	2	-		6. Pengantar Ilmu Kependudukan	1	1	2
		7. Dasar-dasar Manajemen	2	-		7. Pengantar Ilmu Administrasi	1	1	2

		8. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	2	-		8. Tata Naskah Dinas I	0	1	1
						9. Etiket dan Keprotokolan Pamong Praja I (praktek kehumasan Etiket dan protokol)	0	1	1
						10. Praktek Lapangan I	0	2	2
							56	44	18
	III	1. Etika Pemerintahan	2	-	III	1. Administrasi Kepegawaian	1	1	2
		2. Sistem Politik Indonesia	3	-		2. . Komunikasi Pemerintahan	1	1	2
		3. Sistem Pemerintahan Indonesia	3	-		3. .Pemerintahan Desa (semula dengan pkelurahan)	1	2	3
		4. Administrasi Kepegawaian	2	-		4. Sistem Politik Indonesia	2	1	3
		5. Hak Asasi Manusia	2	-		5. Sistem Pemerintahan Indonesia	2	1	3
		6. Kepamongprajaan	2	-		6. Administrasi Pemerintahan	1	1	3
		7. Sistem Hukum Indonesia	3	-		7. Teori Pembangunan (semula di SMT V)	2	0	3
		8. Pemerintahan Desa/ Kelurahan	2	-		8. . Sistem Hukum Indonesia	2	1	3
		9. Komunikasi Pemerintahan	2	-		9. Publik Speaking (sebelumnya Praktek Bahas Inggris)	0	1	1
			21			10. Praktek Komputer II	0	1	1
							55	45	22
	IV	1. Ilmu Administrasi Publik	3	-	IV	1. Kebijakan Publik	2	1	3
		2. Hukum Tata Usaha Negara	2	-		2. . Hukum Tata Usaha Negara	1	2	3
		3. Statistika Sosial	3	-		3. . Manajemen Pemerintahan Daerah	1	2	3
		4. Kebijakan Publik	3	-		4. Kebijakan Keuangan Negara dan Daerah	1	1	2
		5. Keuangan Negara dan Daerah	3	-		5. Analisis Potensi Wilayah (Semula SMT V)	1	1	2
		6. Kebijakan Pertanahan	2	-		6. Komunikasi Politik	2	1	3
		7. Manajemen Pemerintahan Daerah	3	-		7.Psykologi Politik	2	1	3
		8. Kepemimpinan Pemerintahan	3	-		8. Tata Naskah Dinas II	0	1	1

		Indonesia							
			22			9. Gladi Manajemen Pemerintahan	0	1	1
						10. Praktek Lapangan II	0	2	2
							43	57	23
	V	1. Teori Organisasi	3	-	V	1. Statistika Sosial (Semula SMT IV)	2	1	3
		2. Teori Pembangunan	3	-		2. Ekologi Pemerintahan	1	1	2
		3. Ekologi Pemerintahan	2	-		3. Konflik dan integrasi sosial	1	2	3
		4. Analisis Potensi Wilayah	3	-		4. Pelayanan Publik & Hospitality (semula tanpa hospitality)	1	1	2
		5. Penanggulangan Korupsi	2	-		5. Politik, Desentralisasi dan otonomi Daerah	1	1	2
		6. Metode Penelitian Sosial	3	-		6. Reformasi Birokrasi	1	1	2
		7. Pelayanan Publik	3	-		7. Analisis Politik dan Pemerintahan	1	1	2
		8. Politik, Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2	-		8. Sosiolog Politik	2	1	3
		9. Perkembangan Pemikiran Politik Indonesia	3	-		9. Pembangunan Politik Indonesia	1	2	3
			24			10. Praktek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah	0	1	1
							48	52	23
	VI	1. Teori Birokrasi	3	-	VI	1. Metode Penelitian Sosial (Semula SMT V)	2	1	3
		2. Pembangunan Politik Indonesia	3	-		2. Etika Pemerintahan (semula SMT III)	1	1	2
		3. Kelembagaan Politik Daerah	3	-		3. Administrasi Pertanahan	1	1	2
		4. Pembentukan Perundang-undangan	3	-		4. Dinamika Politik	1	1	2
		5. Politik Pemerintahan di Asia Tenggara	3	-		5. Analisis Politik Lokal	2	1	3
		6. Sistem Kepartaian dan Pemilu	3	-		6. Seminar Politik Pemerintahan (Semula	1	2	3

						SMT VII)			
		7. Komunikasi Politik	3	-		7. Kebijakan Administrasi Kependudukan	1	1	2
			21			8. Politik Anggaran	1	1	2
						9. Praktik Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	2
						10. Praktek Lapangan III	0	2	2
							48	52	23
	VII	1. Analisis Kekuatan Sosial Regional	3	-	VII	1. Seminar Usulan Penelitian Terapan Pemerintahan	1	0	1
		2. Analisis Kekuatan Politik regional	3	-		2. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (semula SMT IV)	2	1	3
		3. Budaya Politik Indonesia	3	-		3. Teknik Pengambilan Keputusan	1	1	2
		4. Konflik dan Integrasi Sosial	3	-		4. Koordinasi Pemerintahan	1	1	2
		5. Partisipasi Politik Masyarakat	3	-		5. Sistem Kepartaian dan Pemilu (Semula SMT VI)	2	1	3
		6. Teknik Penyerapan Aspirasi Masyarakat	2	-		6. Pengawasan dan Pengendalian	1	1	2
		7. Seminar Politik Pemerintahan	2	-		7. Governansi Digital	1	1	2
			19			8. Partisipasi Politik (Semula Partisipasi Politik Masyarakat)	1	2	3
						9. Analisis Politik Pemerintahan di Asia Tenggara (semula tanpa analisis)	2	1	3
						10. Bhakti Karya Praja /Latsitarda	0	2	2
							52	48	23
	VIII	1. Seminar Usulan Magang	1	-	VIII	1. Praktik Lapangan IV	0	2	2
		2. Magang Penelitian	2	-		2. Skripsi (semula LA)	0	4	4
		3. Laporan Akhir	4	-			0	100	6
			7				45%	51%	157

			150							
Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	I	1. Pendidikan Pancasila	2	-	I	1. Pancasila	1	1	2	
		2. Pendidikan Agama	2	-	=	2. Agama	1	1	2	
		3. Pendidikan Kewarganegaraan	2	-		3. Kewarganegaraan	1	1	2	
		4. Bahasa Indonesia	2	-		4. Bahasa Indonesia	1	1	2	
		5. Bahasa Inggris	2	-		5. Bahasa Inggris	0	2	2	
		6. Pengantar Filsafat	3	-		6. Pengantar Filsafat	2	0	2	
		7. Pengantar Ilmu Politik	3	-		7. Pengantar Ilmu Pemerintahan (Tadinya smt I)	3	0	3	
		8. Pengantar Ilmu Hukum	3	-		8. Kepamongprajaan	2	1	3	
							9.. Praktik Komputer	0	1	1
								11/58 %	8/42 %	19
	II	1. Pengantar Sosiologi	2	-	II	1. Pengantar Ilmu Hukum (semula SMT I)	2	0	2	
		2. Pengantar Antropologi	2	-	=	2. Pengantar Sosiologi	1	1	2	
		3. Pengantar Ilmu Pemerintahan	3	-		3. Pengantar Antropologi	2	0	2	
		4. Pengantar Ilmu Ekonomi	2	-		4. Pengantar Ilmu Politik (tadinya smt I)	2	0	2	
		5. Pengantar Ilmu Kependudukan	2	-		5. Pengantar Ilmu Ekonomi	1	1	2	
		6. Pengantar Ilmu Administrasi	2	-		6. Pengantar Ilmu Kependudukan	1	1	2	
		7. Dasar-dasar Manajemen	2	-		7. Pengantar Ilmu Administrasi	1	1	2	
		8. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	2	-		8. Tata Naskah Dinas I	0	1	1	
							9. Etiket dan Keprotokolan Pamong Praja I (praktek kehumasan Etiket dan protokol)	0	1	1
							10. Praktek Lapangan I	0	2	2
						56	44	18		
	III	1. Etika Pemerintahan	2	-	III	1. Administrasi Kepegawaian	1	1	2	

		2. Sistem Politik Indonesia	3	-	=	2. . Komunikasi Pemerintahan	1	1	2
		3. Sistem Pemerintahan Indonesia	3	-		3. .Pemerintahan Desa (semula dengan pkelurahan)	1	2	3
		4. Administrasi Kepegawaian	2	-		4. Sistem Politik Indonesia	2	1	3
		5. Hak Asasi Manusia	2	-		5. Sistem Pemerintahan Indonesia	2	1	3
		6. Kepamongprajaan	2	-		6. Administrasi Pemerintahan	1	1	3
		7. Sistem Hukum Indonesia	3	-		7. Teori Pembangunan (semula di SMT V)	2	0	3
		8. Pemerintahan Desa/ Kelurahan	2	-		8. . Sistem Hukum Indonesia	2	1	3
		9. Komunikasi Pemerintahan	2	-		9. Publik Speaking (sebelumnya Praktek Bahas Inggris)	0	1	1
			21			10. Praktek Komputer II	0	1	1
							55	45	22
	IV	1. Ilmu Administrasi Publik	3	-	IV	1. Kebijakan Publik	2	1	3
		2. Hukum Tata Usaha Negara	2	-	1-5 dan 8-19 =	2. . Hukum Tata Usaha Negara	1	2	3
		3. Statistika Sosial	3	-		3. . Manajemen Pemerintahan Daerah	1	2	3
		4. Kebijakan Publik	3	-		4. Kebijakan Keuangan Negara dan Daerah	1	1	2
		5. Keuangan Negara dan Daerah	3	-		5. Analisis Potensi Wilayah (Semula SMT V)	1	1	2
		6. Kebijakan Pertanahan	2	-	≠	6. Pembangunan Ekonomi Regional	2	1	3
		7. Manajemen Pemerintahan Daerah	3	-	≠	7. Teori Pemberdayaan Masyarakat	2	1	3
		8. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia	3	-		8. Tata Naskah Dinas II	0	1	1
			22			9. Gladi Manajemen Pemerintahan	0	1	1
						10. Praktek Lapangan II	0	2	2
							43	57	23
	V	1. Teori Organisasi	3	-	V	1. Statistika Sosial (Semula SMT IV)	2	1	3
		2. Teori Pembangunan	3	-	1,2,4,5,6, 7 =	2. Ekologi Pemerintahan	1	1	2
		3. Ekologi Pemerintahan	2	-		3. Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal	1	2	3

		4. Analisis Potensi Wilayah	3	-		4. Pelayanan Publik & Hospitality (semula tanpa hospitality)	1	1	2
		5. Penanggulangan Korupsi	2	-		5. Politik, Desentralisasi dan otonomi Daerah	1	1	2
		6. Metode Penelitian Sosial	3	-		6. Reformasi Birokrasi	1	1	2
		7. Pelayanan Publik	3	-		7. Analisis Politik dan Pemerintahan	1	1	2
		8. Politik, Desentralisasi dan otonomi Daerah	2	-	≠ (prodi)	8. Pembangunan Modal Sosial	2	1	3
		9. Perkembangan Pemikiran Politik Indonesia	3	-	≠(prodi)	9. Ekonomi Publik	1	2	3
			24		=	10. Praktek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah	0	1	1
							48	52	23
	VI	1. Teori Birokrasi	3		VI	1. Metode Penelitian Sosial (Semula SMT V)	2	1	3
		2. Pembangunan Politik Indonesia	3		1.2.3.4.7.8.9,10=	2. Etika Pemerintahan (semula SMT III)	1	1	2
		3. Kelembagaan Politik Daerah	3			3. Administrasi Pertanahan	1	1	2
		4. Pembentukan Perundang-undangan	3			4. Dinamika Politik	1	1	2
		5. Politik Pemerintahan di Asia Tenggara	3		≠ (prodi)	5. Perencanaan Pembangunan Daerah	2	1	3
		6. Pembangunan Ekonomi Regional	3		≠ (prodi)	6. Seminar Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan	1	2	3
		7. Perencanaan Pemerintah Daerah	3			7. Kebijakan Administrasi Kependudukan	1	1	2
		8. Teori Pemberdayaan Masyarakat	3			8. Politik Anggaran	1	1	2
			22			9. Praktik Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	2
						10. Praktek Lapangan III	0	2	2
							48	52	23

	VII	1. Pembangunan Berbasis kearifan Lokal	3		VII	1. Seminar Usulan Penelitian Terapan Pemerintahan	1	0	1
		2. Pengembangan Model Sosial	3		1,2,3,4,6,7 =	2. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (semula SMT IV)	2	1	3
		3. Modal dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat	3			3. Teknik Pengambilan Keputusan	1	1	2
		4. Kebijakan ... Sosial	3			4. Koordinasi Pemerintahan	1	1	2
		5. Pembangunan Ekonomi Perdesaan	3		≠ (prodi)	5. Pembangunan Ekonomi Perdesaan (Semula SMT VII juga)	2	1	3
		6. Seminar pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2			6. Pengawasan dan Pengendalian	1	1	2
						7. Governansi Digital	1	1	2
			17		≠ (prodi)	8. Sosiologi Pembangunan	1	2	3
					≠ (prodi)	9. Kewirausahaan	2	1	3
						10. Bhakti Karya Praja /Latsitarda	0	2	2
							52	48	23
	VIII	1. Seminar Usulan Magang	1		VIII	1. Praktik Lapangan IV	0	2	2
		2. Magang Penelitian	2			2. Skripsi (semula LA)	0	4	4
		3. Laporan Akhir	4				0	100	6
			7				45%	51%	157
			150						
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	Prodi baru				I	1. Pancasila	1	1	2
						2. Agama	1	1	2
						3. Kewarganegaraan	1	1	2
						4. Bahasa Indonesia	1	1	2
						5. Bahasa Inggris	0	2	2
						6. Pengantar Filsafat	2	0	2

					7. Pengantar Ilmu Pemerintahan (Tadinya smt I)	3	0	3
					8. Kepamongprajaan	2	1	3
					9.. Praktik Komputer I	0	1	1
						58	42	19
				II	1. Pengantar Ilmu Hukum (semula SMT I)	2	0	2
					2. Pengantar Sosiologi	1	1	2
					3. Pengantar Antropologi	2	0	2
					4. Pengantar Ilmu Politik (tadinya smt I)	2	0	2
					5. Pengantar Ilmu Ekonomi	1	1	2
					6. Pengantar Ilmu Kependudukan	1	1	2
					7. Pengantar Ilmu Administrasi	1	1	2
					8. Tata Naskah Dinas I	0	1	1
					9. Etiket dan Keprotokolan Pamong Praja I (praktek kehumasan Etiket dan protokol)	0	1	1
					10. Praktek Lapangan I	0	2	2
						56	44	18
				III	1. Administrasi Kepegawaian	1	1	2
					2. . Komunikasi Pemerintahan	1	1	2
					3. .Pemerintahan Desa (semula dengan pkelurahan)	1	2	3
					4. Sistem Politik Indonesia	2	1	3
					5. Sistem Pemerintahan Indonesia	2	1	3
					6. Administrasi Pemerintahan	1	1	3
					7. Teori Pembangunan (semula di SMT V)	2	0	3
					8. . Sistem Hukum Indonesia	2	1	3
					9. Publik Speaking (sebelumnya Praktek	0	1	1

					Bahas Inggris)			
					10. Praktek Komputer II	0	1	1
						55	45	22
				IV	1. Kebijakan Publik	2	1	3
					2. . Hukum Tata Usaha Negara	1	2	3
					3. . Manajemen Pemerintahan Daerah	1	2	3
					4. Kebijakan Keuangan Negara dan Daerah	1	1	2
					5. Analisis Potensi Wilayah (Semula SMT V)	1	1	2
				≠ (prodi)	6. Permodelan Kebijakan	2	1	3
				≠ (prodi)	7. Formulasi Kebijakan	2	1	3
					8. Tata Naskah Dinas II	0	1	1
					9. Gladi Manajemen Pemerintahan	0	1	1
					10. Praktek Lapangan II	0	2	2
						43	57	23
				V	1. Statistika Sosial (Semula SMT IV)	2	1	3
					2. Ekologi Pemerintahan	1	1	2
				≠ Prodi	3. Implementasi Kebijakan	1	2	3
					4. Pelayanan Publik & Hospitality (semula tanpa hospitality)	1	1	2
					5. .Politik, Desentralisasi dan otonomi Daerah	1	1	2
					6. Reformasi Birokrasi	1	1	2
					7. Analisis Politik dan Pemerintahan	1	1	2
				≠ Prodi	8. Evaluasi Kebijakan	2	1	3
				≠ Prodi	9. Analisis Kebijakan Publik	1	2	3
					10. Praktek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah	0	1	1

						48	52	23
				VI	1. Metodologi Penelitian Sosial (Semula SMT V)	2	1	3
					2. Etika Pemerintahan (semula SMT III)	1	1	2
					3. Administrasi Pertanahan	1	1	2
					4. Dinamika Politik	1	1	2
				≠Prodi	5. Kebijakan Pembangunan Indonesia	2	1	3
				≠Prodi	6. Kebijakan Penanggulangan Korupsi	1	2	3
					7. Kebijakan Administrasi Kependudukan	1	1	2
					8. Politik Anggaran	1	1	2
					9. Praktik Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	2
					10. Praktek Lapangan III	0	2	2
						48	52	23
				VII	1. Seminar Usulan Penelitian Terapan Pemerintahan	1	0	1
					2. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (semula SMT IV)	2	1	3
					3. Teknik Pengambilan Keputusan	1	1	2
					4. Koordinasi Pemerintahan	1	1	2
				≠Prodi	5. Kebijakan Aset Daerah	2	1	3
					6. Pengawasan dan Pengendalian	1	1	2
					7. Governansi Digital	1	1	2
				≠Prodi	8. Kebijakan Ekonomi Publik	1	2	3
				≠Prodi	9. Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	2	1	3
					10. Bhakti Karya Praja /Latsitarda	0	2	2

						52	48	23
				VIII	1. Praktik Lapangan IV	0	2	2
					2. Skripsi (semula LA)	0	4	4
						0	100	6
						45%	51%	157
MANAJEMEN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN DAERAH	I	1. Pendidikan Pancasila	2	STUDY KEUANGAN PUBLIK	1. Pancasila	1	1	2
		2. Pendidikan Agama	2	I	2. Agama	1	1	2
		3. Pendidikan Kewarganegaraan	2		3. Kewarganegaraan	1	1	2
		4. Bahasa Indonesia	2		4. Bahasa Indonesia	1	1	2
		5. Bahasa Inggris	2		5. Bahasa Inggris	0	2	2
		6. Pengantar Filsafat	3		6. Pengantar Filsafat	2	0	2
		7. Pengantar Ilmu Politik	3		7. Pengantar Ilmu Pemerintahan (Tadinya smt I)	3	0	3
		8. Pengantar Ilmu Hukum	3		8. Kepamongprajaan	2	1	3
			19		9.. Praktik Komputer I	0	1	1
						58	42	19
	II	1 Pengantar Sosiologi	2	II	1. Pengantar Ilmu Hukum (semula SMT I)	2	0	2
		2. Pengantar Antropologi	2		2. Pengantar Sosiologi	1	1	2
		3. Pengantar Ilmu Pemerintahan	3		3. Pengantar Antropologi	2	0	2
		4. Pengantar Ilmu Ekonomi	2		4. Pengantar Ilmu Politik (tadinya smt I)	2	0	2
		5. Pengantar Ilmu Kependudukan	2		5. Pengantar Ilmu Ekonomi	1	1	2
		6. Pengantar Ilmu Administrasi	2		6. Pengantar Ilmu Kependudukan	1	1	2
		7. Dasar-dasar Manajemen	2		7. Pengantar Ilmu Administrasi	1	1	2

		8. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	2			8. Tata Naskah Dinas I	0	1	1
			17			9. Etiket dan Keprotokol Pamong Praja I (praktek kehumasan Etiket dan protokol)	0	1	1
						10. Praktek Lapangan I	0	2	2
							56	44	18
	III	1. Etika Pemerintahan	2		III	1. Administrasi Kepegawaian	1	1	2
		2. Sistem Politik Indonesia	3			2. . Komunikasi Pemerintahan	1	1	2
		3. Sistem Pemerintahan Indonesia	3			3. .Pemerintahan Desa (semula dengan pkelurahan)	1	2	3
		4. Administrasi Kepegawaian	2			4. Sistem Politik Indonesia	2	1	3
		5. Hak Asasi Manusia	2			5. Sistem Pemerintahan Indonesia	2	1	3
		6. Kepamongpraajaan	2			6. Administrasi Pemerintahan	1	1	2
		7. Sistem Hukum Indonesia	3			7. Dasar-dasar Manajemen (semula di SMT II)	2	0	2
		8. Pemerintahan Desa/ Kelurahan	2		≠Prodi	8. Dasar-dasar Akuntansi	1	1	2
		9. Komunikasi Pemerintahan	2		≠Prodi	9. Hukum Keuangan Daerah	1	1	2
			21		≠Prodi	10. Manajemen Keuangan Sektor Publik	1	1	2
							55	45	23
	IV	1. Ilmu Administrasi Publik	3		IV	1. Kebijakan Publik	2	1	3
		2. Hukum Tata Usaha Negara	2			2. . Hukum Tata Usaha Negara	2	0	2
		3. Statistika Sosial	3			3. Pendidikan Anti Korupsi (Prodi Lain ≠)	1	1	2
		4. Kebijakan Publik	3			4. Keuangan Negara dan Daerah	1	1	2
		5. Keuangan Negara dan Daerah	3		≠Prodi	5. Pelayanan Publik	2	1	2
		6. Kebijakan Pertanahan	2		≠Prodi	6. Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Daerah	1	2	3
		7. Manajemen Pemerintahan Daerah	3		≠Prodi	7. Perbendaharaan Daerah	1	2	3

		8. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia	3			8. Tata Naskah Dinas II	0	1	1
			22			9. Gladi Manajemen Pemerintahan	0	1	1
						10. Praktek Lapangan II	0	2	2
						11. Public Speaking	0	1	1
							43	57	23
	V	1. Teori Organisasi	3		V	1. Statistika Sosial (Semula SMT IV)	2	1	3
		2. Teori Pembangunan	3			2. Ekologi Pemerintahan	2	0	2
		3. Ekologi Pemerintahan	2		≠Prodi	3. Manajemen Asset	1	1	2
		4. Analisis Potensi Wilayah	3		≠Prodi	4. Manajemen Konflik dan Kolaborasi	1	1	2
		5. Penanggulangan Korupsi	2		≠Prodi	5. Manajemen Strategik	1	1	2
		6. Metode Penelitian Sosial	3			6. Analisis Potensi Wilayah	1	1	2
		7. Pelayanan Publik	3		≠Prodi	7. Otonomi dan Desentralisasi Pemda	1	1	2
		8. Politik, Desentralisasi dan otonomi Daerah	2		≠Prodi	8. Akuntansi Keuangan Daerah I	1	2	3
		9. Manajemen Strategik	3		≠Prodi	9. Pajak Daerah	1	2	3
			24		≠Prodi	10. Praktek Permodelan Kebijakan	0	1	1
						11. Praktek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah	0	1	1
							48	52	23
	VI	1. Manajemen Konflik dan Kolaborasi	2		VI	1. Metodologi Penelitian Sosial (Semula SMT V)	2	1	3
		2. Manajemen asset	2			2. . Etika Pemerintahan (semula SMT III)	1	1	2
		3. Pengawasan Pemerintahan	2			3. Administrasi Pertanahan	1	1	2
		4. Manajemen Perubahan	3		≠Prodi	4. Perencanaan Keuangan Sektor Publik	1	1	2
		5. Manajemen Perbatasan	3		≠Prodi	5. Penganggaran Keuangan SektorPublik	1	1	2
		6. Hukum Keuangan Daerah	3		≠Prodi	6. Akuntansi Keuangan Daerah II	1	2	3

		7. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	3		≠Prodi	7. Akuntansi Keuangan Desa	1	1	2
		8. Perencanaan Penganggaran Daerah	3			8. Retribusi Daerah	1	1	2
		9. Akuntansi Keuangan Daerah	3			9. Etiket Keprotokolan Pamong Praja II	0	1	1
						10. Praktik Pengadaan Barang dan Jasa	0		
			22			11. Praktek Lapangan III	0	2	1
							41	59	22
	VII	1. Akuntansi Keuangan Daerah	2		VII	1. Seminar Usulan Penelitian Terapan Pemerintahan	1	0	1
		2. Pemeriksaan Keuangan Daerah	3			2. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (semula SMT IV)	2	1	3
		3. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah	3		≠Prodi	3. Pemeriksaan Keuangan Daerah	1	2	3
		4. Sistem Informasi keuangan Daerah	3		≠Prodi	4. Sistem Informasi AktKeuangan Daerah	1	1	2
		5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3		≠Prodi	5. Seminar Keuangan Daerah	2	2	3
		6. Seminar keuangan Daerah	2		≠Prodi	6. Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik	1	1	2
					≠Prodi	7. Investasi Sektor publik	1	1	2
					≠Prodi	8. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	1	2	3
					≠Prodi	9. Praktok Penyusunan Laporan Pemerintahan	0	1	1
						10. Bhakti Karya Praja /Latsitarda	0	2	2
							52	48	22
	VIII	1. Seminar Usulan Magang	1		VIII	1. Praktik Lapangan IV	0	2	2
		2. Magang Penelitian	2			2. Skripsi (semula LA)	0	4	4
		3. Laporan Akhir	4				0	100	6
			7				47%	53%	156

			148			29%	71%	
Manajemen Sumber Daya Manusia	I	1. Pendidikan Pancasila	2	MSDA Sektor Publik	1. Pancasila	1	1	2
		2. Pendidikan Agama	2		2. Agama	1	1	2
		3. Pendidikan Kewarganegaraan	2		3. Kewarganegaraan	1	1	2
		4. Bahasa Indonesia	2		4. Bahasa Indonesia	1	1	2
		5. Bahasa Inggris	2		5. Bahasa Inggris	0	2	2
		6. Pengantar Filsafat	3		6. Pengantar Filsafat	2	0	2
		7. Pengantar Ilmu Politik	3	prodi	7. Pengantar Ilmu Pemerintahan (semula smt II)	3	0	3
		8. Pengantar Ilmu Hukum	3		8. Kepamongprajaan	2	1	3
			19		9.. Praktik Komputer I	0	1	1
						58	42	19
	II	1. Pengantar Sosiologi	2	II	1. Pengantar Ilmu Hukum (semula SMT I)	2	0	2
		2. Pengantar Antropologi	2		2. Pengantar Sosiologi	1	1	2
		3. Pengantar Ilmu Pemerintahan	3		3. Pengantar Antropologi	2	0	2
		4. Pengantar Ilmu Ekonomi	2		4. Pengantar Ilmu Politik (tadinya smt I)	2	0	2
		5. Pengantar Ilmu Kependudukan	2		5. Pengantar Ilmu Ekonomi	1	1	2
		6. Pengantar Ilmu Administrasi	2		6. Pengantar Ilmu Kependudukan	1	1	2
		7. Dasar-dasar Manajemen	2		7. Pengantar Ilmu Administrasi	1	1	2
		8. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	2		8. Tata Naskah Dinas I	0	1	1
			17		9. Etiket dan Keprotokolanan Pamong Praja I (praktek kehumasan Etiket dan protokol)	0	1	1
					10. Praktek Lapangan I	0	2	2
						56	44	18
	III	1. Etika Pemerintahan	2	III	1. Administrasi Kepegawaian	1	1	2

		2. Sistem Politik Indonesia	3			2. . Komunikasi Pemerintahan	1	1	2
		3. Sistem Pemerintahan Indonesia	3			3. .Pemerintahan Desa (semula dengan pkelurahan)	1	2	3
		4. Administrasi Kepegawaian	2			4. Sistem Politik Indonesia	2	1	3
		5. Hak Asasi Manusia	2			5. Sistem Pemerintahan Indonesia	2	1	3
		6. Kepamongprajaan	2			6. Administrasi Pemerintahan	1	1	2
		7. Sistem Hukum Indonesia	3		≠Prodi	7. Dasar-dasar Manajemen (semula di SMT II)	2	0	2
		8. Pemerintahan Desa/ Kelurahan	2		≠Prodi	8. MSDM Sektor Publik	1	1	2
		9. Komunikasi Pemerintahan	2		≠Prodi	9. Etika Aparatur Pemerintahan	1	1	2
			21				1	1	2
							55	45	23
	IV	1. Ilmu Administrasi Publik	3			1. Kebijakan Publik	2	1	3
		2. Hukum Tata Usaha Negara	2			2. . Hukum Tata Usaha Negara	1	2	3
		3. Statistika Sosial	3		≠Prodi	3. Pendidikan Anti Korupsi	1	2	3
		4. Kebijakan Publik	3			4. Keuangan Negara dan Daerah	1	1	2
		5. Keuangan Negara dan Daerah	3		≠Prodi	5. Pelayanan Publik	2	1	3
		6. Kebijakan Pertanahan	2		≠Prodi	6. Perencanaan dan rekrutmen SDM-SP	1	2	3
		7. Manajemen Pemerintahan Daerah	3		≠Prodi	7. Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan	1	2	3
		8. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia	3			8. Tata Naskah Dinas II	0	1	1
			22			9. Gladi Manajemen Pemerintahan	0	1	1
						10. Praktek Lapangan II	0	2	2
						11. Public Speaking	0	1	1
							39	61	23
	V	1. Teori Organisasi	3		V	1. Statistika Sosial (Semula SMT IV)	2	1	3

		2. Teori Pembangunan	3			2. Ekologi Pemerintahan	2	0	2
		3. Ekologi Pemerintahan	2			3. Manajemen Asset	1	1	2
		4. Analisis Potensi Wilayah	3			4. Manajemen Konflik dan Kolaborasi	1	1	2
		5. Penanggulangan Korupsi	2			5. Manajemen Strategik	1	1	2
		6. Metode Penelitian Sosial	3			6. Analisis Potensi Wilayah	1	1	2
		7. Pelayanan Publik	3			7. Otonomi dan Desentralisasi Pemda	1	1	2
		8. Politik, Desentralisasi dan otonomi Daerah	2		≠Prodi	8. MSdM Strategik	1	2	3
		9. Manajemen Strategik	3		≠Prodi	9. Sistem Informasi Kepegawaian	1	2	3
			24			10. Praktek Permodelan Kebijakan	0	1	1
						11. Praktek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah	0	1	1
							48	52	23
	VI	1. Manajemen Konflik dan Kolaborasi	2		VI	1. Metodologi Penelitian Sosial (Semula SMT V)	2	1	3
		2. Manajemen asset	2			2. . Etika Pemerintahan (semula SMT III)	1	1	2
		3. Pengawasan Pemerintahan	2			3. Administrasi Pertanahan	1	1	2
		4. Manajemen Perubahan	3		≠Prodi	4. Kebijakan Manajemen Sumber Daya Sektor Publik	1	1	2
		5. Manajemen Perbatasan	3		≠Prodi	5. Pengembangan SDM SP	1	1	2
		6. Kebijakan Sumber Daya Aparatur	3		≠Prodi	6. Manajemen Kinerja SDM -SP	1	1	2
		7. Manajemen Sumber Daya Aparatur	3		≠Prodi	7. Sistem Remunerasi dan Kesejahteraan Aparatur	1	2	3
		8. Sistem Informasi Kepegawaian	3		≠Prodi	8. Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur	1	2	3
		9. Perencanaan Rekrutmen Pegawai	3			9. Etiket Keprotokolan Pamong Praja II	0	1	1
			24			10. Praktik Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	1
						11. Praktek Lapangan III	0	2	1

						41	59	22	
	VII	1. Penempatan dan Pengembangan Pegawai	3		VII	1. Seminar Usulan Penelitian Terapan Pemerintahan	1	0	1
		2. Sistem Imbalan dan Pemberhentian Pegawai	3			2. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (semula SMT IV)	2	1	3
		3. Etika Aparatur Pemerintah	3		≠Prodi	3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1	2	3
		4. Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur	3		≠Prodi	4. Manajemen ASN	1	2	3
		5. Seminar SumberDaya Aparatur	2			5. Seminar SDM-SP	1	2	3
					≠Prodi	6. Perilaku Organisasi dan Budaya Kerja SDM	1	1	2
					≠Prodi	7.Reformasi Birokrasi SDM	2	1	3
						8. Praktek Penyusunan Laporan Pemerintahan	0	1	1
						9. Bhakti Karya Praja /Latsitarda	0	2	2
							41	59	22
	VIII	1. Seminar UsulanMagang	1		VIII	1. Praktik Lapangan IV	0	2	2
		2. Magang Penelitian	2			2. Skripsi (semula LA)	0	4	4
		3. Laporan Akhir	4				0	100	6
			7				47%	53%	156
			148				27%	73%	
Prodi Baru					Studi APD	1. Pancasila	1	1	2
					I	2. Agama	1	1	2
					SDA	3. Kewarganegaraan	1	1	2
						4. Bahasa Indonesia	1	1	2
						5. Bahasa Inggris	0	2	2
						6. Pengantar Filsafat	2	0	2

					7. Pengantar Ilmu Pemerintahan (semula smt II)	3	0	3
					8. Kepamongprajaan	2	1	3
					9.. Praktik Komputer I	0	1	1
						58	42	19
				II	1. Pengantar Ilmu Hukum (semula SMT I)	2	0	2
				SDA	2. Pengantar Sosiologi	1	1	2
					3. Pengantar Antropologi	2	0	2
					4. Pengantar Ilmu Politik (tadinya smt I)	2	0	2
					5. Pengantar Ilmu Ekonomi	1	1	2
					6. Pengantar Ilmu Kependudukan	1	1	2
					7. Pengantar Ilmu Administrasi	1	1	2
					8. Tata Naskah Dinas I	0	1	1
					9. Etiket dan Keprotokolan Pamong Praja I (praktek kehumasan Etiket dan protokol)	0	1	1
					10. Praktek Lapangan I	0	2	2
						56	44	18
				III	1. Administrasi Kepegawaian	1	1	2
				1-7 sda	2. . Komunikasi Pemerintahan	1	1	2
					3. .Pemerintahan Desa	1	2	3
					4. Sistem Politik Indonesia	2	1	3
					5. Sistem Pemerintahan Indonesia	2	1	3
					6. Administrasi Pemerintahan	1	1	2
					7. Dasar-dasar Manajemen	2	0	2
				prodi	8. Filsafat IlmuPemerintahan	3	0	2
				prodi	9. Ilmu Pemerintahan Lanjutan	1	2	2
						61	39	23

				IV	1. Kebijakan Publik	2	1	3
					2. . Hukum Tata Usaha Negara	2	1	3
					3. Pendidikan Anti Korupsi	1	1	2
					4. Keuangan Negara dan Daerah	1	1	2
					5. Pelayanan Publik	2	1	3
				prodi	6. Ilmu Administrasi Negara	1	1	2
				prodi	7.Administrasi Perpajakan Daerah	1	1	2
					8. Tata Naskah Dinas II	0	1	1
					9, Gladi Manajemen Pemerintahan	0	1	1
					10. Praktek Lapangan II	0	2	2
					11. Public Speaking	0	1	1
						45	55	22
				V	1. Statistika Sosial	2	1	3
					2. Ekologi Pemerintahan	2	0	2
					3.Manajemen Asset	1	1	2
					4. Manajemen Konflik dan Kolaborasi	1	1	2
					5. Manajemen Strategik	1	1	2
					6. Analisis Potensi Wilayah	1	1	2
					7. Otonomi dan Desentralisasi Pemda	1	1	2
				Prodi	8. SIM Pemerintahan	1	1	2
				Prodi	9. Administrasi Kerjasama Daerah	1	1	2
					10. Praktek Permodelan Kebijakan	0	2	2
					11. Praktek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah	0	2	2
						48	52	23
				VI	1. Metodologi Penelitian Sosial	2	1	3

					2. Etika Pemerintahan	1	1	2
					3. Administrasi Pertanahan	1	1	2
				prodi	4. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1	2	3
				prodi	5. Administrasi Penyusunan Logistik Daerah	1	2	3
				prodi	6. Administrasi Perencanaan Pemda	1	2	3
				prodi	7. Administrasi Kependudukan dan Capil	1	1	2
					8. Etiket dan Keprotokolanan Pamong Praja II	0	1	1
					9. Praktik Pengadaan Barang dan Jasa	0	2	2
					10. Praktek Lapangan III	0	2	2
						35	65	23
				VII	1. Seminar Usulan Penelitian Terapan Pemerintahan	1	0	1
					2. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia	2	1	3
				prodi	3. Teknik Pengambilan Keputusan	1	2	3
				Prodi	4. Inovasi Pemerintahan Daerah	1	2	3
				Prodi	5. Seminar APD	1	2	3
				Prodi	6. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	1	2	3
				Prodi	7. Manajemen Perbatasan Daerah	1	1	2
					8. Praktek Penyusunan Laporan Pemerintahan	0	2	2
					9. Bhakti Karya Praja /Latsitarda	0	2	2
						36	64	22
				VIII	1. Praktik Lapangan IV	0	2	2
					2. Skripsi (semula LA)	0	4	4
						0	100	6

						46%	54%	156	
Prodi Baru					Teknologi	1. Pancasila	1	1	2
					Rekayasa	2. Agama	1	1	2
					Informasi	3. Kewarganegaraan	1	1	2
					Pemerintahan	4. Bahasa Indonesia	1	1	2
					I	5. Bahasa Inggris	0	2	2
						6. Pengantar Filsafat	2	0	2
						7. Pengantar Ilmu Pemerintaha	3	0	3
						8. Kepamongprajaan	2	1	3
						9.. Praktik Komputer I	0	1	1
							58	42	19
					II	1. Pengantar Ilmu Hukum (semula SMT I)	2	0	2
						2. Pengantar Sosiologi	1	1	2
						3. Pengantar Antropologi	2	0	2
						4. Pengantar Ilmu Politik (tadinya smt I)	2	0	2
						5. Pengantar Ilmu Ekonomi	1	1	2
						6. Pengantar Ilmu Kependudukan	1	1	2
						7. Pengantar Ilmu Administrasi	1	1	2
						8. Tata Naskah Dinas I	0	1	1
						9. Etiket dan Keprotokolan Pamong Praja I	0	1	1
						10. Praktek Lapangan I	0	2	2
							56	44	18
					III	1. Administrasi Kepegawaian	1	1	2
						2. Komunikasi Pemerintahan	1	1	2
						3. .Pemerintahan Desa	1	2	3
						4. Sistem Politik Indonesia	2	1	3

					5. Sistem Pemerintahan Indonesia	2	1	3
					6. Administrasi Pemerintahan	1	1	2
					7. Dasar-Dasar Manajemen	2	0	2
				prodi	8. Basis Data	1	2	3
				prodi	9. Algoritma dan Pemrograman	1	2	23
						61	39	23
				IV	1. Kebijakan Publik	2	1	3
					2. . Hukum Tata Usaha Negara	2	1	3
					3. Pendidikan Anti Korupsi	1	1	2
					4. Keuangan Negara dan Daerah	1	1	2
					5. Pelayanan Publik	2	1	3
				prodi	6. Aplikasi Komputer	0	2	2
				prodi	7.Struktur Data	1	2	3
					8. Tata Naskah Dinas II	0	1	1
					9, Gladi Manajemen Pemerintahan	0	1	1
					10. Praktek Lapangan II	0	2	2
					11. Public Speaking	0	1	1
						39	61	23
				V	1. Statistika Sosial	2	1	3
					2. Ekologi Pemerintahan	2	0	2
					3.Manajemen Asset	1	1	2
					4. Manajemen Konflik dan Kolaborasi	1	1	2
					5. Manajemen Stratejik	1	1	2
					6. Analisis Potensi Wilayah	1	1	2
					7. Otonomi dan Desentralisasi Pemda	1	1	2
				Prodi	8. Analisis Perencanaan dan Sistem Informasi	2	1	3

					Prodi	9. Governance Digital	2	1	3
						10. Praktek Permodelan Kebijakan	0	1	1
						11. Praktek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah	0	1	1
							57	43	23
					VI	1. Metodologi Penelitian Sosial	2	1	3
						2. Etika Pemerintahan	1	1	2
						3. Administrasi Pertanahan	1	1	2
					prodi	4. Sistem Operasi	1	1	2
					prodi	5. Multimedia	1	1	2
					prodi	6. Pemrograman Web	1	2	3
					prodi	7. Pemrograman Mobile	1	2	3
					Prodi	8. Sistem Informasi Pemerintahan	1	1	2
						9. Etiket dan Keprotokolanan PamongPraja II	0	1	1
						10. Praktik Pengadaan Barang/Jasa	0	1	1
						11. Praktek Lapangan III	0	2	2
							39	61	23
					VII	1. Seminar Usulan Penelitian Terapan Pemerintahan	1	0	1
						2. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia	2	1	3
					prodi	3. Sistem Informasi Geografis	1	2	3
					Prodi	4. Pemrograman Dekstop	1	1	2
					Prodi	5. Komunikasi Data dan Jaringan Komputer	1	2	3
					Prodi	6. Manajemen Proyek Teknologi Informasi	1	1	2
					Prodi	7. Manajemen Perubahan	1	1	2
					Prodi	8. Keamanan Sistem Informasi	1	2	3
						9. Praktik Penyusunan Laporan Pemerintahan	0	1	1

					9. Bhakti Karya Praja /Latsitarda	0	2	2	
						41	59	22	
				VIII	1. Praktik Lapangan IV	0	2	2	
					2. Skripsi (semula LA)	0	4	4	
						0	100	6	
						46%	54%	156	
FAKULTAS BARU				Studi Praktik kepolisian Tata Pamong I	1. Pancasila	1	1	2	
HUKUM TATA PEMERINTAHAN					2. Agama	1	1	2	
					3. Kewarganegaraan	1	1	2	
					4. Bahasa Indonesia	1	1	2	
					5. Bahasa Inggris	0	2	2	
					6. Pengantar Filsafat	2	0	2	
					sda	7. Pengantar Ilmu Pemerintaha	3	0	3
						8. Kepamongprajaan	2	1	3
						9.. Praktik Komputer I	0	1	1
						58	42	19	
				II	1. Pengantar Ilmu Hukum (semula SMT I)	2	0	2	
					2. Pengantar Sosiologi	1	1	2	
					3. Pengantar Antropologi	2	0	2	
				sda	4. Pengantar Ilmu Politik	2	0	2	
					5. Pengantar Ilmu Ekonomi	1	1	2	
					6. Pengantar Ilmu Kependudukan	1	1	2	
					7. Pengantar Ilmu Administrasi	1	1	2	
					8. Tata Naskah Dinas I	0	1	1	
					9. Etiket dan Keprotokolanan Pamong Praja I	0	1	1	

					10. Praktek Lapangan I	0	2	2
						56	44	18
				III	1. Administrasi Kepegawaian	1	1	2
					2. Komunikasi Pemerintahan	1	1	2
					3. Pemerintahan Desa	1	2	3
					4. Sistem Politik Indonesia	2	1	3
					5. Sistem Pemerintahan Indonesia	2	1	3
					6. Administrasi Pemerintahan	1	1	2
					7. Teori Pembangunan	2	0	2
					8. Sistem Hukum Indonesia	2	1	3
					9. Public Speaking	0	1	1
					10. Praktik Komputer II	0	1	1
						55	45	22
				IV	1. Kebijakan Publik	2	1	3
				Prodi	2. Teknik Penyusunan Per-UU	1	2	3
				Prodi	3. Manajemen Pemerintahan Daerah	1	2	3
				Prodi	4. Hukum Tata Pemerintahan	2	1	3
				Prodi	5. Birokrasi	1	1	2
				Prodi	6. Perencanaan Dasar	1	1	2
				Prodi	7. Analisis Sosial	1	2	3
					8. Tata Naskah Dinas II	0	1	1
					9. Gladi Manajemen Pemerintahan	0	1	1
					10. Praktek Lapangan II	0	2	2
					11. Public Speaking	0	1	1
						39	61	23
				V	1. Statistika Sosial	2	1	3

					2. Ekologi Pemerintahan	1	1	2
				prodi	3.Hukum Acara Pidana, Perdata dan TUN	1	2	3
					4. Sistem Peradilan di Indonesia	1	2	3
					5. Tindak Pidana Korupsi	1	1	2
					6. Politik Desentralisasi dan Otda	1	1	2
					7. Psikologi Sosial	2	1	3
					8. Dasar-Dasar PPNS	2	1	3
					9. Praktek Permodelan Kebijakan	0	1	1
					10. Praktek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah	0	1	1
						48	52	23
				VI	1. Metodologi Penelitian Sosial	2	1	3
					2. Etika Pemerintahan	1	1	2
					3. Administrasi Pertanahan	1	1	2
				Prodi	4. Konflik dan resolusi Sosial	1	2	3
				Prodi	5. Teknik Penertiban Umum	1	1	2
				Prodi	6. Manajemen Penyelidikan	1	2	3
				Prodi	7. Gavernan Digital	1	1	2
					8. Etiket dan Keprotokolam Pamong Praja II	0	1	1
					9. Praktik Pengadaan Barang/Jasa	0	1	1
					10. Praktek Lapangan III	0	2	2
						38	62	21
				VII	1. Seminar Usulan Penelitian Terapan Pemerintahan	1	0	1
					2. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia	2	1	3
					3. Seminar Kepolisian Pamong Praja	3	0	3

					4. Dasar-Dasar Intelejen	1	1	2
					5. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Linmas	1	1	2
					6. Teknik Membangun Konsensus	1	1	2
					7. Etika Tata Pamong	1	1	2
					8. Praktik Pengenalan dan Penggunaan Peralatan Pol-PP	1	1	2
					9. Praktik Penanganan Huru -Hara	1	1	2
					10. Praktik Penyusunan Laporan Pemerintahan	0	1	1
					11. Bhakti Karya Praja /Latsitarda	0	2	2
						55	45	22
					1. Praktik Lapangan IV	0	2	2
					2. Skripsi (semula LA)	0	4	4
						0	100	6
						46%	54%	156
				Manajemen Keamanan dan keselamatan Publik	1. Pancasila	1	1	2
					2. Agama	1	1	2
					3. Kewarganegaraan	1	1	2
					4. Bahasa Indonesia	1	1	2
				I	5. Bahasa Inggris	0	2	2
				sda	6. Pengantar Filsafat	2	0	2
					7. Pengantar Ilmu Pemerintaha	3	0	3
					8. Kepamongprajaan	2	1	3
					9., Praktik Komputer I	0	1	1
						58	42	19
				II	1. Pengantar Ilmu Hukum (semula SMT I)	2	0	2
					2. Pengantar Sosiologi	1	1	2

					3. Pengantar Antropologi	2	0	2
					4. Pengantar Ilmu Politik	2	0	2
					5. Pengantar Ilmu Ekonomi	1	1	2
				sda	6. Pengantar Ilmu Kependudukan	1	1	2
					7. Pengantar Ilmu Administrasi	1	1	2
					8. Tata Naskah Dinas I	0	1	1
					9. Etiket dan Keprotokolan Pamong Praja I	0	1	1
					10. Praktek Lapangan I	0	2	2
						56	44	18
				III	1. Administrasi Kepegawaian	1	1	2
					2. Komunikasi Pemerintahan	1	1	2
					3. Pemerintahan Desa	1	2	3
					4. Sistem Politik Indonesia	2	1	3
				sda	5. Sistem Pemerintahan Indonesia	2	1	3
					6. Administrasi Pemerintahan	1	1	2
					7. Teori Pembangunan	2	0	2
					8. Sistem Hukum Indonesia	2	1	3
					9. Public Speaking	0	1	1
					10. Praktik Komputer II	0	1	1
						55	45	22
				IV	1. Kebijakan Publik	2	1	3
					2. Teknik Penyusunan Per-UU	1	2	3
					3. Manajemen Pemerintahan Daerah	1	2	3
					4. Hukum Tata Pemerintahan	2	1	3
					5. Birokrasi	1	1	2
					6. Perencanaan Dasar	1	1	2

					7. Sistem Ketahanan Nasional	2	1	3
					8. Tata Naskah Dinas II	0	1	1
					9. Gladi Manajemen Pemerintahan	0	1	1
					10. Praktek Lapangan II	0	2	2
						43	57	1
								23
				V	1. Statistika Sosial	2	1	3
					2. Ekologi Pemerintahan	1	1	2
					3. Hukum Acara Pidana, Perdata dan TUN	1	2	3
					4. Sistem Peradilan di Indonesia	1	2	3
					5. Tindak Pidana Korupsi	1	1	2
					6. Politik Desentralisasi dan Otda	1	1	2
				prodi	7. Pengantar Ancaman Multi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan	2	1	3
				prodi	8. Studi Keamanan Nasional	1	1	2
					9. Praktek Permodelan Kebijakan	0	1	1
					10. Praktek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah	0	1	1
						48	52	23
				VI	1. Metodologi Penelitian Sosial	2	1	3
					2. Etika Pemerintahan	1	1	2
					3. Administrasi Pertanahan	1	1	2
					4. Manajemen Pra Bencana	1	2	3
					5. Manajemen Resiko Bencana	1	2	3
					6. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kebencanaan	1	1	2

					7. Manajemen Pemadaman Kebakaran	1	2	3
					8. Etiket dan Keprotokolan Pamong Praja II	0	1	1
					9. Praktik Pengadaan Barang/Jasa	0	1	1
					10. Praktek Lapangan III	0	2	2
						36	64	22
				VII	1. Seminar Usulan Penelitian Terapan Pemerintahan	1	0	1
					2. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia	2	1	3
					3. Manajemen Pasca Bencana	1	2	3
					4. Mitigasi Bencana	1	2	3
					5. Kontrol Pemerintah dan Komando Dalam Bencana	1	2	3
					6. Manajemen Logistik Bencana	1	2	3
					7. Seminar Keamanan dan Keselamatan Publik	1	0	1
					8. Praktik Penyusunan Laporan Pemerintahan	0	1	1
					9. Bhakti Karya Praja/Latsitarda	0	2	2
						45	55	22
					1. Praktik Lapangan IV	0	2	2
					2. Skripsi (semula LA)	0	4	4
						0	100	6
						46 %	54 %	
Prodi ADMINDUKAPIL (I	1. Pendidikan Pancasila	2		DUKCAPIL	1	1	2
		2. Pendidikan Agama	2		Pindahan dari	1	1	2
		3. Pendidikan Kewarganegaraan	2		FMP	1	1	2
		4. Bahasa Indonesia	2		I	1	1	2
		5. Bahasa Inggris	2		SDA	0	2	2
		6. Pengantar Filsafat	3			2	0	2

		7. Pengantar Ilmu Politik	3		≠	7. Pengantar Ilmu Pemerintahan (semula Smt II)	3	0	3
		8. Pengantar Ilmu Hukum	3		≠	8. Kepamongprajaan (semula Smt III)	2	1	3
			19		≠	9. Praktik Komputer I	0	1	1
							58	42	19
	II	1 Pengantar Sosiologi	2						
		2. Pengantar Antropologi	2		II	1. Pengantar Ilmu Hukum (Semula smt 1)	2	0	2
		3. Pengantar Ilmu Pemerintahan	3			2. Pengantar Sosiologi	1	1	2
		4. Pengantar Ilmu Ekonomi	2		SDA	3. Pengantar Antropologi	2	0	2
		5. Pengantar Ilmu Kependudukan	2			4. Pengantar Ilmu Politik (Semula semester 1)	2	0	2
		6. Pengantar Ilmu Administrasi	2			5. Pengantar Ilmu Ekonomi	1	1	2
		7. Dasar-dasar Manajemen	2			6. Pengantar Ilmu Kependudukan	1	1	2
		8. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	2			7. Pengantar Ilmu Administrasi	1	1	2
			17			8. Tata Naskah Dinas I	0	1	1
	III	1. Etika Pemerintahan	2			9. Etiket dan Keprotokolan Pamong Praja I	0	1	1
		2. Sistem Politik Indonesia	3			10. Praktek Lapangan I	0	2	2
		3. Sistem Pemerintahan Indonesia	3				56	44	18
		4. Administrasi Kepegawaian	2		III	1. Administrasi Kepegawaian	1	1	2
		5. Hak Asasi Manusia	2		sda	2. Komunikasi Pemerintahan	1	1	2
		6. Kepamongprajaan	2			3. .Pemerintahan Desa	1	2	3
		7. Sistem Hukum Indonesia	3			4. Sistem Politik Indonesia	2	1	3
		8. Pemerintahan Desa/ Kelurahan	2			5. Sistem Pemerintahan Indonesia	2	1	3
		9. Komunikasi Pemerintahan	2		≠	6. Administrasi Pemerintahan	1	1	2
			21			7. Teori Pembangunan	2	0	2
	IV	1. Ilmu Administrasi Publik	3			8. Sistem Hukum Indonesia	2	1	3
		2. Hukum Tata Usaha Negara	2			9. Public Speaking	0	1	1

		3. Statistika Sosial	3			10. Praktik Komputer II	0	1	1
		4. Kebijakan Publik	3				55	45	22
		5. Keuangan Negara dan Daerah	3						
		6. Kebijakan Pertanahan	2		IV	1. Kebijakan Publik	2	1	3
		7. Manajemen Pemerintahan Daerah	3		SDA/prodi	2. Teknik Penyusunan Per-UU	1	2	3
		8. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia	3			3. Manajemen Pemerintahan Daerah	1	2	3
			22		prodi	4. Hukum Tata Pemerintahan	2	1	3
	V	1. Teori Organisasi	3		prodi	5. Birokrasi	1	1	2
		2. Teori Pembangunan	3		prodi	6. Perencanaan Dasar	1	1	2
		3. Ekologi Pemerintahan	2		prodi	7. Sistem Ketahanan Nasional	2	1	3
		4. Analisis Potensi Wilayah	3		prodi	8. Tata Naskah Dinas II	0	1	1
		5. Penanggulangan Korupsi	2			9. Gladi Manajemen Pemerintahan	0	1	1
		6. Metode Penelitian Sosial	3			10. Praktek Lapangan II	0	2	2
		7. Pelayanan Publik	3				43	57	1
		8. Politik, Desentralisasi dan otonomi Daerah	2						23
		9. Manajemen Strategik	3		V	1. Statistika Sosial	2	1	3
			24			2. Ekologi Pemerintahan	1	1	2
	VI	1. Manajemen Konflik dan Kolaborasi	2			3. Hukum Acara Pidana, Perdata dan TUN	1	2	3
		2. Manajemen asset	2			4. Sistem Peradilan di Indonesia	1	2	3
		3. Pengawasan Pemerintahan	2			5. Tindak Pidana Korupsi	1	1	2
		4. Manajemen Perubahan	3			6. Politik Desentralisasi dan Otda	1	1	2
		5. Manajemen Perbatasan	3			7. Dasar-dasar Demografi	2	1	3
		6. Manajemen Sumber daya Kependudukan	3			8. Perbandingan Kebijakan Kependudukan	1	1	2
		7. Kebijakan Kependudukan di	3			9. Praktik Permodelan Kebijakan	0	1	1

		Indonesia							
		8. Sistem Administrasi Kependudukan	3			10. Praktek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah	0	1	1
							45	55	23
			21						
	VII	1. Demografi	3		VI	1. Metodologi Penelitian Sosial	2	1	3
		2. Ekologi Kependudukan	3			2. Etika Pemerintahan	1	1	2
		3. Pemberdayaan Gender	3			3. Administrasi Pertanahan	1	1	2
		4. Pencatatan Sipil	3			4. Proses Legislasi	1	2	3
		5. Migrasi Penduduk	3			5. Teknik Demografi	1	2	3
		6. Teknik Analisis Kependudukan	2			6. Sistem Informasi Adm. Kependudukan	1	1	2
		7. Seminar Kependudukan dan Catatan Sipil	2			7. Hukum Positif Adm. Kependudukan	1	2	3
			19			8. Etiket dan keprotokolan Pamong Praja II	0	1	1
	VIII	1. Seminar Usulan Magang	1			9. Praktik Pengadaan barang/ Jasa	0	1	1
		2. Magang Penelitian	2			10. Praktik Lapangan III	0	2	2
		3. Laporan Akhir	4				36	64	22
			7						
			150		VI	1. Seminar Usulan Penelitian Terapan Pemerintahan	1	0	1
						2. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia	2	1	3
						3. Manajemen Pasca Bencana	1	2	3
						4. Mitigasi Bencana	1	2	3
						5. Kontrol Pemerintah dan Komando Dalam Bencana	1	2	3
						6. Manajemen Logistik Bencana	1	2	3
						7. Seminar Keamanan dan Keselamatan Publik	1	0	1

					8. Praktik Penyusunan Laporan Pemerintahan	0	1	1
					9. Bhakti Karya Praja/Latsitarda	0	2	2
						45	55	22
					1. Praktik Lapangan IV	0	2	2
					2. Skripsi (semula LA)	0	4	4
						0	100	6
						46 %	54 %	
				VII	1. Seminar Usulan Penelitian Terapan Pemerintahan	1	0	1
					2. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia	2	1	3
					3. Teknik Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	2	3
					4. Sistem Pelayanan data dan Dokumen Kependudukan	1	2	3
					5. Ekologi Kependudukan danPemberdayaan Gender	1	2	3
					6. Migrasi Penduduk	1	2	3
					7. Seminar Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0	1
					8. Praktik Penyusunan Laporan Pemerintahan	0	1	1
					9. Bhakti Karya Praja/Latsitarda	0	2	2
						45	55	22
				VIII	1. Praktik Lapangan IV	0	2	2
					2. Skripsi (semula LA)	0	4	4
						0	100	6
						46 %	54 %	

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Peraturan Rektor IPDN No. 423-5-764 Tahun 2013 semula di IPDN terdapat 2 fakultas dengan 5 prodi, kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Rektor Nomor 423.5-342 tahun 2019 maka di IPDN terdapat 3 fakultas dan 10 program studi
2. Dari jumlah mata kuliah yang harus diselesaikan dalam 8 semester sebelumnya berjumlah \pm 50 dengan jumlah SKS antara 148-150 namun setelah perubahan menjadi Peraturan Rektor Nomor 423.5-342 tahun 2019 tentang Kurikulum Pengajaran dan Pelatihan Program Diploma IV maka mata kuliah yang harus diselesaikan selama 8 semester lebih banyak menjadi \pm 70 dengan jumlah SKS sebanyak 156-
3. Pengelompokan mata kuliah menurut Peraturan Rektor IPDN No. 423-5-764 Tahun 2013 terbagi menjadi kelompok mata kuliah institusi, kelompok mata kuliah fakultas dan kelompok mata kuliah prodi. dan menurut Peraturan Rektor Nomor 423.5-342 tahun 2019 pengelompokan mata kuliah ddibagi menjadi kelompok matakuliah institusi, penunjang dan prodi. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16

Persentase Kelompok Matakuliah

Fakultas	Prodi	Σ MK	Σ SKS (SMT)	% SKS Institusi	% SKS Fakultas	% SKS Prodi
Peraturan Rektor IPDN No. 423-5-764 Tahun 2013						
Politik Pemerintahan	1. Politik Pemerintahan	56	150	107 (71,3 %)	18 (12 %)	25 (16,6 %)
	2. Pembangunan dan Pemberdayaan	56	150	107 (71,3 %)	18 (12 %)	26 (17,3 %)
Manajemen Pemerintahan	1. Adminduk Capil	57	150	107 (71,3 %)	15 (10 %)	26 (17,3 %)
	2. Keuangan Daerah	57	148	107 (72,3 %)	15 (10,1 %)	24 (16 %)
	3. MSDM	56	148	107 (72,3 %)	15 (10,1 %)	26 (17,6%)

Peraturan Rektor IPDN No 423.5-342 Tahun 2019						
Fakultas	Prodi	Σ MK	Σ SKS (SMT)	% SKS Institusi	% SKS Penunjang	% SKS Prodi
Politik Pemerintahan	1. Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	70	157	18 (11 %)	17 (27 %)	105 (67 %)
	2. Kebijakan Publik	70	157	18 (11 %)	17 (27 %)	105 (67 %)
	3. Politik Indonesia Terapan	70	157	18 (11 %)	17 (27 %)	105 (67 %)
Manajemen Pemerintahan	1. Keuangan Publik	74	156	18 (12 %)	94 (60 %)	44 (28%)
	2. Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan	73	157	18 (12 %)	95 (61 %)	44 (28%)
	3. Administrasi Pemerintahan Daerah	71	156	18 (12 %)	99 (63 %)	39 (25%)
	4. Manajemen SDM Sektor Publik	72	156	18 (12 %)	94 (60 %)	44 (28%)
Hukum Tata Pemerintahan	1. Kependudukan dan Cakil	70	154	18 (12 %)	27 (18 %)	105 (68%)
	2. Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik	70	154	18 (12 %)	27 (18 %)	105 (68%)
	3. Praktek Perpolisian Tata Pamong	72	154	18 (12 %)	27 (18 %)	106 70%)

Sumber : Peraturan Rektor IPDN No. 423-5-764 Tahun 2013 dan No. 423.5-342 Tahun 2019

Dengan bertambahnya matakuliah yang menjadi standar kelulusan diharapkan menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas. Harapan pengguna lulusan berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dirjen Bangda, BPSDM, Dirjen PMD, Dirjen DUKCAPIL, ADWIL, Dirjen KEUDA yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 20 adalah sebagai berikut :

Perlunya dilakukan *need analysis* terkait dengan sejumlah mata kuliah yang diberikan di IPDN dengan nuansa komponen Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan duduk bersama dengan Narasumber dari tiap Direktorat

atau Badan di Kementerian Dalam Negeri untuk membahas mata kuliah yang dapat menjadi penunjang dalam pemberian pengetahuan kepada mahasiswa. Adapun yang wajib dikuasai oleh semua mahasiswa sebagai kader pamong ke depan adalah wawasan kebangsaan melalui penguasaan kewilayahan. Hal tersebut di kemukakan oleh salah satu Narasumber dari Direktorat Administrasi Kewilayahan yang mengatakan bahwa:

Mahasiswa IPDN wajib paham dengan masalah kewilayahan. Karena pengetahuan kewilayahan merupakan dasar bagi mahasiswa mengingat ke depan minimal mereka bekerja di kecamatan atau kelurahan. Mereka wajib memahami dan mengerti potensi wilayahnya. Berbicara kewilayahan bukan cuma sekedar mengetahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, tetapi juga belajar letak wilayah suatu daerah, dengan karakteristik daerah dan potensinya. Minimal praja mengetahui karakteristik daerah asal mereka, dan bisa menceritakan bentangan-bentangan wilayahnya, potensi alam yang dimiliki wilayahnya, jumlah penduduk, lahan pertanian dan perkebunan yang tersedia, termasuk pengetahuan terkait peternakan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan kewilayahan. Mereka juga harus paham batas-batas wilayah. Kasarnya mereka belajar kembali peta buta seperti pengetahuan-pengatahuan terkait peta di era siswa-siswi SD /SMP tahun 1990. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap negara.

Di samping masalah kewilayahan, mahasiswa IPDN wajib paham dan mengerti betul dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Narasumber dari Direktorat Pembangunan Daerah, mengemukakan bahwa:

Lulusan IPDN selayaknya sudah familier tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dimaksudkan ketika ditugaskan minimal mereka sudah mengetahui dan benar-benar paham tentang tugas-tugas pemerintahan daerah, termasuk paham ketentuan berbagai aturan lainnya, sehingga ketika permasalahan-permasalahan timbul saat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, mereka dapat mengerti dan menemukan cara untuk memecahkannya.

Demikian juga dengan pengetahuan yang bersifat teknis. Narasumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Direktorat Adwil, Direktorat Bangda dan BPSDM, mengemukakan bahwa

Mahasiswa IPDN perlu dibekali dengan pengetahuan teknis penunjang. seperti kemampuan IT. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan

sangat cepat, sementara ketika mahasiswa IPDN ditempatkan dan atau ditugaskan untuk masalah yang agak teknis, mereka tertinggal. Sehingga mereka harus belajar ulang kembali. Bagi yang mau belajar dimungkinkan mereka untuk mengembangkan pengetahuan mereka, tetapi ketika mereka tidak mau belajar ujungnya mereka lari dari tugas dan tanggung jawab. Hal tersebut ditemui di sejumlah tempat, ketika mereka tidak mampu menguasai ilmu di tempat mereka ditugaskan, ada kecenderungan melarikan diri dari tugas. Ditambah dengan konsep siap, dimana di IPDN filosofi siap berarti siap untuk melakukan dan mengerjakan. Tetapi temuan di lapangan, kata siap dipakai hanya sekedar dimulut tetapi tidak ditindaklanjuti dengan aksi nyata melalui kerja.

IPDN memang tidak meluluskan teknisi, namun jika memang menunjang keberhasilan peserta didik dan menambah daya saing lulusan hal-hal yang bersifat teknis tersebut bisa dikolaborasikan dengan SDM dari komponen kementerian terkait sebagai dosen tamu. Selain itu juga sebagai terobosan dalam meng-up date kebijakan dan peraturan baru agar sesuai dengan bidang ilmu yang diberikan dan tuntutan zaman. Sebagaimana dikemukakan responden dari Dukcapil dalam wawancara yang kami lakukan pada tanggal 16 Juni 2019 di ruang kerjanya bahwa :

Disdukcapil pada dasarnya siap membantu untuk menyiapkan lulusan IPDN agar lebih memahami sebagaimana telah dilakukan dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sebagai contoh mata kuliah yang terkait dengan jurusan Kependudukan dan Catatan sipil, menurut narasumber dari Dukcapil ada pengetahuan pengetahuan dalam mata kuliah tersebut sudah tidak relevan lagi, sementara ada ilmu yang lebih urgen yang harusnya diberikan. Hal tersebut akan dapat diketahui ketika kita dapat berkolaborasi dengan direktorat Dukcapil terkait dengan perkembangan terbaru terkait dengan kependudukan dan mereka siap berbagi pengetahuan tersebut. Sebaiknya SIAK dijadikan matakuliah, ke depan semua paperless dan migrasi kurang tepat jika dijadikan sebagai matakuliah karena migrasi hanya bagian dari mobilitas penduduk.

Kendala yang ditemui lulusan dalam hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya teknis sebenarnya dapat dipecahkan dengan cara membuka diri dan bekerja sama serta berkolaborasi dengan SDM lainnya yang bukan dari IPDN. Hal tersebut akan dapat dipecahkan. Mengingat kemampuan teknis baik yang berhubungan dengan kewilayahan, keuangan, ataupun dengan catatan sipil dan pengetahuan lainnya biasanya dimiliki SDM yang bukan lulusan dari IPDN. Hal

itu tampak dari apa yang dikemukakan oleh Narasumber dari Adwil dan Bangda, Dukcapil mereka mengemukakan bahwa:

Ketika kondisi mereka tidak paham dengan pekerjaan harusnya mereka mencoba belajar dengan kawan-kawan di lingkungannya yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan bersifat teknis yang kebetulan posisinya sebagai outsorsing, sehingga mereka akan dapat menggali ilmu. Tetapi ada beberapa yang tidak mencoba memanfaatkan potensi dan kemampuan outsourcing yang berada di seputar mereka untuk menimba ilmu. Banyak outsourcing yang berasal dari berbagai disiplin ilmu lulusan Perguruan Tinggi ternama di Indonesia. Kecenderungan ini yang cukup di sayangkan.

Kecenderungan di atas menimbulkan kesan eksklusifitas dari lulusan IPDN yang seolah tampak hanya mau membaur dengan sesama lulusan IPDN. Tanda petik menurut narasumber “seolah” jadi belum dapat diambil sebagai kesimpulan menurut para narasumber. Mengingat kebiasaan bergerombol hanya dengan sesama lulusan IPDN. Walaupun hal seperti ini wajar. Tetapi kalau dibiarkan juga akan terjadi gap antara lulusan IPDN dan bukan lulusan IPDN namun juga akan dapat membuat situasi kerja tidak/kurang kondusif. Menurut salah satu narasumber dari DPKAD mengatakan bahwa:

Kompetensi dan kemampuan seseorang di bangun dari dirinya. Kompetensi itu dapat diperoleh melalui pengalaman dan pengalaman diperoleh dari siapapun. Setelah menjadi pegawai lepaskan semua atribut lulusan non lulusan sama saja, tapi bagaimana membangun Kementerian Dalam Negeri dalam satu nuansa kebersamaan dan saling melengkapi. Bukan almanater yang membuat kita besar tetapi potensi dan kemampuan diri kita dan dapat membuktikan di lapangan yang akan membuat kita besar. Senior dan lainnya hanya aspek pelengkap, tetapi hakekatnya kompetensi dirilah yang akan membuat diri kita lebih laku jual dimanapun. Karena indikator keberhasilan bukan seberapa tinggi jabatan kita tetapi seberapa maslahat dan manfaat diri kita bagi bangsa, dan masyarakat.

Wawancara dengan beberpa nara sumber di lingkungan Kemendagri dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Hidupkan minat belajar
- b) Perlunya pendewasaan praja dan perbanyak literasi serta dukungan sarana dan prasarana akses informasi.

- c) Migrasi penduduk itu kurang tepat kalau dijadikan matakuliah lebih tepatnya hanya pokok bahasan bagian dari mobilitas. Justru yang penting dimasukkan dalam mata kuliah itu SIAK.' Khusus prodi dukcapil sebaiknya ada LAB yang LAN-nya bagus untuk layanan adminduk khususnya mata kuliah SIAK karena ke depan paperless.
- d) Lulusan harus faham 32 urusan pemda guna mempercepat dalam memfasilitasi pemda dari apa yang dirumuskan bangsa
- e) Lulusan harus faham Perencanaan daerah yang meliputi pelaksanaan, fasilitasi dan evaluasi
- f) Lulusan harus paham RPJM sehingga selaras antara pembangunan nasional dan daerah
- g) Lulusan harus paham regulasi_pembangunan daerah, karena dari regulasi tsb. diketahui kewenangan, SPM, dan dasar mengukur pelaksanaan
- h) Lulusan harus faham kewilayahan seperti batas negara, kode wilayah,batas wilayah,batas teritorial
- i) Lulusan harus paham urusan, pendanaan, pengelolaan barang, pengelolaan anggaran
- j) Pelatihan harus diperkuat diantaranya TND, Administrasi dan regulasi
- k) Mata kuliah yang harus ada MSDM , pengembangan SDM, Teknis kewilayahan, pertanahan, kerjasama daerah, dekonsentrasi, belajar berbicara, kawasan perkotaan, attitude , dan penguasaan IT,perencanaan keuangan, KEUDA, sejarah KEUDA

4.3.2.5 Orientasi Tujuan Kelembagaan

Amanat transformasi kurikulum menurut Kemenristekdikti bahwa pendidikan merupakan tujuan bukan transfer pengetahuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pendidikan diharapkan melibatkan tiga domain yaitu kognitif, affektif dan psikomotorik. Dosen berkedudukan sebagai mentor yang menjembatani peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu, dalam membuat RPS/RPP atau SAP/GBPP diharapkan sampai pada tahap analisis. Hal

ini sesuai dengan pengelompokan 9 jenjang kualifikasi KKNI bahwa jenjang 1-3 termasuk dalam jabatan operator, jenjang 4-6 masuk dalam jabatan teknisi atau analitis jenjang 7-9 masuk dalam jabatan jenjang ahli. Untuk lulusan D4 atau sarjana terapan paling rendah setara dengan jenjang 6.

Pada jenjang 6 lulusan diharapkan mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan keilmuannya, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan dan atau menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu, kata kunci yang digunakan pada jenjang analisis adalah menganalisis, memecahkan, membuat diagram, memisahkan, membuat garis besar, menunjukkan, memilih, mendiagnosis, menemukan dan mengakses.

Secara kelambagaan IPDN adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Maka dari itu orientasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka menyiapkan kader aparatur pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. pendidikan diselenggarakan melalui kegiatan yang disebut dengan istilah Tri Tunggal Terpusat, dimana dalam implementasinya melalui kegiatan pengajaran untuk memenuhi aspek kognitifnya, pengasuhan untuk aspek affektifnya dan psikomotorik melalui kegiatan pelatihan.

4.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurikulum Pendidikan Kader Aparatur dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di IPDN

Faktor yang mempengaruhi transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur di IPDN dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 terbagi menjadi 3 yaitu :

4.3.1 Faktor Internal (Perguruan Tinggi)

Faktor internal yang dimaksud di sini adalah lembaga dalam hal ini IPDN dan komitmen para pengambil kebijakan yang sangat berpengaruh besar

terhadap perubahan dan pengembangan kurikulum. Hal ini disebabkan perguruan tinggi dan komitmen para pengambil kebijakan yang dapat menentukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana prasarana dan SDM yang diperlukan ditetapkan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terpenuhinya sarana prasarana dan SDM inilah yang akan berpengaruh terhadap isi dari kurikulum yang dikembangkan. Selain itu perkembangan teknologi dan terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran akan mendukung implementasi kurikulum yang ditetapkan. Munculnya kurikulum IPDN tahun 2019 merupakan komitmen lembaga dan para pengambil kebijakan dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik guna memenuhi tuntutan standar pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan Kemenristekdikti dimana program D4/Vokasi yang tadinya masih didominasi oleh pengetahuan namun dengan ditetapkannya kurikulum IPDN 2019 ini dominasi pembelajaran yang lebih menitikberatkan pada bidang pelatihan.

Sejalan dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 lembaga dan seluruh civitas akademika dituntut untuk menyesuaikan sistem pelayanan dalam pelaksanaan kurikulum dengan media/sarana yang serba digital. Namun karena adanya keterbatasan dana dan kekhawatiran akan dampak negatif dari penggunaan sistem digital di kalangan praja maka hal tersebut belum bisa terealisasi secara optimal.

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang menyediakan dan menyiapkan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Dimana lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan akan mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Terutama kemampuan guru-guru/dosen terhadap materi ajar dan kemampuan dalam menyampaikan kepada peserta didik yang terlihat dari ketepatan dalam menentukan metode dan media belajar. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap output yang dihasilkan. Maka dari itu untuk meningkatkan keprofesionalan dan kepakaran pendidik setiap tahun IPDN memfasilitasi dosen-dosen yang belum tersertifikasi untuk mengikuti program

sertifikasi dosen. Dosen-dosen yang diusulkan adalah mereka yang namanya muncul di menu layanan sertifikasi dosen pada aplikasi sister.

Menurut Laporan Hasil Monitoring Kegiatan Sertifikasi Dosen Secara online di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri di tahun 2019 yang difasilitasi untuk mengikuti sertifikasi dosen sebanyak .85 orang yang dapat diajukan (D3) sertifikasi pada aplikasi sister sebanyak 68 orang, DYS mengerjakan sertifikasi dosen pada tahap D4 sebanyak 44 dan DYS yang tidak mengerjakan tahap D4 pada aplikasi sister sebanyak 24 orang. Adapun DYS yang tidak lolos tahap 5 pada kegiatan sertifikasi dosen sebanyak 7 orang dan DYS yang lolos sampai dengan tahap kelima sebanyak 37 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.17

Hasil Monitoring Sertifikasi Dosen Tahun 2019

NO.	Uraian	Jumlah (orang)	Keterangan
1..	Dosen yang muncul dalam menu layanan serdos pada aplikasi SISTER	85	
2.	Dosen yang dapat diajukan (D3) sertifikasi dosen pada aplikasi sister	68	
3	Dosen Yang Sertifikasi (DYS) yang mengerjakan Sertifikasi Dosen pada tahap D4	44	
4.	DYS yang sudah diusulkan tetapi tidak mengerjakan sertifikasi dosen pada tahap D4	24	Tidak mengerjakan 19, masih menjabat struktural 1, karena akses 3,terlambat 1
5.	DYS yang dinyatakan tidak lolos ke tahap D5	7	Tidak lolos karena jumlah nilai gabungan <4 (kurang dari 4) sebanyak 6 orang dan 1 orang karena salah memilih jenis tes TKBI
6.	DYS yang dinyatakan lolos ke tahap D5 (mengerjakan Deskripsi Diri), menyelesaikan tahap D5	37	

Sumber : Laporan Hasil Monitoring Kegiatan Sertifikasi Dosen Secara Online tahun 2019

4.3.2.2 Faktor Eksternal

1. Masyarakat

Masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan kurikulum. Karena masyarakat merupakan pengguna lulusan. Disamping itu isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi sosial masyarakat penggunaannya dan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Peran sekolah/ lembaga pendidikan terhadap masyarakat salah satunya adalah menyerap dan melayani aspirasi masyarakat. Perkembangan masyarakat yang heterogen akan menentukan pengembangan kurikulum, dikarenakan lembaga pendidikan tidak hanya sekedar mendidik anak untuk menyelesaikan sekolah namun mempersiapkan anak agar dapat bekerja, berusaha dan hidup layak serta berkepribadian luhur. Melalui pengembangan/transormasi kurikulum hal tersebut bisa diwujudkan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur telah memenuhi kebutuhan masyarakat ?

Dilihat dari pengembangan program studi yang ada, IPDN telah berusaha memenuhi kebutuhan pengguna. Hal ini terlihat dengan dibukanya fakultas dan program studi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna diantaranya adalah program studi Administrasi Pemda, Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Keamanan dan Keselamatan Publik, Praktik Kepolisian Tata Pamong. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.18

Transformasi Kurikulum Melalui Pengembangan Fakultas dan Prodi di IPDN
Program D4 Tahun 2019

LAMA		BARU					
Fakultas	Prodi	Σ MK	Σ SKS (SMT)	Fakultas	Prodi	Σ MK	Σ SKS (SMT)
Politik Pemerintahan	1. Politik Pemerintahan	56	150	Politik Pemerintahan	Politik Indonesia Terapan	70	157
	2. Pembangunan	56	150		Pembangunan	70	157

	dan Pembedayaan				ekonomi dan pemberdayaan masyarakat		
					Studi Kebijakan Publik	70	157
Manajemen Pemerintahan	1. Adminduk Capil	57	150	Manajemen Pemerintahan	SDM Sektor Publik	72	156
	2. Keuangan Daerah	57	148		Keuangan Publik	74	156
	3. MSDM	56	148		Administrasi Pemda	71	156
					Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan	73	157
				Hukum Tata Pemerintahn	Kependudukan dan Capil	70	154
					Keamanan dan Keselamatan Publik	70	154
					Praktik Kepolisian Tata Pamong	72	154

Sumber : Peraturan Rektor IPDN No. 423-5-764 Tahun 2013 dan No. 423.5-342 Tahun 2019

Nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di masyarakat merupakan sebuah sistem yang harus dipelihara. Nilai-nilai dimaksud adalah nilai moral, agama, sosial dan budaya, politik, sosiologis, filosofis, psikologis, dan informasi teknologi yang tergambar dalam kurikulum. Sistem nilai tersebut akan terpelihara melalui pewarisan nilai kepada peserta didik. Nilai yang secara nyata tergambar dalam pendidikan kader pamong praja di IPDN adalah nilai sosial budaya. Hal ini tergambar dari input peserta didik yang berasal dari berbagai suku, adat dan budaya yang berkembang di tanah air Indonesia. Keberagaman dalam kesamaan tergambar dalam sistem pendidikan yang dibangun mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Namun nilai-nilai kepamongan itulah yang harus tertanam dalam diri peserta didik. Jiwa melayani yang perlu ditekankan bukan jiwa dilayani.

2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memaksa semua perguruan tinggi baik yang berada di bawah Kemendiknas/ Kemenristek Dikti maupun di bawah kementerian lain wajib untuk mengikuti dan menyesuaikan aturan yang berlaku. Ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, apabila diikuti akan menjadi satu langkah persiapan awal untuk menghadapi era digitalisasi terhadap semua aspek pendidikan terkait data. Undang-Undang tersebut juga menjadi sarana transisi kearah konsep pendidikan di Indonesia ke depannya. Khususnya terkait dengan sistem, sehingga semua sistem pendidikan tinggi yang berada di Indonesia akan terkoneksi satu dengan lainnya. Sistem yang akan membuat akuntabilitas pengelolaan lembaga pendidikan tinggi akan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan munculnya UU tersebut data semua perguruan tinggi di Indonesia akan dapat di deteksi dan dikelola secara langsung di bawah satu atap kementerian Ristek dan Dikti.

Dengan adanya UU tersebut akan dapat meminimalisir beberapa praktek pendidikan abal-abal di Indonesia. Karena dengan pangkalan data yang ada, untuk perguruan tinggi yang abal-abal, dengan sendirinya akan gugur dalam seleksi alam. Hal tersebut ternyata mengimbas pada IPDN, karena belum merespon aturan dan ketentuan Undang-Undang itu secara langsung dan akumulasi dari belum merespon dan menindaklanjuti ketentuan tersebut berdampak pada akumulasi permasalahan keberadaan IPDN secara yuridis. Mengingat IPDN sejak tahun 2012 belum mempersiapkan berbagai ketentuan terkait proses dan program pendidikannya melalui kurikulum yang dimiliki dengan berbagai syarat dan ketentuan seperti tertuang dalam UU tersebut. Seperti ketentuan terkait KKNI dan SNPT serta komponen komponen lain wajib diwadahi dalam kurikulum yang dimiliki IPDN sesuai UU tersebut.

Faktor eksternal ini secara tidak langsung juga memberi dampak dan menjadikan pembelajaran tersendiri bagi semua pihak yang berada di lingkungan IPDN. Mengingat maju mundurnya IPDN bukan hanya dipegang segelintir orang, tetapi wajib mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di IPDN sehingga sinergitas antara unit, bagian di lingkungan IPDN menjadi suatu keharusan. Permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum bukan hanya masalah dari bagian akademik, tetapi masalah bagi semua warga IPDN sehingga dengan koordinasi dan kolaborasi, menjadikan pembenahan pengelolaan pembelajaran di IPDN dapat dilakukan secara profesional sesuai ketentuan UU yang berlaku.

3. Revolusi Industri 4.0 (Tuntutan Perkembangan IPTEK)

Tantangan dan peluang industri 4.0 mendorong inovasi dan kreasi pendidikan vokasi. IPDN perlu meninjau relevansi antara pendidikan vokasi dan Pemda sebagai user (pengguna) untuk merespon perubahan, tantangan, dan peluang era industri 4.0 dengan tetap memperhatikan aspek kebutuhan pemda. Tantangan pendidikan vokasi semakin kompleks dengan industri 4.0.

Menjawab tantangan industri 4.0, IPDN sebagai lembaga pendidikan di lingkup Kementerian Dalam Negeri sebaiknya harus memiliki karakteristik sebagai berikut; 1) berorientasi pada kinerja dan tolok ukur keberhasilan tidak hanya terbatas di pemerintah pusat atau pemda; 2) justifikasi khusus pada kebutuhan nyata di lapangan; 3) fokus kurikulum pada aspek-aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif; 4) kepekaan terhadap perkembangan dan dinamika pemerintahan; 5) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai; dan 6) adanya dukungan masyarakat.

Praja IPDN sebaiknya mempunyai kompetensi di bidang pemerintahan secara umum dan menyiapkan lulusannya yang mampu dan mau bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Guna menjawab hal dimaksud sudah sepantasnya IPDN segera berbenah dan merevitalisasi sistem pembelajaran meliputi, 1) kurikulum dan pendidikan karakter, 2) bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 3) penyelarasan, dan 4) evaluasi. Selain itu dibutuhkan perbaikan dalam menunjang satuan pendidikan meliputi, 1) ruang kelas baru, 2) ruang belajar, 3) rehabilitasi ruang kelas, 4) asrama siswa dan guru, 5) peralatan, dan 6) manajemen dan kultur sekolah. Elemen peserta didik meliputi, 1) pemberian beasiswa (bila memungkinkan) dan 2) pengembangan bakat minat. Elemen pendidik dan tenaga kependidikan meliputi, 1) penyediaan, 2) distribusi, 3) kualifikasi, 4) sertifikasi, 5) pelatihan, 6) karir dan kesejahteraan, dan 7) penghargaan dan perlindungan. Semuanya perlu diperhatikan dan sinergitas dalam menunjang proses pendidikan di IPDN.

4. Kebutuhan Pangsa Pasar

Munculnya Teknologi Informasi Era RI 4.0 menuntut lulusan IPDN juga menguasainya guna melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat yang kompetitif dan adaptif. Era RI 4.0 mau tidak mau segala aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menyesuaikan dengan pesatnya laju teknologi. Dengan menyempurnakan gerakan literasi dan mengintegrasikan dalam kurikulum dan sistem pembelajaran hal tersebut akan meningkatkan daya saing lulusan dan kepercayaan pengguna akan meningkat. Hal ini tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan diri lulusan IPDN sehingga akan merasa aman sebagai pamong yang terampil karena adanya dukungan dan pengakuan dari masyarakat. Selain itu pengembangan pendidikan di IPDN harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam sistem untuk menjawab tantangan industri 4.0.

5. Akreditasi Program Studi di IPDN

Akan berakhirnya ijin operasional beberapa program studi yang terdapat di IPDN membuat IPDN harus mempersiapkan berbagai hal terkait dengan akreditasi. Sementara beberapa kegiatan proses akreditasi dilakukan melalui cara on-line yang notabenehnya semua ketentuan terkait dengan proses akreditasi terkait penilaian 7 standard yang kesemuanya berkaitan dengan proses pendidikan di IPDN. Mau tidak suka tidak suka, IPDN harus mengikuti prosedur seperti tertuang dalam UU Nomor 12 tahun 2012, terkait penyiapan berbagai pangkalan data, kurikulum sesuai ketentuan UU tersebut untuk proses akreditasi. Kalau IPDN tidak mengikuti ketentuan tersebut IPDN akan hilang secara sistem. Konsekuensi mahal yang harus di bayar dari diberlakukannya disruptive era 4.0 dalam perwujudan sistem dalam bentuk pangkalan data.

Berdasarkan hasil analisis di bawah ini penulis sajikan matrik temuan penelitian sesuai dengan demensinya.

Tabel 4.19
Temuan Hasil Penelitian

Konsep	Dimensi	Temuan
1	2	3
Kurikulum (Meller & Seller)	1. Klarifikasi orientasi kurikulum	Dokumen kurikulum tersebut terbitan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 belum sepenuhnya mengalami pengembangan, sesuai ketentuan UU nomor 12 tahun 2012. Kurikulum program D4 IPDN termasuk kategori orientasi tranmisi bukan transaksi dan juga bukan transformasi karena lebih menekankan pada isi atau materi ajar dimana mahasiswa langsung dihadapkan pada sejumlah materi pembelajaran yang harus diselesaikan selama 8 semester dan bukan termasuk orientasi transaksi karena antara siswa dengan kurikulum tidak saling terpengaruh dan belum pernah dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Juga bukan termasuk orientasi transformasi terlihat antara siswa (mahasiswa) dengan kurikulum tidak terjadi interpenetrate (saling menyentuh) secara holistik. Potensi anak tidak dibiarkan berkembang secara alami namun terlalu banyak campur tangan khususnya dari siklus kehidupan praja yang diawasi selama 24 jam.
	2. Pengembangan tujuan	Pengembangan tujuan pembelajaran mayoritas baru mencapai ranah kognitif dan masih berada pada tataran C2 sementara program D4 seharusnya pada tataran C6 dan masih belum mencakup ranah affektif dan

		psikomotorik (tabel 4.7). Hal ini dipertegas pula dengan soal-soal yang dibuat saat ujian mayoritas masih tahap C2 sebagaimana termuat dalam SAP/GBPP atau RPP/RPS.
	3. Identifikasi model mengajar/strategi mengajar	Identifikasi model mengajar (strategi mengajar) rata-rata masih menggunakan model konvensional terlihat dari rumusan dalam SAP/BGPP atau RPP/RPS yang tertulis adalah ceramah, tanya jawab dan diskusi. Meskipun jawaban responden melalui kuesioner yang menjawab diskusi 54,5 ceramah 27,3 brain storming 9,1 dari 22 responden yang mengisi kuesioner yang di share di group
	4. Implementasi	<p>a. Tingkat kesesuaian materi pembelajaran yang disampaikan dengan materi yang terdapat di SAP/GBPP atau RPP/RPS menunjukkan sebesar 72,7 % dan yang memilih jawaban dilakukan secara acak sebesar 27,3%. Namun kenyataan menunjukkan bahwa dalam implementasi penerapan kurikulum dari segi urutan materi yang dilihat dari kartu kendali yang disandingkan dengan GBPP/SAP atau RPP/RPS (tabel 4.9) menginformasikan bahwa seolah-olah GBPP/SAP atau RPS/RPP tidak dijadikan sebagai dasar pembelajaran dari segi urutan materi pembelajaran konsistensinya minim dan terkesan materi yang disajikan yang penting tidak menyimpang dari inti mata kuliah.</p> <p>b. Dari segi evaluasi yang dibuat dosen mayoritas dalam bentuk esai dengan kategori jenjang C2 (tabel 4.10) dipertegas dengan hasil kuesioner dosen yang menjawab bahwa alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran dalam bentuk esai sebesar 95,5 % dan bentuk multiple choice sebesar 4,5 % Tataran soal yang dibuat rata-rata masih pada level pengetahuan sementara parameter capaian dan alat ukur yang hendaknya dijadikan sebagai target dan acuan meliputi tiga domain yaitu kognitif, afektif dan</p>

		<p>psikomotorik pada tataran C6. Hal tersebut mengindikasikan target yang dicapai masih jauh dari visi lembaga.</p> <p>c. Dari segi kepuasan stakeholder terhadap pengguna lulusan dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) tabel 4.11 menunjukkan dalam kategori baik dilihat dari segi etos kerja lulusan dengan rentang nilai 62,124 % s.d 74,42 %). Dilihat dari alumni yang terpantau menduduki jabatan per 31 Desember 2018 sebesar 83 % (22.001 orang) dari total alumni angkatan I s.d XXV sejumlah 26.523 orang. Namun dari hasil wawancara yang penulis lakukan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai pengguna lulusan (Adwil, Dukcapil, Otda, Keuda, BPSDM dan Polpum) mengisyaratkan bahwa pada tataran konsep dan penerapan teknologi informasi jauh tertinggal dibandingkan dengan perguruan tinggi lain apalagi di tataran teknis, termasuk pemahaman tentang pemerintahan daerah masih kurang.</p>
Trasformasi Pendidikan (Kemenristekdikti)	1. Alur Pembelajaran	Alur pembelajaran menunjukkan hal yang delematis, dimana PBM sudah berjalan, surat keputusan mengajar turun belakangan, SAP/GBPP atau RPP/RPS disusun oleh bagian akademik melalui penunjukan dosen terkesan tanpa memperhitungkan tingkat kesesuaian keilmuan penyusun dengan SAP/GBPP yang disusun. Disamping itu, terjadi keberagaman acuan mengajar karena tidak berjalannya Tim Pengajar Subjek (TPS).
	2. Penilaian	Penilaian yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis dan menafsirkan informasi tentang proses dan hasil belajar mahasiswa IPDN secara terstandar belum maksimal terlihat dari keberagaman soal tes dan masih adanya dosen yang belum menerapkan format dan perhitungan nilai.
	3. Guru/Mentor	Guru/Dosen sebagai pengembang dan pelaku kurikulum di IPDN belum berjalan secara maksimal disebabkan oleh sistem penyusunan RPS/RPP atau SAP/GBPP dan dukungan sarana

		pembelajaran yang belum sesuai dengan kemajuan teknologi serta masih kurang dan tidak meratanya dosen sesuai kualifikasi sertifikasi dengan kebutuhan (tabel 4.13, 4.14 dan 4.17).
	4. Standar Lulusan	Standar lulusan jika dilihat dari nama mata kuliah dan jumlah SKS yang harus ditempuh selama 8 semester masing-masing prodi tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya penekanan lulusan kurikulum 2013 aspek kognitifnya lebih dominan dan pelatihan dilaksanakan terpisah dengan matakuliah sedang kurikulum 2019 aspek psikomotoriknya yang lebih dominan dan pelatihan dilaksanakan terintegrasi dengan matakuliah serta ada beberapa matakuliah yang terpisah. Namun implementasinya kurikulum 2019 RPS yang dibuat masih banyak yang didominasi aspek kognitif dan terlihat belum ada perbedaan
	5. Orientasi Tujuan Kelembagaan	Orientasi tujuan kelembagaan Program D4 IPDN minimal setara dengan jenjang 6 dari 9 jenjang kualifikasi KKNI sementara kondisi di lapangan menunjukkan bahwa IPDN sedang berupaya menuju arah tersebut

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan baik melalui data observasi, dokumen maupun wawancara dapat penulis simpulkan sebagai berikut beberapa hal seperti berikut ini:

1. Gambaran kurikulum pendidikan kader aparatur program Diploma IV IPDN belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ditinjau dari teori Miller Sellar menunjukkan bahwa kurikulum program D4 IPDN berorientasi tranmisi karena lebih menekankan pada isi atau materi ajar yang harus diselesaikan selama 8 semester, tujuan pembelajaran mayoritas baru mencapai ranah kognitif dan masih berada pada tataran C2 , model mengajar (strategi mengajar) rata-rata masih menggunakan model konvensional. Pada tataran implementasi tingkat kesesuaian materi pembelajaran dengan SAP/GBPP atau RPP/RPS terkesan acak. Dari segi kepuasan stakeholder pada tataran konsep, penerapan teknologi informasi dan pemahaman tentang pemerintahan daerah perlu ditingkatkan
2. Transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 di IPDN menunjukkan adanya perubahan dalam penekanan standar lulusan dimana semula ± 150 SKS dalam 8 semester menjadi ± 170 SKS dalam 8 semester dengan perubahan penekanan yang semula lebih ke aspek kognitif menjadi ke aspek psikomotorik (praktik) dan perubahan nomenklatur prodi serta penambahan 1 fakultas dan 3 prodi baru. Namun tenaga pendidik dan sarana prasarana masih menggunakan yang lama dengan membagi ketiga fakultas.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi kurikulum pendidikan kader aparatur era RI 4.0 di IPDN:
 - a. Faktor internal dalam hal ini adalah lembaga IPDN dan komitmen para pengambil kebijakan

- b. Faktor Eksternal transformasi kurikulum di IPDN meliputi masyarakat, Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Revolusi Industri 4.0 (Tuntutan Perkembangan IPTEK), Kebutuhan Pangsa Pasar, Akreditasi Program Studi di IPDN

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Terkait Subtansi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka akan lebih baik manakala memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya komitmen pimpinan dan civitas akademika dalam mewujudkan transformasi kulrkulum era Revolusi Industri 4.0 melalui :
 - a. Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyongsong era RI 4.0
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar Kemenristek Dikti di era RI 4.0.
 - c. Untuk meningkatkan kualitas lulusan akan lebih tepat manakala dalam merekrut dosen dan tenaga kependidikan serta penempatannya disesuaikan dengan standar kebutuhan.
 - d. Penyelenggaraan kurikulum berorientasi transformasi sehingga terjadi interpenetrasi (saling menyentuh) secara holistik dan praja dibiarkan berkembang secara alami dengan sedikit campur tangan khususnya dari siklus kehidupan praja .
 - e. Memperlakukan praja secara lebih dewasa agar lebih bertanggung jawab atas kehidupannya sehingga memunculkan ide, inovasi dan kreativitas atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dibarengi dengan aturan yang jelas, sanksi yang tegas dan sarana yang mendukung penyelenggaraan kurikulum pendidikan kader aparatur di IPDN.
 - f. Menyesuaikan capaian pembelajaran (*learning outcome*) melalui penjenjangan kualifikasi prodi dan TPS serta kebutuhan pengguna lulusan.

2. Komitmen Kemendagri dan IPDN dalam mewujudkan lulusan yang berdaya saing dunia

5.2.2 Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Atas dasar rekomendasi terkait substansi, penelitian ini perlu ditindaklanjuti agar tercipta sumber daya aparatur yang benar-benar profesional sebagai pamong praja yang handal melalui kajian tentang :

1. Komitmen civitas akademika IPDN dalam menyongsong abad 21.
2. Komitmen dan kesiapan civitas akademika IPDN dalam menyiapkan kader aparatur di era Revolusi Industri 4.0. dalam menyongsong abad 21.
3. Analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan kader aparatur di IPDN.
4. Analisis sarana-prasarana pendidikan kader aparatur era Revolusi Industri 4.0. di IPDN

5.2.3 Rekomendasi Terkait Pengabdian Masyarakat bagi Civitas Akademika IPDN

Kurikulum IPDN telah menetapkan praktek lapangan di masing-masing tingkatan sebagai salah satu prasarat bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Akan lebih tepat manakala tema praktek lapangan tidak dilakukan secara seragam setiap angkatan, namun dilakukan berdasarkan spesifikasi program studi yang dikaitkan dengan isu-isu terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah dimana dijadikan lokasi praktek.

Pelaksanaan praktek lapangan didampingi oleh pengasuh sesuai dengan tupoksi pengasuh mendampingi selama 24 jam dan dosen dilibatkan sebagai pembimbing yang datang ke lapangan secara berkala untuk membantu dan memfasilitasi memecahkan isu-isu aktual yang terjadi di lapangan saat praktek lapangan berlangsung. Dengan model ini dosen dapat melakukan pengabdian masyarakat sekaligus dapat melakukan

penelitian dari pemecahan masalah yang dilakukan di lapangan sehingga tugas dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dapat lebih merata dan lebih efisien efektif. Dengan demikian program Lemriska, Lembaga Pengabdian masyarakat dan Fakultas saling terintegrasi dan bersinergi.

A. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Intan, (2018) Makalah Proses Pembelajaran Digital dalam Era Revolusi Industri 4.0, DirektoratJenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2018
- Aoun, J.E. (2017). Robot-Proof: Higher Education in the age of artificial intelligence. US: MIT
- Anderson, Lorin W., & David R. Krathwohl, et.al. 2001. *A Taxonomy for Learning and Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*"
- Adler, J. M & Doren.V.C (1972). *How to Read A Book*. United States of America:Simon &Schuster,Inc
- Agutaya,C.,A. & Zamora,T.J., (2010) *English Language Proficiency of Agricultural Students in MinSCAT, Oriental Mindoro, Phillipines*. (<http://www.asian-esp journal.com>) download pada tanggal 20 juni 2012 pukul 10.35 am.
- Alwasilah, A.C. (1987). *Linguistik Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Angkasa
- . (2000). *Perspektif Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia Dalam Konteks Persaingan Global*. Bandung: CV. Andira
- . (2000). *Politik Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- . (2008). *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- (2011). *Pokoknya Action Research*. Bandung: PT.Kiblat Buku Utama
- Alma, B (2008) *Guru Profesional, Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*, Bandung:Alfabeta
- Arikunto, S. (2007). *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan* Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Arvani, M (2006) *A Discourse Analysis of Business Letters*. (<http://www.asian-esp.journal.com>) edisi Juni 2006. Download pada tanggal 20 juni 2010, jam 10.30 am
- Askar,K.(2005). *Improving ESP Course Design at Indonesian Universitie:A Collective Collaborative Model*. Yogyakarta: Proceeding pada International TEFLIN Conference 2005, Ahmad Dahlan University
- Al, Tamimi,S.A., & Shuib,M (2010) *Investigating the English Language Needs of Petroleum Engineering Students at Hadhramaout University of Science and Technology (HUST)*.(<http://www.asian-esp.journal.com>) edisi April 2010. Download pada tanggal 20 Juni 2010 jam 08.35 am.
- Beauchamp,G.A. (1975). *Curriculum Theory. Third Edition*. Illinois: The Kagg. Press.
- Brown, H. D.(1994). *Teaching By Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy*. New Jersey: Prentice-Hall.Inc
- _____.(1994). *Principles of Language Learning and Teaching. Third Edition*. New Jersey: Prentice-Hall.Inc
-(2007). *Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa. Edisi Kelima* Jakarta:Hak Cipta Edisi Bahasa Indoensia.Kedubes Amerika Serikat
- Cheng,L.,Sin,K.K dan Li,J. (2008). *A Discursive Approach to Legal Texts: Court Judgments as an Example*: Dalam Asian ESP-Journal [Online],Vol.4(1), 14 Halaman. Tersedia pada http://www.asian-esp-Journal .com/ April 2008_ EBook_ editions.pdf [20 Juni 2010 pukul. 10.24 am
- Cheng,M.C., dkk (2008). “Do They Want the Same Thing?”*Learner Perspectives on Two Content Based Course Design in the Context of English as a Foreign Language.*: Dalam Asian efl-Journal [Online],Vol.12(4), hal 67 - 83 Halaman. Tersedia pada http://www.asian-efl-Journal .com/ Dec2010_ EBook_ editions.pdf [20 Juni 2010 pukul. 10.30 am
- Cox, M. D (2004). “Introduction to Faculty Learning Communities”. Dalam “New Direction for Teaching and Learning” No. 97, Spring 2004. Tersedia pada <http://www.vcu.edu/cte program/FCL> [27September 2011]

- Creswell,W.J. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications,Inc.
- Dangerfield.L & Spratt. M (1985). *At the Chalkface. Practice Techniques in Language teaching*. London: Edward Arnold Publishers
- David, N, (1992). *Collaborative Language Learning and Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press
- Ellis, R. (1996). *Second Language Acquisition*.Oxford: Oxford University Press
- _____ (1997). *Second Language Acquisition*. Oxford: Oxford University Press.
- _____ (2000). *Learning a Second Language Through Interaction*. Oxford: Oxford University Press
- Evans,M.J & Brueckner,M. M, (1992). *Teaching and You. Committing, Preparing, and Succeeding*. Massachussets: Allyn and Bacon
- Fraenkel.R.J. & Wallen,E.N.(1993). *How to Design and Evaluate Research in Education (Second Edition)*. New York:McGraw Hill.Inc.
- Freeman,D.L., (1986). *Techniques and Principles in Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
- Freeman. D. E & Freeman. Y. S. (1994).*Between Worlds. Access to Second Language Acquisition*. Portsmouth:Heinemann
- Gall.D.M., Gall.P.J. & Borg.R.W.(2003). *Educational Research. An Introduction*., USA: Pearson Education,Inc.
- Gredler,B.E.M (1986). *Learning and Instruction Theory Into Practice*.New York: Macmillan Publishing Company.
- Grellet,F. (1990).*Developing Reading Skills. A Practical Guide to Reading Comprehension Excercises*. Great Britain: Cambridge University Press
- Hamalik, Oemar. 2007. *Dasar - Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Rosdakarya
- Hamalik, O. (2000) *Model-Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Yayasan Al-Madani Terpadu.
- _____ (2007) *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- _____ (2008) *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Rosdakarya

- Hammond,L.D. (2006). *Powerful Teacher Education*San. Fransisco: Jossey Bass.
- Hamied, A. F. (1989). *Keterpelajar(i)an Dalam Konteks Pemerolehan Bahasa*. Makalah pada Jurnal PELBA (Pertemuan Linguitik Lembaga Bahasa Atma Jaya:Kedua). Yogyakarta: Kanisius
- Hasan.S.H. (2008). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT. Rosdakarya
- _____(2007). *Teori Mengajar*. Artikel pada *Rujukan Filsafat, Teori, dan Praksis Ilmu Pendidikan*. Natawidjaja.Rochman,dkk. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press.
- Hatch,E. & Lazaraton,A. (1991). *The Research Manual. Design and Statistics for Applied Linguistics*. New York: Newbury house Publishers.
- Hidayat, A.A., (2006) *Filsafat Bahasa: Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna, dan Tanda*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hendaryana, S, dkk.2007. *Lesson Study. Suatu Strategi Untuk meningkatkan Keprofesionalan Pendidik*. Bandung: UPI Press.
- Hergenhahn.,R.B. (1982). *An Introduction to Theories of Learning*. United States of America: Prentice Hall,Inc. Englewood Cliffs.NJ.
- Hsu, W. (2008). *An Integrated Approach to Teaching English Trade Letters*. Chinese EFL Journal, January 2008 Vol. 1 Issue 1 page 99-130 (<http://www.chineseefljournal.com>). Download tanggal 20 Juni 2010, pukul 10.30 am.
- Hutchinson,T. & Waters.(1987) *English For Specific Purpose*. Cambridge: Cambridge University Press
- Idi, A. (2006). *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik*. Yogyakarta: Ar.Ruz-Media.
- Johns,M.A.,& Machando,P.D. (2000) *English for Specific Purposes: Tailoring Courses to Student Needs- and to the Outside World*. Dalam makalah Teaching English as a Second or Foreign Language.
- Johson,K & Johson, H.(1998). *Encyclopedia Dictionary of Applied Linguistics*. Oxford: Blackwell Publisher Inc.
- Joyce. W & Weil, M (2000) *Models of Teaching. Sixth Edition*. Needham Heights, MA: Ally & Bacon. A Pearson Education Company

- Komarudin Wastabun <http://www.staging-point.com/read/2017/12/29/110755/>
- Kimble. G.A., & Garnezy.N. (1963) *Principle of General Psychology, Second edition*. New York: The Ronald Press Company.
- Kilpatrick,S, dkk. (2003). *Defining Learning Communities*. Makalah pada CRLRA. Discussion Paper. Series ISSN 1440-480x. Tasmania: University of Tasmania.
- Kessler,C. (1992). *Cooperative Language Learning. A Teacher's Resource Book*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Inc.
- Krahen.D. S (1985) *The Input Hypothesis: Issues and Implications*. London & New York: Longman.
- Lingley,D. (2006). "A Task-based Approach to Content-based Canadian Studies Course in an EFL Context.": Dalam Asian efl-Journal [Online],Vol.8(3), hal 122 - 139 Halaman. Tersedia pada http://www.asian-efl-Journal.com/Dec2006_EBook_editions.pdf [20 Juni 2010 pukul. 10.45 am]
- Lo,F.Y & Sheu.C.(2008). "The Design, Implementation, and Evaluation of an English Tour Guide Project. The Asian ESP Journal November 2007 volume 4, Number 2 (page 79-95); http://www.asian-esp_journal.com. Download pada tanggal 20 Juni 2010 Pukul. 10.23 am.
- Lancourt, J., & Savage, C. (1995). *Organizational Transformation And The Changing Role Of The Human Resources Function. Compensation & Benefits Management*, Autumn : 42-49
- Lincoln, Y & Guba, E (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publication
Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods*. Boston: Parson International Edition.
- Liffler, M., & Tschiesner, A. (2013). *The Internet of Things and the Future of Manufacturing*. McKinsey & Company. pada bidang kesehatan dan bioteknologi. Jurnal Medicinus, Vol 29, Nomor 1, Edisi April.
- Lee, J., Lapira, E., Bagheri, B., Kao, H., (2013). *Recent Advances and Trends in Predictive Manufacturing Systems in Big Data Environment*. Manuf. Lett. 1 (1), 38–41.
- Machando (2000). ESP Tailoring Course to Student needs-and to the Outside world. Artikel pada Murcia, C. Marianne. 2000. *Teaching English as a Second or Foreign Language*. Heinle & Heinle Pub

- Mahfuddin, A. (2009). *Need Assessment Dalam Pengembangan Kurikulum*. Makalah pada Seminar Nasional Optimalisasi Daerah dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Berkualitas Nasional dan Global. Bandung (30 Mei 2009)
- Miller, P.J. & Seller, W. (1985). *Curriculum Perspektif and Practice*. New York: Longman Inc.
- Mitchell, R. & Myles, F. (1998). *Second Language Learning Theories*. London: The Hodder Headline Group.
- Merriam, B. S. (1991). *Case Study Research in Education. A Qualitative Approach*. San Francisco: Josey-Bass. Inc. Publishers
- McDavid, J.C & Hawthorn, L.R. (2006). *Program Evaluation & Performance Measurement. An Introduction to Practice*. London: Sage Publications
- McNeil, D.J. (2006). *Contemporary Curriculum in Thought and action USA*: Wiley Josey Bass Education
- McMillan, J.H. (2008). *Educational Research: Fundamentals for The Consumer*, 5th Edition USA: Person Education, Inc.
- Mudyahardjo, R. (2006). *Filsafat Ilmu Pendidikan. Suatu Pengantar*. Bandung : PT.Rosdakarya.
- Mulyasa, (2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nababan, P.W.J (1989). *Sosiolinguistik dan Pengajaran Bahasa*. Makalah pada Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya Kedia. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Nasution, S. (1989). *Kurikulum dan Pengajaran*. Bandung: Bina Aksar
- _____. (2008). *Asas – Asas Kurikulum*. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Nachmias, F.C. & Guerrero, L.A. (2003). *Social Statistics for a diverse Society*. 3rd Edition. California: Sagepublication.
- Nunan, D. (1988) *The Learner-Centred Curriculum*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. (1992). *Collaborative Language Learning and Teaching*. Great Britain: Cambridge University Press.

- _____ (2004). *Task Based Language Teaching*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Nunn, R. (2006). Designing holistic units for task-based teaching. *Asian EFL Journal*, 8(3): 69-83. Retrieved December 9, 2009 from http://www.asian-efl-Journal.com/September_2006_EBook_editions.pdf
- Nuttall, C. (1996). *Teaching Reading Skills in a Foreign Language*. United Kingdom: Macmillan Heinemann
- McDavid, J.C., & Hawthorn, L.R.L. (2006). *Program Evaluation & preference Measurement. An Introduction to Practice*. California: Sage Publications.
- McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2001). *Research in education A Conceptual Introduction*. United States of America: Addison Wesley Longman, Inc.
- McNeil, D. J. (2006). *Contemporary Curriculum in Thought and Action*. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Oliva, F. P. (1992). *Developing the Curriculum*. United States of America: Harper Collins Publishers.
- Ornstein, C. A. & Hunkins, F. (1993). *Curriculum Foundations Principles and Theory. Second Edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Owen, J.M., & Rogers, P.J. (1999) *Program Evaluation Forms and Approaches. 2nd Edition*. Australia: Allen & Unwin
- Pinter, A. (2006). *Teaching Young Language Learners*. Oxford: Oxford University Press
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 892.1 – 48 Tahun 2009 tentang *Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 51 Tahun 2009 tentang *Kurikulum Program Diploma IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 36 Tahun 2009 tentang *Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 39 Tahun 2009 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Print, M. (1993) *Curriculum Development and Design*. Australia: Allen & Unwin Pty Ltd

- Rahman, M.M, dkk (2009) *Need Analysis for Developing ESP Writing For Foreign Postgraduates in science and Technology at National University of Malaysia*. Agustus 2009 (34-59): Asian ESP-Journal. (http://www.asian-esp-Journal.com/August2009_EBook_editions.pdf)
- Richard, J.C. (2001). *Curriculum Development*. Cambridge: Cambridge Language Education.
- Richard, Jack c., AND Rodgers, Theodore (1986). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reece, I., Walker, S. (1997). *Teaching Training and Learning*. Great Britain: Business Education Publishers Limited
- Rosyada, D. (2007) *Paradigma Pendidikan Demokratis. Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Royse, D., Thyer, B.A., Padgett, D.K. & Logan, TK. (2006) *Program Evaluation. An Introduction*. America: Thomson Brooks/Cole
- Rouf & Aulayah (2006). *ESP Project Work: Preparing Learners for the Workplace*. Asian EFL-Journal. (http://www.asian-efl-Journal.com/Maret2006_EBook_editions.pdf)
- Sanjaya, W. (2008). *Perencanaan dan Desain System Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____(2008). *Kurikulum dan Pembelajaran. Teori dan praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____(2008) *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sato, M. (2007). *Intisari Tentang Tantangan yang Harus Dihadapi Sekolah*. Makalah pada Bacaan Rujukan untuk Lesson Study - Berdasarkan Pengalaman Jepang dan IMSTEP. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.
- _____. (2012). *Bagaimana Mengembangkan Guru Yang Profesional (Lesson Study untuk Peningkatan Profesionalisme Guru)*. Makalah pada Seminar Nasional "Exchange of Experiences on Best Practices of Lesson Study".

- _____ (2012). *Mereformasi Sekolah. Konsep dan Praktek Komunitas Belajar*. Tokyo: Iwanami Shoten Publishers.
- Sudjana.D., (2008). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukmadinata, S.N., dan Jami'at,N.A., dan Ahmad. (2006). *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, prinsip, dan Instrumen)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukmadinata, S. N. (2008). *Pengembangan Kurikulum. Teori dan Praktek*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- _____ (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Sumantri,M & Sukmadinata.S.N. (2007).*Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sprinthall. R.C, Sprinthall. N.A (1974) *Educational Psychology: A Developmental Approach*.Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company.
- Stake. R.E. (1975).*Some Alternatives Presumptions.*: Illinois: Center for Instructional Research & Curriculum Evvaluation.
- Stall, L., dkk (2006). *Creating and Sustaining Effective professional Learning Community*. Dalam nlbooklet, vol.02. DFES-0187-2006. Tersedia pada <http://www.nlcs.org.uk> [28 Juli 2009, pukul. 09.08 pm]
- Stufflebeam,L.D. & Shinkfield,J,A. (2007). *Evaluation Theory, Models, & Applications*. San Francisco: Jossey Bass.
- Taba, H. (1962). *Curriculum Development Theory and Practice*. New York: Harcourt, Brace & World.Inc.
- Tayipnapi.Y.F. (2008). *Evaluasi program & Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan & Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Trochim,K.M.W. (2001). *The Research Methods Knowledge Base*. Cincinnati: Atomic Dog publishing.

- Tim Konsultasi Layanan Reformasi IPDN Depdagri dan World Bank. (2005). IPDN Roadmap Transformasi. Ringkasan Laporan (Februari 2005)
- Tzukusi, K. (2010) makalah pada kegiatan Pelita Counterpart Training in Japan. Lesson Study Course (Juni 2010)
- Velez. J.J. (2011). *Cultivating Change Through Peer Teaching*. Dalam Journal of Agricultural Education. Volume 52, number 1 hal 40 – 49. Tersedia pada <http://www.....> (14 Desember 2011, pukul 07.39 pm)
- Worthen.R.B., Sanders.R.J. & Fitzpatrick.L.J. (2004). *Program Evaluation. Alternatives Approaches and Practical Guidelines*. United States: Pearson Education,Inc.
- Zais,S.Robert. (1976). *Curriculum Principles and Foundations*. New York: Harper and Row, Publishers.
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Peraturan Rektor IPDN Nomor 423-5-764 tahun 2013 tentang Kurikulum Program Diploma IV dan Sarjana (S1) IPDN
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3115/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016
- Peraturan Rektor IPDN Nomor 423-5-764 tahun 2013 tentang Kurikulum Program Diploma IV dan Sarjana (S1) IPDN
- Lampiran Peraturan Rektor IPDN Nomor 432.5-553 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 423.5-502 tahu 2018 tentang

Pembentukan Panitia Kegiatan dan Penyusun Rencana Pembelajaran Semester

Data Dokumen Kurikulum Nomor 423-5-764 tahun 2013,

Renstra IPDN 2015–2019

LAKIP IPDN Tahun 2018

Laporan Hasil Monitoring Kegiatan Sertifikasi Dosen Secara Online Tahun 2019

A. Pedoman Wawancara di lingkungan IPDN

1. Landasan filosofis kurikulum IPDN
2. Pengembangan tujuan pendidikan
3. Model/strategi mengajar
4. Implementasi kurikulum
5. Alur pembelajaran (kurikulum, RPS/RPP)
6. sistem dan model Penilaian yang digunakan
7. Keadaan/kedudukan dosen dalam KBM
8. standar lulusan yang ditetapkan
9. Orientasi Tujuan Kelembagaan

B. Pedoman wawancara untuk pengguna lulusan (BPSDM, POLPUM, OTDA, KEUDA, ADWIL dan DUKCAPIL) untuk mengetahui kepuasan pelanggan dan harapan ke depan.

1. Apakah pendapat Bapak/Ibu terhadap alumni IPDN yang ditempatkan di satuan kerja Bapak/Ibu telah memenuhi standar kompetensi untuk seluruh jabatan dan uraian tugas yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi?
2. Apakah harapan Bapak/Ibu terhadap alumni IPDN kedepannya terkait dengan kesiapan dalam melaksanakan tugas (kinerja) terutama dalam hal Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap?
3. Menurut Bapak/Ibu, Mata Kuliah apa yang seharusnya ada dan diterapkan di IPDN sesuai kebutuhan Organisasi (Satker Kemendagri)?
4. Menurut Bapak/Ibu pemahaman apa yang seharusnya telah dikuasai lulusan IPDN jika ditempatkan di organisasi yang Bapak/Ibu pimpin ?

C. Kuesioer

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Yth. Bapak/Ibu Dosen, mohon kesediaan dan perkenannya untuk mengisi kuesioner di bawah ini.

1. Menurut Bapak/Ibu dalam menyusun kurikulum apa perlu melibatkan peserta didik ?

- A. ya B. Tidak Perlu

2. Metode yang paling sering Bapak/Ibu gunakan dalam perkuliahan

- A. Ceramah C. Tanya Jawab D. Brain Storming
B. Diskusi D. Latihan

3. Di awal pembelajaran jika Bapak/Ibu melakukan kontrak belajar dengan mahasiswa/praja hal utama yang harus menjadi komitmen bersama adalah

- A. tata tertib perkuliahan termasuk kesepakatan perkuliahan
B. Rangkaian materi yang akan dipelajari dalam satu semester
C. Teknik Penilaian

4. Menurut Bapak/Ibu proses belajarmengajar adalah

- A. Transformasi ilmu B. Mengubah Perilaku

5. Menurut Bapak/Ibu 5. Menurut Bapak/Ibu peran dosen adalah

- A. Fasilitator B. Instruktur

6. Dalam mengukur keberhasilan proses belajar mengajar biasanya dilakukan melalui tes. Bentuk tes yang sering Bapak/Ibu berikan kepada mahasiswa

- A. Objektif Tes (Multiole Chois/Pilihan Ganda B. Subjektif Tes (Esai)

7. Apakah Bapak/Ibu selalu menyusun SAP/GBPP atau RPS/RPP dari matakuliah yang ditugaskan oleh lembaga ?

